



BADAN POM



BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG



LAPORAN KINERJA

2020

BALAI BESAR **POM** DI SEMARANG

LAYANAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG

Informasi 081225694252 Sertifikasi 081227701941 Pengujian 081326759688 Kantor 024-7612324



bpom_semarang@pom.go.id



[@bpomsemarang](https://www.instagram.com/bpomsemarang)



KATA PENGANTAR



*P*uji Syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM (BBPOM) di Semarang Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2020 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis

Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan kepada para pemangku kepentingan atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyampaian laporan kinerja BBPOM di Semarang merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BBPOM di Semarang serta upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, 19 Februari 2021

Kepala BBPOM di Semarang



[Signature]
Kusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
BAB IV PENUTUP	129
LAMPIRAN	131



DAFTAR TABEL

Tabel 1 KEBUTUHAN SDM BBPOM DI SEMARANG BERDASARKAN ABK TAHUN 2020 .	8
Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2020	38
Tabel 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2020	40
Tabel 4 Kriteria Penilaian Capaian Target Indikator Kinerja	44
Tabel 5 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) BBPOM di Semarang dan BBPOM Klaster 1 Tahun 2020.....	46
Tabel 6 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Pertama	48
Tabel 7 Profil MS dan TMS Hasil Sampling Obat Secara Acak Tahun 2020	49
Tabel 8 Makanan Yang Memenuhi Syarat Tahun 2020.....	53
Tabel 9 HASIL SAMPLING TARGETED, PENGAWASAN PENANDAAN, DAN PENGUJIAN TAHUN 2020	55
Tabel 10 Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020	57
Tabel 11 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Kedua.....	58
Tabel 12 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Ketiga	61
Tabel 13 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Keempat.....	71
Tabel 14 Jumlah Layanan Sertifikasi Tahun 2020.....	78
TABEL 15 CAPAIAN SARANA PRODUKSI YANG MEMENUHI KETENTUAN	79
Tabel 16 Hasil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan Tahun 2020.....	81
TABEL 17 TABEL CAPAIAN SARANA DISTRIBUSI YANG MEMENUHI KETENTUAN	83
Tabel 18 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2020	85
Tabel 19 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Kelima	90
Tabel 20 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Keenam.....	97
Tabel 21 Jumlah Sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar	98
Tabel 22 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Ketujuh	101
Tabel 23 penanganan Carry Over di tahun 2020.....	103
Tabel 24 Tahap penyelesaian perkara di tahun 2020.....	103
Tabel 25 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Kedelapan	104
Tabel 26 Komponen penilaian Indeks RB	106
Tabel 27 Perbandingan Capaian Nilai AKIP BBPOM di Semarang Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	107
Tabel 28 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Kesembilan	111
Tabel 29 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Kesepuluh	114
Tabel 30 Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2020	114
Tabel 31 Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2020	116
Tabel 32 Indeks Pemanfaatan SIPT BBPOM di Semarang	118
Tabel 33 Profil Berita Aktual BBPOM di Semarang Tahun 2020	118
Tabel 34 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Kesebelas	120
Tabel 35 Profil tingkat efisiensi setiap sasaran kegiatan BBPOM di Semarang.....	122
Tabel 36 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang Tahun 2019 dan 2020.....	123
Tabel 37 Realisasi Anggaran terhadap Pagu Anggaran per Sasaran Strategis.....	126



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Capaian BBPOM di Semarang	ix
Gambar 2 Serangkaian kegiatan, inovasi, dan prestasi kerja tahun 2020	x
Gambar 3 STRUKTUR ORGANISASI BBPOM DI SEMARANG	2
Gambar 4 STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM	6
Gambar 5 KOMPONEN APARATUR SIPIL NEGARA BBPOM DI SEMARANG	8
Gambar 6 PROFIL PEGAWAI BBPOM DI SEMARANG, LOKA POM DI SURAKARTA DAN LOKA POM DI BANYUMAS BERDASAR TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2020.....	10
Gambar 7 Profil Pegawai berdasarkan Usia Tahun 2020.....	11
Gambar 8 Peta Provinsi Jawa Tengah.....	13
Gambar 9 Data Sarana Produksi Obat dan Makanan	14
Gambar 10 Data Sarana Distribusi Obat dan Makanan.....	14
Gambar 11 Visi, Misi, Arahkan Presiden, dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024	26
Gambar 12 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Semarang periode 2020-2024	27
Gambar 13 Peta Strategi Level II BBPOM di Semarang	28
Gambar 14 Peta Strategi BSC Loka POM (2020-2024)	29
Gambar 15 NPS Total BBPOM Klaster 1 Tahun 2020	47
Gambar 16 Grafik Perbandingan Balai Seklaster berdasarkan kriteria nps	47
Gambar 17 Capaian IKK 1.1 dari kelompok BPOM Klaster 1	49
Gambar 18 Diagram kondisi peredaran produk obat di jawa tengah	50
Gambar 19 Capaian IKK 1.2 dari kelompok BPOM Klaster 1	52
Gambar 20 Capaian IKK 1.3 dari kelompok BPOM Klaster 1	54
Gambar 21 Capaian IKK 1.4 dari kelompok BPOM Klaster 1	57
Gambar 22 Capaian IKK 2.1 dari kelompok BPOM Klaster 1	59
Gambar 23 Capaian IKK 3.1 dari kelompok BPOM Klaster 1	62
Gambar 24 Capaian IKK 3.2 dari kelompok BPOM Klaster 1	65
Gambar 25 Gambar Perbandingan capaian ikk 3.3 tahun 2019-2020	68
Gambar 26 Capaian IKK 3.3 dari kelompok BPOM Klaster 1	68
Gambar 27 Capaian IKK 4.1 dari kelompok BPOM Klaster 1	72
Gambar 28 Grafik Perbandingan Capaian ikk 4.2 Tahun 2018-2020	74
Gambar 29 Capaian IKK 4.2 dari kelompok BPOM Klaster 1	74
Gambar 30 Perbandingan capaian ikk 4.3 Tahun 2019-2020.....	77
Gambar 31 Capaian IKK 4.3 dari kelompok BPOM Klaster 1	77
Gambar 32 Grafik Perbandingan Capaian IKK 4.4 Tahun 2019-2020	79
Gambar 33 Trend Analisis %Capaian Sarana Produksi MK.....	79
Gambar 34 Tren Analisis % MK SaraNA Produksi	79
Gambar 35 Capaian IKK 4.4 dari kelompok BPOM Klaster 1	80
Gambar 36 Grafik Perbandingan Capaian IKK 4.5 Tahun 2019-2020	82
Gambar 37 Trend Analisis % Capaian Sarana Distribusi MK	83
Gambar 38 Trend Analisis % MK Sarana Distribusi	83
Gambar 39 Capaian Ikk 4.5 Dari Kelompok BPOM Klaster 1	83
Gambar 40 Capaian Ikk 4.6 Dari Kelompok BPOM Klaster 1	88

Gambar 41 Capaian Ikk 5.1 Dari Kelompok BPOM Klaster 1	91
Gambar 42 Capaian Ikk 5.2 Dari Kelompok BPOM Klaster 1	93
Gambar 43 Capaian Ikk 5.3 Dari Kelompok BPOM Klaster 1	94
Gambar 44 Capaian Ikk 5.4 Dari Kelompok BPOM Klaster 1	96
Gambar 45 Capaian Ikk 6.1 Dari Kelompok BPOM Klaster 1	98
Gambar 46 Capaian Ikk 6.2 Dari Kelompok BPOM Klaster 1	100
Gambar 47 Capaian Ikk 7.1 Dari Kelompok BPOM Klaster 1	102
Gambar 48 Capaian Ikk 8.1 Dari Kelompok BPOM Klaster 1	105
Gambar 49 Perbandingan Nilai Sakip 2016-2020	107
Gambar 50 Capaian Ikk 8.2 Dari Kelompok BPOM Klaster 1	107
Gambar 51 Capaian Ikk 9.1 Dari Kelompok BPOM Klaster 1	112
Gambar 52 Capaian Ikk 10.1 Dari Kelompok BPOM Klaster 1	115
Gambar 53 Capaian Ikk 10.2 Dari Kelompok BPOM Klaster 1	117
Gambar 54 Dashboard Nilai Kinerja Anggaran TW IV Tahun 2020	120
Gambar 55 Capaian Ikk 11.1 Dari Kelompok BPOM Klaster 1	121
Gambar 56 Grafik Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang 2018-2020	123
Gambar 57 Capaian Ikk 11.2 Dari Kelompok BPOM Klaster 1	123
Gambar 58 Perbandingan Realisasi ANggaran Tahun2019-2020	125
Gambar 59 Laporan Monev E-Performance Tahun 2020	127



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SURAT KEPUTUSAN RENSTRA BBPOM DI SEMARANG 2020

LAMPIRAN 2. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA BALAI BESAR POM DI SEMARANG 2020-2024

LAMPIRAN 3. PERJANJIAN KINERJA BBPOM DI SEMARANG 2020

LAMPIRAN 4. A. RENCANA KINERJA (RENJA) 2020

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RENSTRA) 2020

LAMPIRAN 5. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

LAMPIRAN 6. PENGUKURAN KINERJA

LAMPIRAN 7. REKAPITULASI HASIL REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020

- A. Rekapitulasi Pemeriksaan Dan Pengujian Sampel
- B. Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat Dan Makanan
- C. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat Dan Makanan
- D. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan
- E. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bpom
- F. /Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan
- G. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan
- H. Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu
- I. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan
- J. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan
- K. Indeks Pelayanan Publik
- L. Tingkat Efektifitas Kie Obat Dan Makanan
- M. Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
- N. Jumlah Desa Pangan Aman
- O. Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya
- P. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
- Q. Intelijen dan Penyidikan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Semarang
- R. Indeks RB 2020



- S. Nilai AKIP 2019
- T. Indeks Profesionalitas ASN
- U. ersentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat Dan Makanan Sesuai Standar GLP
- V. Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi
- W. Nilai Kinerja Anggaran
- X. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
- Y. Realisasi Anggaran 2020

LAMPIRAN 8. SK REWARD AND PUNISHMENT ATAS CAPAIAN IKU

LAMPIRAN 9. NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) BBPOM DI SEMARANG DAN KLASTER 1 BBPOM



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2020 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja semata-mata dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. Maka dari itu, Laporan Kinerja adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga. Disamping itu, Laporan Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2020 juga bertujuan sebagai:

1. Wujud pertanggungjawaban kepada; dan
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Semarang sebagai bahan dalam memberikan saran/masukan untuk memicu perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2020. Semua Program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Strategi BBPOM di Semarang selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Kinerja Tahunan.

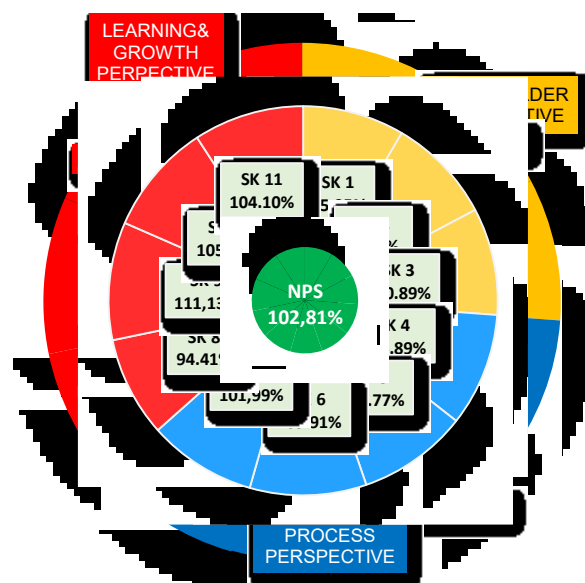
Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 28 Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan Program yang dicapai terangkum dalam 11 Sasaran Strategis yang terbagi dalam *Stakeholder Perspective* (SP), *Internal Process Perspective* (IPP), dan *Learning & Growth Perspective* (LGP);

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Semarang tahun 2020 mendukung Nilai Pencapaian Sasaran (**NPS**) keseluruhan tahun 2020 adalah sebesar **102,81%**, dengan kriteria **BAIK**, dengan capaian sasaran strategis SP 98,91%, IPP 105,64%, dan LGP 103,88%; yang ketiganya tercapai dalam kategori **BAIK**.

Capaian tersebut tidak terlepas dari dilaksanakannya 16 program prioritas dengan realisasi nilai kinerja anggaran sebesar 90,96%; dan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 100%.

Serangkaian kegiatan, inovasi, dan prestasi kerja tahun 2020 yang mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja di BBPOM di Semarang, diantaranya :

1. Memperoleh predikat wilayah bebas korupsi (WBK) oleh KemenPANRB, 21 Desember 2020.



GAMBAR 1 CAPAIAN BBPOM DI SEMARANG

2. Laboratorium Pengujian BBPOM di Semarang sebagai salah satu laboratorium pengujian covid-19, sejak Agustus 2020, hingga Desember 2020 telah menguji sebanyak 6.023 sampel *specimen* covid-19 yang berasal dari kabupaten/kota di Jawa Tengah.
3. Kegiatan BPOM SIMPATIC (**SI**lap **M**emberikan **P**elay**A**nan **T**erbaik dan **I**ntensif di tempat **C**ustomer) yaitu konsultasi langsung di sarana produksi pangan dan Obat Tradisional di Kota Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.
4. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Sinaw on line sareng (SOS) BBPOM di Semarang dan inovasi SIULAN yang dilakukan rutin sebulan sekali.
5. Inovasi Lakone Sekti, sebagai wujud nyata BBPOM di Semarang hadir langsung ke masyarakat, meski pelaksanaan kegiatan ini masih terbatas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen.



6. Meraih Sertifikat ISO 9001:2015, Agustus 2020.
7. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pengawasan, tindak lanjut, dan evaluasi hasil pengawasan, serta memonitor pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bersama lintas sektor terkait.
8. Penindakan terhadap sarana distribusi dan produksi sediaan farmasi, dengan barang bukti total senilai 1,2 milyar rupiah.

GAMBAR 2 SERANGKAIAN KEGIATAN, INOVASI, DAN PRESTASI KERJA TAHUN 2020

Oleh Karena itu, Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja BBPOM di Semarang kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja BBPOM di Semarang di masa mendatang.



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2020. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Semarang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1 Gambaran Umum Organisasi

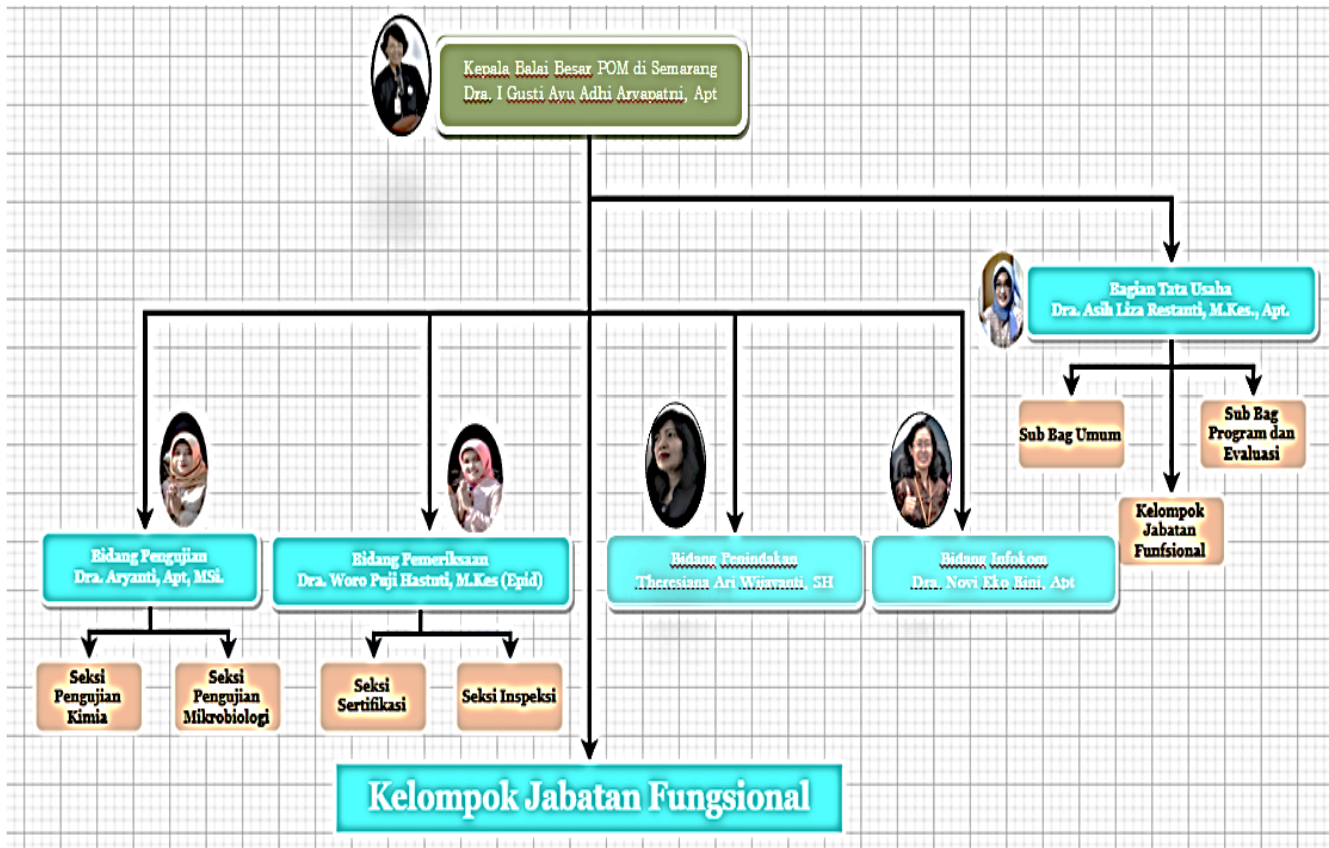
BBPOM di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328, 7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email likpomsm@yahoo.com, Website www.pom.go.id, [Instagram](#), [Facebook](#), dan [Twitter: @bpomsemarang](#)

1.1.1. Fungsi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang disusun berdasarkan peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, termasuk Loka POM. Struktur organisasi BBPOM di Semarang seperti pada Gambar 1.1 dan Loka POM seperti pada Gambar 1.2



BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG



GAMBAR 3 STRUKTUR ORGANISASI BBPOM DI SEMARANG

1. Bidang Pengujian

Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dengan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pengujian rutin kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing; dan
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.



Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia rutin dan pengujian kimia dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
- b. Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi rutin dan pengujian mikrobiologi dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Pemeriksaan

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Inspeksi; mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.



- b. Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Penindakan

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



5. Bagian Tata Usaha

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

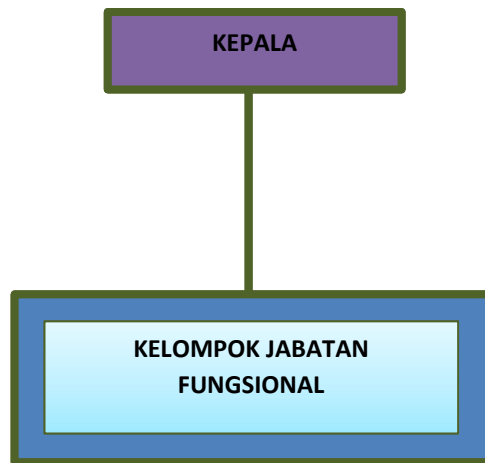
Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi;
mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- b. Subbagian Umum; dan
pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT Badan POM Kepala Badan menunjuk BBPOM di Semarang untuk mengkoordinasikan Loka POM di Surakarta dan Banyumas.



BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



GAMBAR 4 STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM

1.2 Aspek Strategis Organisasi

BBPOM di Semarang mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BBPOM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas BBPOM di Semarang sebagai unit kerja Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dan efisien dalam mengontrol keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi BBPOM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu :

- 1) Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
- 3) Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang



Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung lintas sector terkait meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi. Selain hal tersebut, sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Badan POM sebagai koordinator melakukan upaya penguatan kelembagaan melalui pembentukan Balai POM di kabupaten / kota.

1.3 Analisis Lingkungan Strategis

1.3.1. Internal

BBPOM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh :

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Semarang pada per November Tahun 2020 adalah sebanyak 194 orang, Loka POM di Surakarta 24 orang dan Loka POM di Banyumas 16 orang. Dengan proporsi 79% Perempuan dan 21% laki-laki yang tersebar di BBPOM di Semarang, Loka POM di Banyumas dan Loka POM Surakarta.

Dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dari target yang ditetapkan pada tahun 2020, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang, Loka POM di Banyumas dan Loka POM Surakarta, Jumlah tersebut belum memadai baik dalam hal jumlah maupun proporsi terampil dan ahli, dimana secara keseluruhan masih kekurangan SDM sejumlah 126 orang.

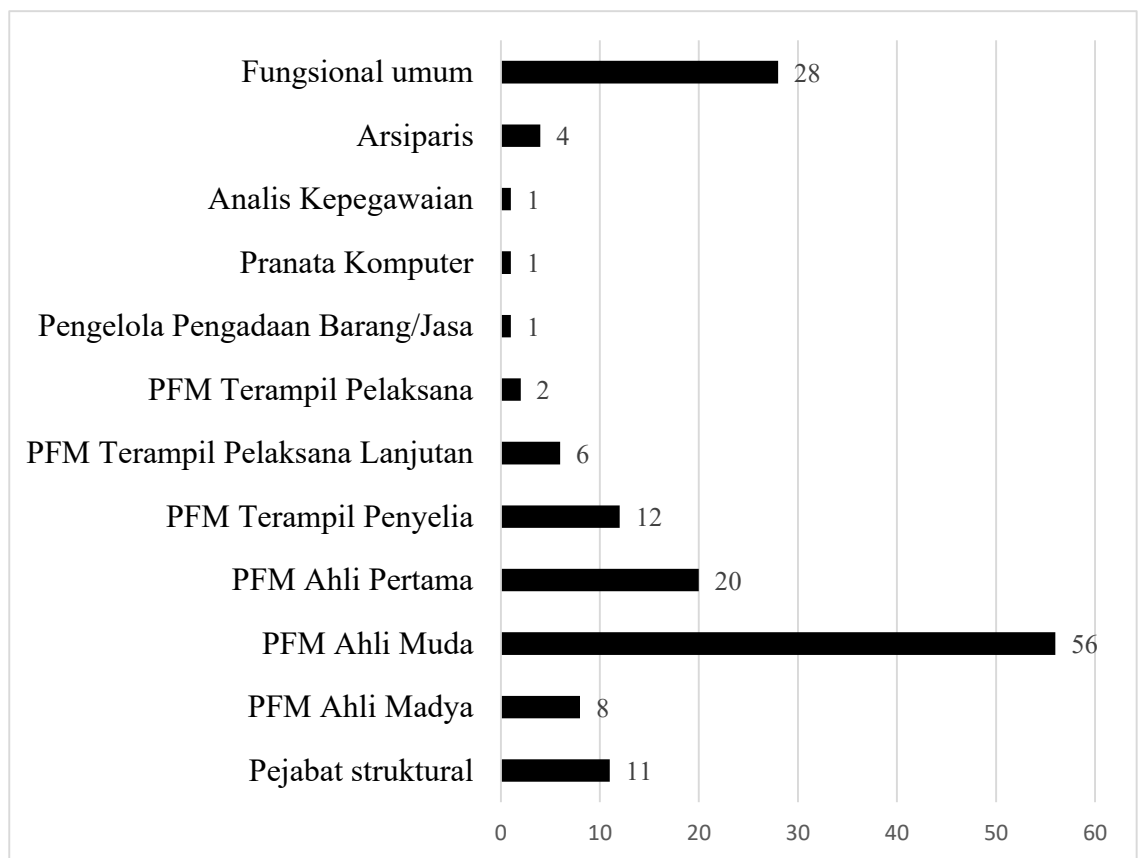
Demikian juga Loka Banyumas per April 2020 masih kekurangan SDM 16 orang. Dan Loka Surakarta masih kekurangan SDM 12 orang.

Adapun profil pegawai BBPOM di Semarang pada Bidang/Seksi dan Bagian Tata Usaha berdasarkan ABK sampai dengan November tahun 2020 seperti pada tabel berikut :

TABEL 1 KEBUTUHAN SDM BBPOM DI SEMARANG BERDASARKAN ABK TAHUN 2020

No	Unit Kerja	Jumlah SDM Berdasarkan ABK	Jumlah SDM (<i>Bazzeting</i>)	GAP
1	Bidang Pengujian	82 orang	44 orang	38 orang
2	Bidang Pemeriksaan	65 orang	33 orang	32 orang
3	Bidang Penindakan	13 orang	7 orang	6 orang
4	Bidang Infokom	23 orang	12 orang	11 orang
5	Bidang Tata Usaha	48 orang	9 orang	39 orang
Total		231 orang	105 orang	126 orang

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa guna mendukung struktur organisasi yang ideal pada BBPOM di Semarang masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 101 orang agar tugas Pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan optimal.



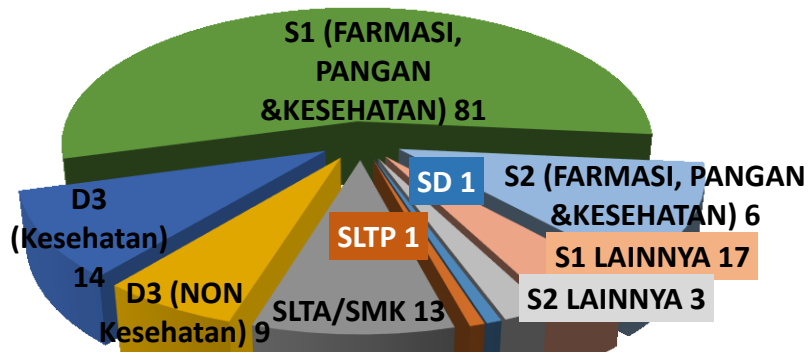
GAMBAR 5 KOMPONEN APARATUR SIPIL NEGARA BBPOM DI SEMARANG



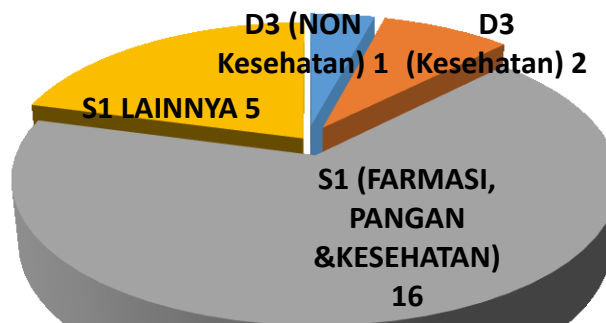
Dilihat dari Komponen Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), BBPOM di Semarang, memiliki Pengawas Fungsional Pengawas Farmasi Makanan (PFM) terampil sebanyak 20 ASN, dan PFM ahli sebanyak 84 ASN. Jabatan fungsional tertentu selain PFM yang dimiliki BBPOM di Semarang diantaranya Arsiparis, Analis Kepegawaian, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pranata Komputer sebanyak 34 orang. Para Pejabat PFM secara penuh melakukan kegiatan teknis sesuai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak fungsional pengawasan sediaan farmasi, produk biologi, suplemen makanan, bahan berbahaya, dan makanan.

Peningkatan tata laksana yang lebih efektif baik internal maupun eksternal kebutuhan dan pengembangan SDM (termasuk kualitas dan kuantitas) serta peningkatan strategi manajemen SDM yang tepat di Balai harus terus dilakukan untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai melalui kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Jawa Tengah secara optimal. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan juga harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. "

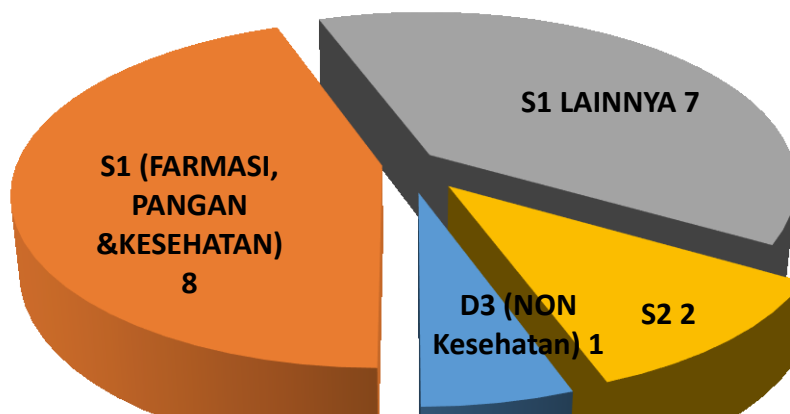
SDM BBPOM di Semarang sampai dengan April tahun 2020, terdiri dari Apoteker dan S2 lain 63 orang, S1 46 orang, D3 21 orang, Asisten Apoteker dan SLA lain 13 orang, SLP kebawah 2 orang. Dari komposisi tenaga tersebut terlihat tenaga dengan pendidikan S1 dan S2 75,18%. Tenaga terampil (D3) pada bidang teknis pengujian dan pengawasan jumlahnya belum memadai dibandingkan dengan beban kerja yang harus dikerjakan oleh pengawas terampil pada BBPOM di Semarang. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Semarang melakukan optimalisasi agar beban kerja yang ada dapat diselesaikan oleh tenaga yang ada. Tabel berikut menunjukkan jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan.



BBPOM di Semarang



LOKA POM di Surakarta

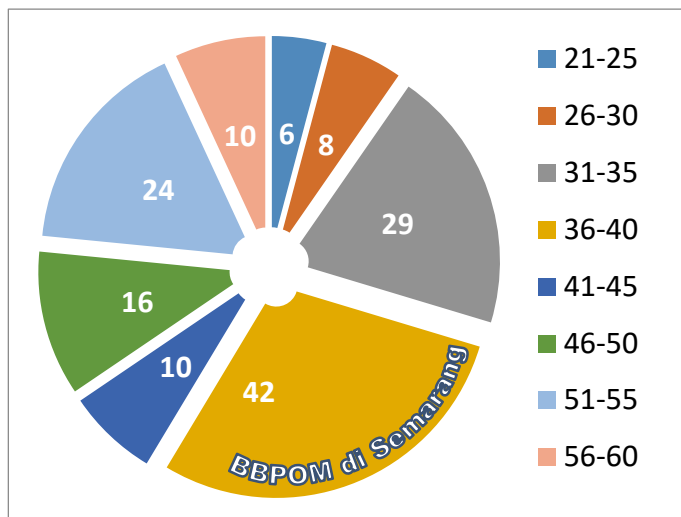


LOKA POM di Banyumas

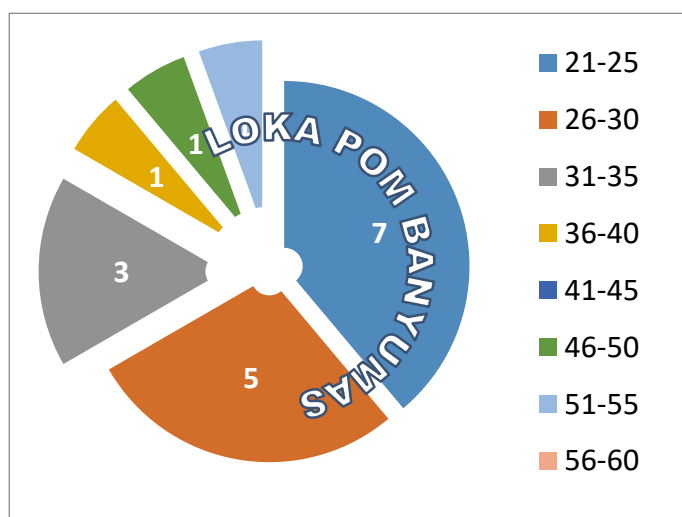
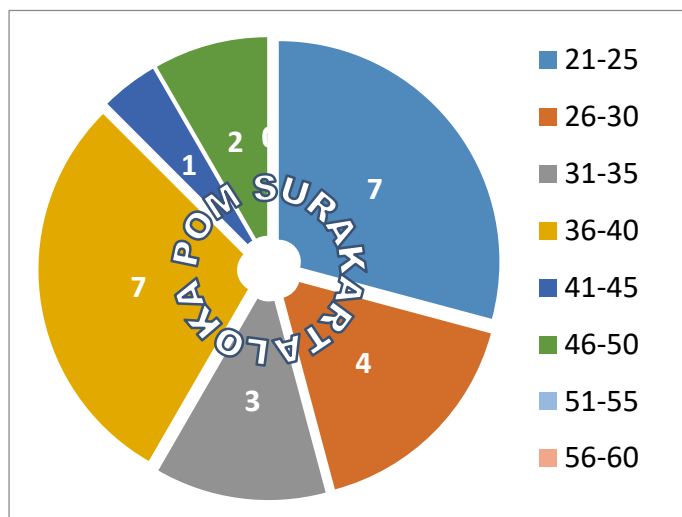
GAMBAR 6 PROFIL PEGAWAI BBPOM DI SEMARANG, LOKA POM DI SURAKARTA DAN LOKA POM DI BANYUMAS BERDASAR TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2020



BBPOM di Semarang sebagai organisasi *scientific based* seharusnya didukung oleh



SDM dengan pendidikan S2 lebih banyak dari yang ada saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Semarang harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan merencanakan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Sesuai arah kebijakan pembangunan kedepan membangun sumber daya manusia unggul menjadi prioritas utama dan merupakan investasi jangka panjang menuju Indonesia maju.



GAMBAR 7 PROFIL PEGAWAI BERDASARKAN USIA TAHUN 2020

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan sehingga Laboratorium BBPOM di Semarang harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Saat ini laboratorium BBPOM di Semarang telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya dan secara konsisten menerapkan sistem manajemen mutu ISO / IEC 17025:2017.

b) Anggaran.

Sumber anggaran pelaksanaan program/kegiatan BBPOM di Semarang keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu Anggaran Tahun 2020 : Rp. 48.773.819.000,-

Realisasi anggaran : Rp. 48.184.906.899,-

Persentase realisasi anggaran sebesar 98.79 %. BBPOM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010, tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2020 sebesar : Rp. 477.586.568,-.

Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan kepada pihak ketiga atas permintaan pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

Rincian PNBP yang diperoleh Tahun 2020 dengan total Rp. 780.580.000,- berasal dari :

a. Pengujian laboratorium : Rp. 374.330.000,-

b. Penerbitan SKI dan SKE : Rp. 406.250.000,-

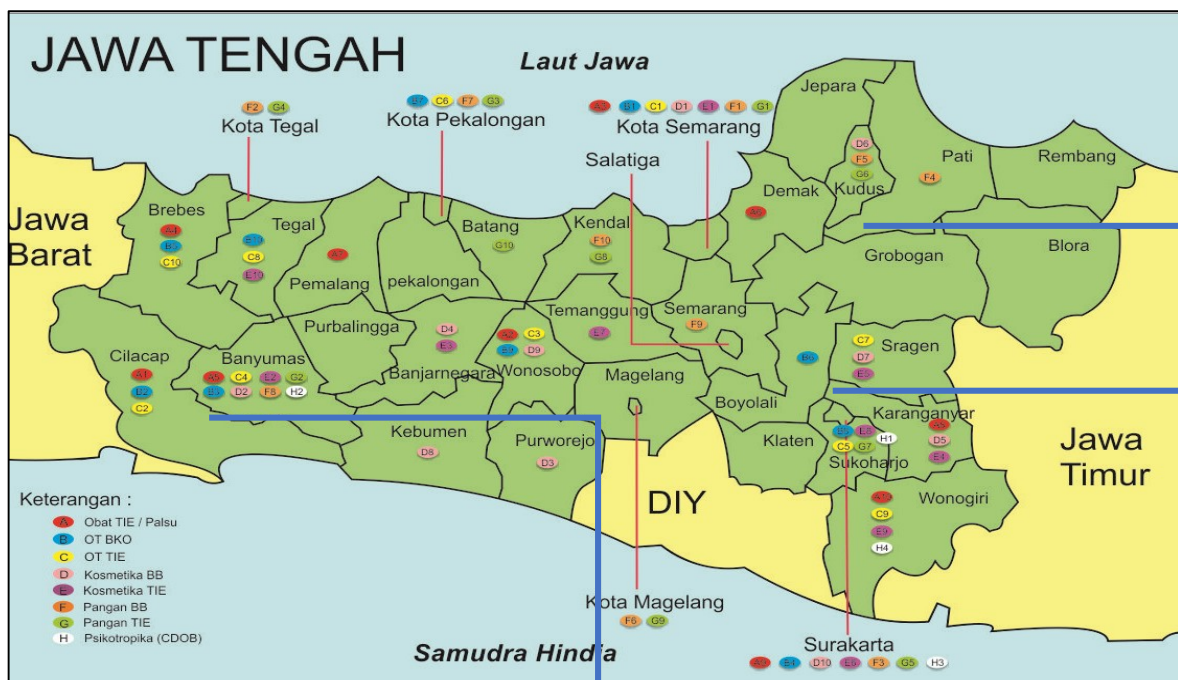
1.3.2. Eksternal

Wilayah kerja BBPOM di Semarang bersama Loka POM di Surakarta dan Loka POM di Banyumas adalah seluruh propinsi JawaTengah, mempunyai luas wilayah seluruhnya 3.254.412 ha atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa dan 1,7% dari luas Indonesia. Komposisi luas lahan yang ada, 30,47% lahan sawah, dan 69,53% bukan lahan sawah. Pembagian wilayah kerja seperti gambar di bawah ini.



A. Wilayah kerja BBPOM di Semarang, meliputi :

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. Kota Semarang | 10. Kabupaten Semarang | 18. Kabupaten Kudus |
| 2. Kabupaten Grobogan | 11. Kabupaten Batang | 19. Kabupaten Blora |
| 3. Kabupaten Demak | 12. Kabupaten Boyolali | 20. Kota Magelang |
| 4. Kabupaten Kebumen | 13. Kabupaten Purworejo | 21. Kota Pekalongan |
| 5. Kabupaten Klaten | 14. Kabupaten Temanggung | 22. Kota Salatiga |
| 6. Kabupaten Pati | 15. Kabupaten Rembang | 23. Kabupaten Tegal |
| 7. Kabupaten Jepara | 16. Kabupaten Wonosobo | 24. Kota Tegal |
| 8. Kabupaten Kendal | 17. Kabupaten Pekalongan | 25. Kabupaten Brebes |
| 9. Kabupaten Magelang | | 26. Kabupaten Pemalang |



GAMBAR 8 PETA PROVINSI JAWA TENGAH

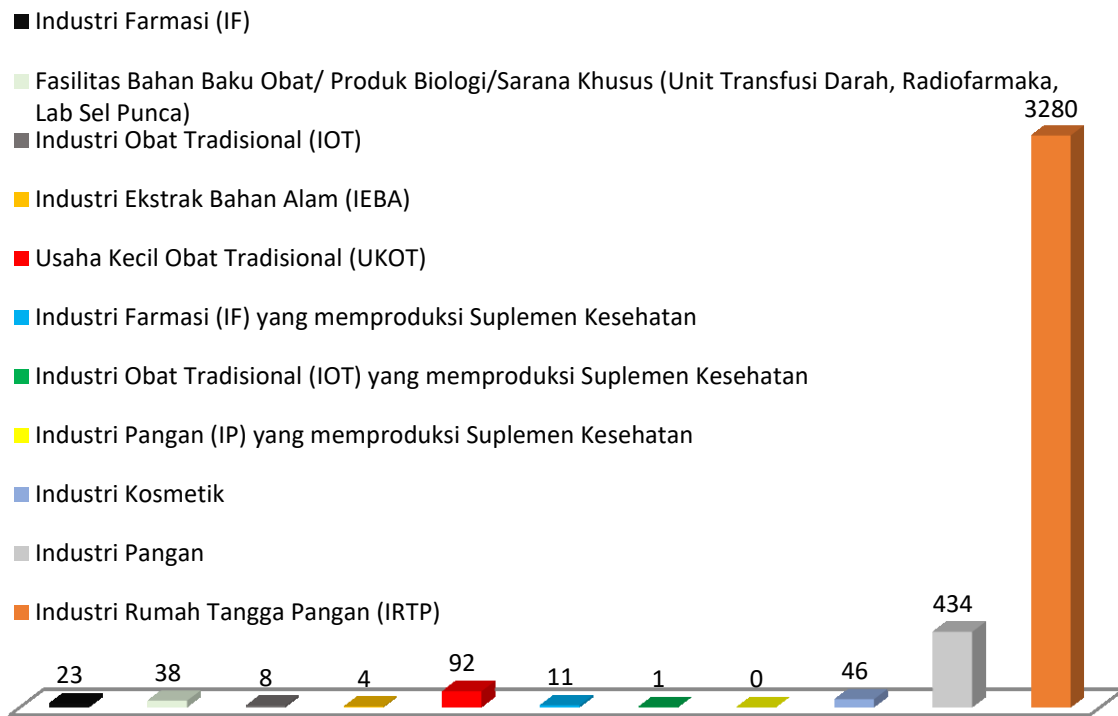
B. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas, meliputi :

1. Kabupaten Banyumas
2. Kabupaten Cilacap
3. Kabupaten Banjarnegara
4. Kabupaten Purbalingga

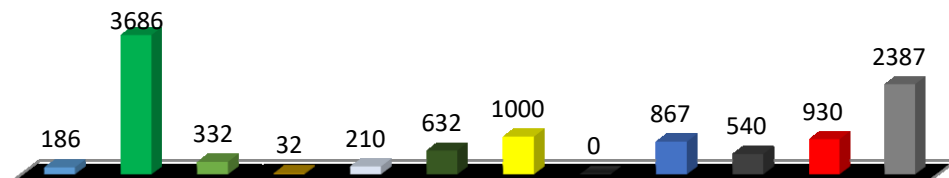
C. Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta, meliputi :

1. Kota Surakarta
2. Kabupaten Karanganyar
3. Kabupaten Sragen
4. Kabupaten Sukoharjo
5. Kabupaten Wonogiri

BBPOM di Semarang bersama Loka POM di Surakarta dan Loka POM di Banyumas melakukan pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya yang beredar di seluruh wilayah Jawa Tengah.



GAMBAR 9 DATA SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN



- Pedagang Besar Farmasi (PBF)
- Apotek
- Toko Obat
- Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)
- Rumah Sakit (RS)
- Puskesmas
- Klinik
- Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)
- Fasilitas Distribusi Obat Tradisional
- Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan
- Fasilitas Distribusi Kosmetik
- Fasilitas Distribusi Pangan Olahan

GAMBAR 10 DATA SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN



1.4 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2020

1.4.1 Isu Internal

1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, Badan POM telah diperkuat secara kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM. Namun demikian, Badan POM masih memerlukan payung hukum berupa undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan sehingga dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara *holistik*. Saat ini, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki BPOM sampai dengan tahun 2019 berjumlah 4.761 orang yang tersebar di Unit Pusat dan UPT di seluruh Indonesia. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM BPOM tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, BPOM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BPOM perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

Kekuatan jumlah pegawai Badan POM dari 3.698 orang PNS, diantaranya masih terdapat 27,85% pegawai dengan jenjang pendidikan non sarjana. Tiga unit kerja di Badan POM dengan persentase SDM yang memiliki pegawai pada jenjang pendidikan non sarjana terbesar, yaitu berturut-turut BBPOM di Bandar Lampung (47,42%), BBPOM di Medan (44,83%), dan BBPOM di Pekanbaru (43,18%).

3. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium.

Penerapan Good Laboratory Practice (GLP) memiliki konsekuensi terhadap konsistensi dan peningkatan kompetensinya untuk menerapkan “Pedoman Cara Berlaboratorium Yang Baik” dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN). Tujuan asesmen GLP yaitu untuk memastikan apakah penerapan GLP sesuai standar yang telah ditetapkan. Asesmen GLP merupakan salah satu indikator yang berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengujian dalam rangka peningkatan cakupan pengawasan. Parameter asesmen GLP meliputi pemenuhan ruang lingkup, pemenuhan kompetensi dan pemenuhan peralatan laboratorium. Pelaksanaan kegiatan berupa wawancara, pengecekan bukti fisik, dan pengamatan lapangan.

Penilaian Kemampuan Laboratorium BBPOM di Semarang secara virtual telah dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 dengan tim Penilai dari PPPOMN. Dari penilaian tersebut BBPOM di Semarang mendapatkan total nilai sebesar 75,2 diatas rata-rata capaian seluruh BB/B POM yaitu sebesar 73,1%. Kedepannya masih perlu dilakukan perencanaan pemenuhan dan intervensi yang harus dilakukan oleh Balai POM maupun unit kerja Pusat dalam hal ini PPPOMN dan Biro Perencanaan dan Keuangan.

1.4.2 Isu Eksternal

1. Lima prioritas kerja persiden 2020-2024:
 - a. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur
Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan, industri kecil, kawasan ekonomi, khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.
 - b. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Menjamin kesehatan Ibu hamil dan anak usia sekolah;
 - Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta.
 - c. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja
 - Memangkas hambatan investasi.
 - d. Reformasi Birokrasi
 - Kecepatan melayani dan memberi izin;
 - Menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman;
 - Adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.



e. APBN yang fokus dan tepat sasaran

- APBN dipatikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. RB pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek2 kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM aparatur. Kementerian PAN RB mengawal.

2. Dukungan UMKM

BBPOM di Semarang terus mendorong peningkatan daya saing UMKM di Jawa Tengah, melalui pembinaan dan pendampingan sertifikasi produk dan bantuan gratis pengujian pangan dan obat-obatan yang tidak layak konsumsi.

BBPOM di Semarang bersinergi dengan lintas sektor sesuai amanat Inpres No.3/2017 dan Permendagri No.41/2018 dalam bentuk kerjasama kolaborasi dan sinergis, berupaya membantu masyarakat pelaku usaha dalam sertifikasi dan izin edar produk, melalui Inovasi BPOM Simpatik (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Teknologi Informatika) dan inovasi Lakone Sekti (Layanan Komunikasi Efektif, Sertifikasi dan Registrasi) dengan mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha di seluruh kabupaten/kota di Jateng.

3. Penegakan hukum tindak pidana Obat dan Makanan Ilegal di Jawa Tengah

Dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menerapkan tindakan kehati-hatian terhadap kemungkinan peredaran produk obat dan makanan ilegal (tanpa izin edar) yang tidak memenuhi persyaratan keamanan maupun mutu, maka BBPOM secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pengawasan full spectrum mulai premarket hingga postmarket.

Untuk menekan peredaran obat dan makanan ilegal BBPOM Semarang memperkuat pengawasan melalui koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral di dalam bidang penegakan hukum (kejaksaan, Kepolisian, Bea & Cukai, dll), guna mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan di bidang obat dan makanan yang semakin beragam dan kompleks.

4. Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan.



Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, setiap warga berhak memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis yang diperlukan. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan agar Menteri Kesehatan menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN terutama obat esensial. Selain itu harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan, bersama pemerintah daerah, TNI/ Polri, dan swasta.

Setelah mempersiapkan pelayanan berkualitas tersebut, kita perlu meninjau seluruh aspek antara lain manajemen tata kelola, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, serta pelayanan dan pembiayaan kesehatan.

Badan POM mempunyai tugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan penetapan Kriteria Compliance untuk Pemilihan Obat JKN dan pembentukan Komite Pengkajian Hasil Pengawasan Penyedia Obat JKN. Adanya pengembangan kriteria akan disertai dengan dukungan pemerintah, “Badan POM berkomitmen untuk terus membuka dialog terkait Obat JKN, mendampingi jalannya riset dan pengembangan inovasi bioteknologi, membantu percepatan registrasi obat dengan penerapan reliance dan menghilangkan Approvable Letter yang sudah kami diskusikan, percepatan sertifikasi CPOB dan CDOB khususnya untuk di daerah terpencil”. (Penny Lukito, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/15813/Perkuatan-Pengawasan-Obat-melalui-Sounding-Kriteria-Penilaian-Penyedia-Obat-JKN-.html>, 23 April 2019).

BBPOM di Semarang berupaya mendampingi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing, kepercayaan Industri Farmasi (*principal*), kepercayaan Regulator, kepercayaan dari Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit dan Klinik), serta mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka perlindungan masyarakat.

5. Tingginya minat masyarakat pada transaksi online dan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur *e-commerce* sehingga konsumen berada pada posisi lemah.

Teknologi informasi mengalami kemajuan sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini dan telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Media Internet sebagai bagian dari teknologi informasi telah menunjukkan peranannya dalam berbagai aspek



kehidupan termasuk sebagai sarana untuk melakukan transaksi bisnis. *E-commerce* merupakan bisnis modern yang mengubah cara transaksi konvensional/tradisional menjadi transaksi dengan karakteristik *non face, non sign, paperless dan borderless*. Dari sisi transaksi, hendaknya konsumen diberi kesempatan untuk mengkaji ulang transaksi yang akan dilakukan, informasi mengenai dapat tidaknya barang dikembalikan serta mekanismenya, jangka waktu pengajuan klaim yang wajar serta mekanisme penyelesaian sengketa. Perdagangan melalui transaksi *e-commerce* memiliki keunggulan tersendiri, oleh karena itu Pemerintah hendaknya segera melengkapi undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*, agar konsumen dan pelaku usaha mempunyai posisi tawar yang seimbang. Untuk memperkuat posisi tawar konsumen, maka negara memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, melakukan intervensi dengan cara membuat perumusan legislasi menyangkut transaksi *e-commerce* lintas negara, untuk menjamui adanya kepastian hukum dalam melakukan transaksi.

Kurangnya kesadaran konsumen dalam memastikan produk yang aman dengan membaca keterangan pada label serta rendahnya pengetahuan konsumen terkait izin edar menyebabkan pelaku usaha cenderung mengabaikan ketentuan izin edar dalam memperdagangkan produknya terlebih yang diedarkan secara online. Hal ini dapat dilihat dari intensitas konsumen membaca keterangan yang tercantum pada label produk serta keterangan yang menjadi perhatian konsumen saat membeli produk online. Aturan tentang izin edar obat, bahan pangan, dan makanan tertulis dalam berbagai perundangan yang berlaku. Aturan mengenai izin edar yang bersumber dari Peraturan Pemerintah adalah:

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Sementara itu, aturan terkait yang bersumber dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (PKBPOM) yaitu:

- Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
- Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, Dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan.
- Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Ada pun aturan perundang-undangan yang mendukung Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepala BPOM terkait izin edar yaitu:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengaturan Keamanan Makanan dan Minuman.

Semua aktivitas yang berkaitan dengan pengesahan izin edar untuk segala produk dan bahan pangan, minuman, obat tradisional, kosmetik hingga alat kesehatan hendaknya mengacu pada semua hukum perundangan tertulis yang berlaku. Hal ini demi mengurangi terjadinya kesalah pahaman dan penyelewengan dari berbagai pihak.

6. Pandemi Covid 19 di Jawa Tengah

Perkembangan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Jawa Tengah per harinya mengalami kenaikan yang signifikan. Data yang diperoleh dari website resmi perkembangan virus Covid-19 pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan sampai pada tanggal 11 Februari 2020 jumlah akumulasi kasus terkonfirmasi virus Covid-19 di Jawa tengah telah mencapai 986 kasus. Sejalan dengan semakin tingginya jumlah akumulasi kasus positif, kasus konfirmasi positif perharinya juga terus mengalami kenaikan.

Dampak Pandemi Covid 19 di berbagai sektor:

a. Dampak Terhadap Sektor Perindustrian

Pelaku usaha menyambut baik sejumlah kebijakan strategis yang telah dijalankan oleh Kementerian Perindustrian dalam mendukung aktivitas sektor industri sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah masa pandemi Covid-19. Bahkan, sebagai pembina industri, Kemenperin dinilai telah mengusulkan berbagai stimulus untuk kembali menggairahkan iklim usaha di Tanah Air.



Dengan adanya dukungan dari Kemenperin dan kementerian/lembaga terkait lainnya, sektor industri farmasi dapat terus beroperasi dan berproduksi. Bahkan, kinerjanya mampu positif di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Pada triwulan I tahun 2020, industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh paling gemilang sebesar 5,59 persen.

Distribusi produk, khususnya ke daerah-daerah yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat terus didukung oleh pemerintah sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Pemberian IOMKI yang dilakukan Kemenperin merupakan langkah positif dan mampu membantu operasional sektor industri farmasi di tengah wabah Covid-19 sehingga dapat beroperasi untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dalam rangka penanganan Covid-19. Operasional di sektor farmasi juga tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. (Dorodjatun Sanusi, 2020).

Industri makanan dan minuman, industri farmasi dan fitofarmaka, serta industri alat kesehatan bertahan saat pandemik COVID-19 di Indonesia. Industri yang memiliki demand (permintaan) tinggi yang biasa memperkuat neraca perdagangan diantaranya industri makanan dan minuman, industri farmasi dan fitofarmaka, industri pelindung diri, alat kesehatan, etanol, masker dan sarung tangan. (Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Muhammad Khayam, republika.co.id, 5 mei 2020).

b. Perekonomian Jawa Tengah Menurun

Sejauh ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng telah mengidentifikasi 11 sektor mulai dari industri, pariwisata, hingga investasi yang terdampak covid-19. Sektor pariwisata misalnya terpuak karena adanya pembatalan maskapai penerbangan maupun pembatasan kunjungan bagi penumpang dari sejumlah negara.

Selain itu, Pemprov Jateng juga mendata terjadinya penurunan volume ekspor perikanan sekitar 50%, terutama ke negara China pada periode Januari-Februari 2020 sebesar 34%. Dibandingkan Januari yang tercatat 1.060 ton bakal merosot menjadi 696 Ton pada bulan Februari. Ekonom Undip Wahyu Widodo mengatakan jika wabah covid-19 terus berlangsung sampai Mei 2020, maka ada kemungkinan target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan terkoreksi. Jawa Tengah, telah menunjukkan kinerja yang baik, ketika pertumbuhan ekonomi nasional jatuh ke 5,02 persen pada 2019, Jateng justru tumbuh 5,41 persen. Kunci utamanya jangan terjadi panic buying. (www.solopos.com, 23 maret 2020).

c. Peluang dan Dampak Terhadap Sektor Pertanian atas Klaim Tanaman Obat Herbal



Tanaman herbal seperti jahe, kunyit, temulawak laris manis diburu konsumen saat pandemi corona. Startup pertanian mencatatkan peningkatan permintaan tanaman herbal, begitu juga pendapatan petani. Penjualan tanaman herbal di secara online melonjak selama pandemi Covid-19. Konsumen memburu produk yang dinilai dapat meningkatkan daya tahan tubuh, seperti empon-empon. Lonjakan permintaan utamanya terjadi ketika virus corona pertama kali muncul di Indonesia.

Dari melonjaknya permintaan tanaman herbal tersebut muncul klaim-klaim atas obat herbal yang diyakini bisa mencegah atau bahkan mengobati Covid-19. Apalagi Jawa Tengah sebagian besar wilayahnya merupakan sentra empon-empon dan masyarakatnya sudah secara turun temurun mengkonsumsinya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, setidaknya ada empat poin utama penyebab maraknya bermunculan klaim obat Covid-19 di Tanah Air sehingga meresahkan masyarakat. Pertama, hal itu terjadi karena buruknya politik manajemen penanganan wabah oleh pemerintah sejak awal. Kedua, kurangnya literasi kepada masyarakat terkait produk obat-obatan selama pandemi terjadi. Ketiga yang mengakibatkan maraknya klaim obat bermunculan untuk penyembuhan Covid-19 berkaitan dengan aspek psikologis konsumen. Terakhir karena lemahnya atau kurang optimalnya penanganan aspek hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM, Mayagustina Andarini menjelaskan obat untuk Covid-19 saat ini masih dilakukan penelitian dan uji klinis. Hal ini berarti, ketika ada obat yang beredar masih belum teruji keamanannya kepada manusia. Indonesia memang memiliki berbagai macam obat herbal dan ramuan empiris. Berbagai ramuan yang berupa jamu seperti beras kencur, temulawak, sambiloto dan kunir asem memang sudah terjamin kesehatannya karena telah dikonsumsi secara turun temurun.

Namun, akan sangat berbeda dengan obat Covid-19. Penyakit ini baru saja muncul pada awal 2020. Tentunya, ramuan dari nenek moyang masyarakat Indonesia tidak ada yang menjamin dapat menyembuhkan penyakit Covid-19.

Peran BBPOM di Semarang sebagai salah satu UPT Badan POM di masa pandemi ini sangat vital dalam pengawasan produk obat dan herbal di wilayah Jawa Tengah yang banyak diakui bisa mengatasi virus corona. BBPOM di Semarang. BBPOM di Semarang menjalankan fungsinya dalam membina dan mendampingi proses penelitian serta mengedukasi ke masyarakat tentang pentingnya pemahaman obat atau herbal tersebut sudah terdaftar secara spesifik dan memiliki indikasi untuk menyembuhkan korona atau tidak.



4) Tingginya harapan masyarakat terhadap pengawalan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin Covid-19.

Pengawalan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin COVID-19 sebelum dan sesudah di peredaran. Badan POM bertugas memberikan jaminan obat, termasuk di dalamnya produk biologi dan vaksin aman, memberikan manfaat/efikasi serta bermutu. Peran Badan POM dimulai dari sebelum diberikannya persetujuan izin edar atau pemberian persetujuan penggunaan saat kondisi kedaruratan atau Emergency Use Authorization/EUA, hingga setelah mendapatkan EUA dan didistribusikan ke masyarakat. Setelah Vaksin tiba di Jawa Tengah diharapkan instansi yang berwenang melakukan pengawalan mutu dan keamanan terhadap distribusi vaksin Covid-19 ke sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah Jawa Tengah yaitu gudang farmasi dan Puskesmas. BBPOM di Semarang juga berinisiatif memberikan Bimbingan Teknis Pengelolaan Vaksin Covid-19 sebagai persiapan untuk menjaga mutu dan keamanan Vaksin Covid-19 sampai akhirnya nanti diberikan kepada masyarakat.

1.4.3 Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi BBPOM di Semarang kedepan yaitu:

- 1) Masih maraknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri di Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Semarang dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
- 2) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium BBPOM di Semarang yang cepat dan akurat.
- 3) Masih banyaknya penduduk Jawa Tengah yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Semarang untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk *farmakovigilans*.
- 4) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat Jawa Tengah banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- 5) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM di Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*streetfoods*),
- 7) Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, *total fertility rate (TFR)*, *contraceptive prevalence rate (CPR)*, *unmet need* dan *age fertility specific rate (ASFR)*, perubahan

komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Semarang untuk melakukan pengawasan *post-market* di Provinsi Jawa Tengah.

- 8) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Bergamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi BBPOM di Semarang dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet di Provinsi Jawa Tengah.
- 9) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 10) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BBPOM di Semarang untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.
- 11) Dampak Pandemi terhadap peredaran obat dan makanan dan tugas pengawasan BPOM



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

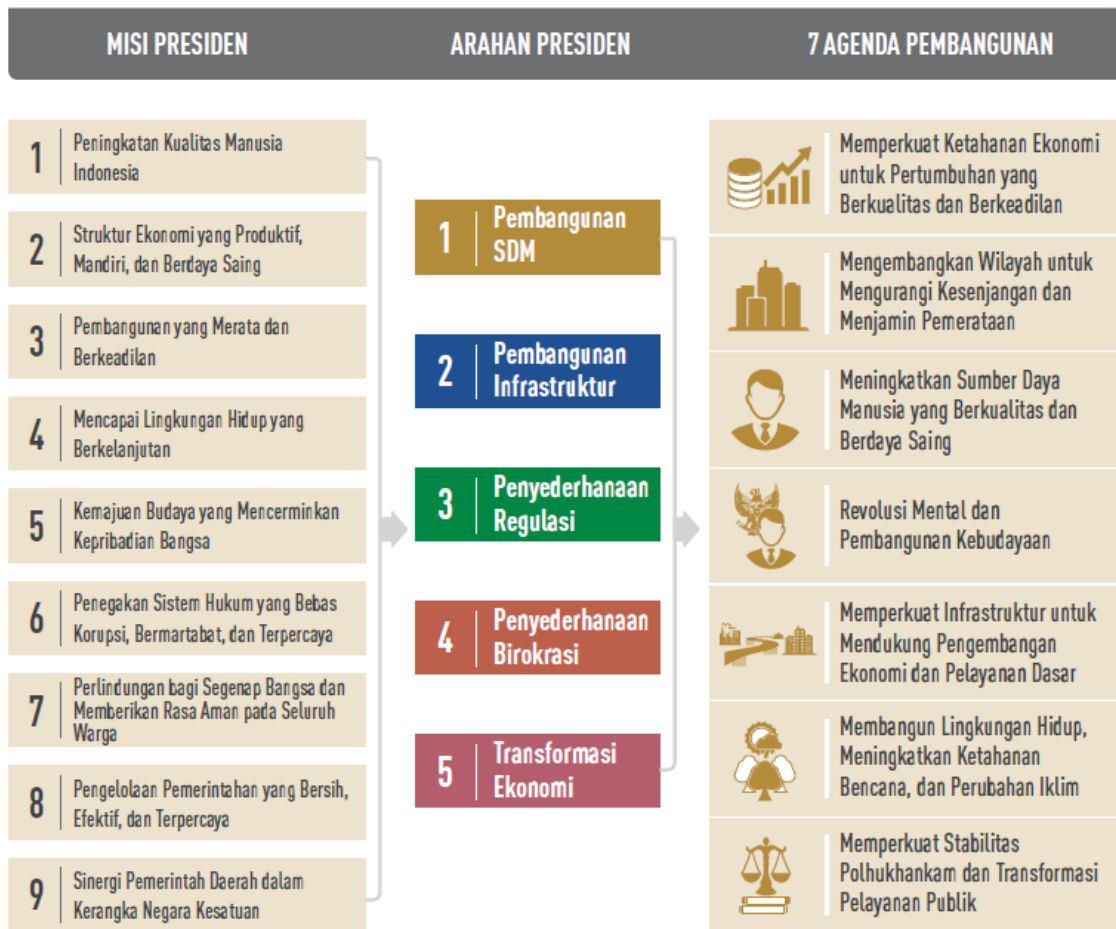
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Dalam rangka melaksanakan RPJMN 2020-2024 tersebut, maka Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

VISI

”

*Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong*

”

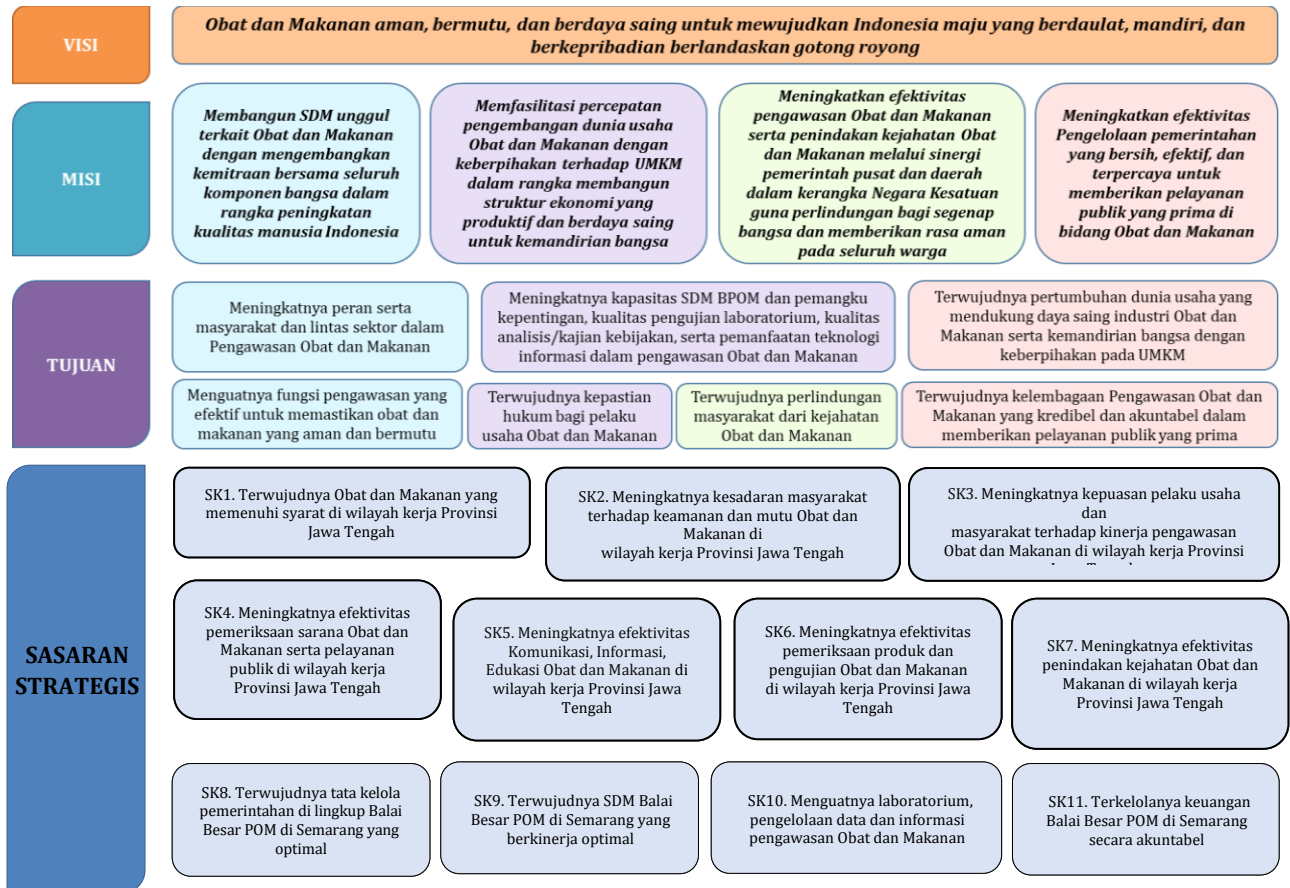


GAMBAR 11 VISI, MISI, ARAHAN PRESIDEN, DAN AGENDA PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024

RPJMN 2020-2024 merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM menyusun Revisi Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya. Revisi Renstra BBPOM di Semarang 2020-2024 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BBPOM di Semarang Nomor PR.01.02.104.05.20.1040 Tanggal 20 Mei 2020.

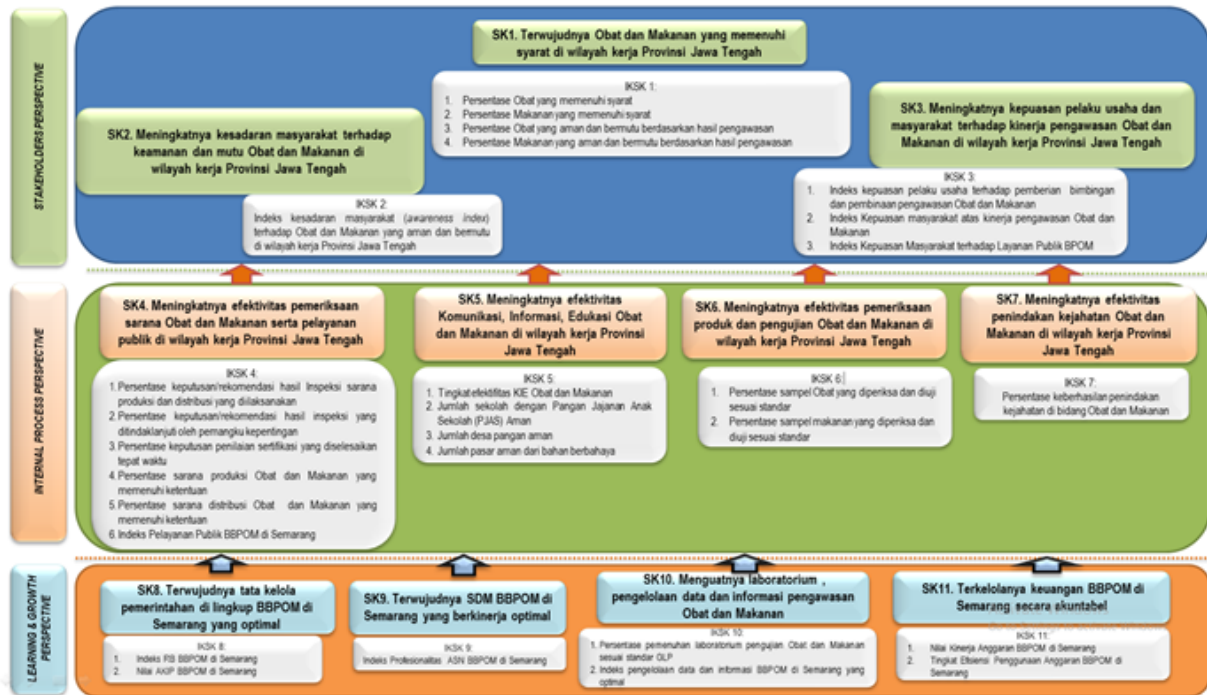
Visi dan Misi BBPOM di Semarang ditetapkan berdasarkan Visi dan Misi Badan POM dengan memperhatikan latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis. Pernyataan visi dan misi tersebut diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.





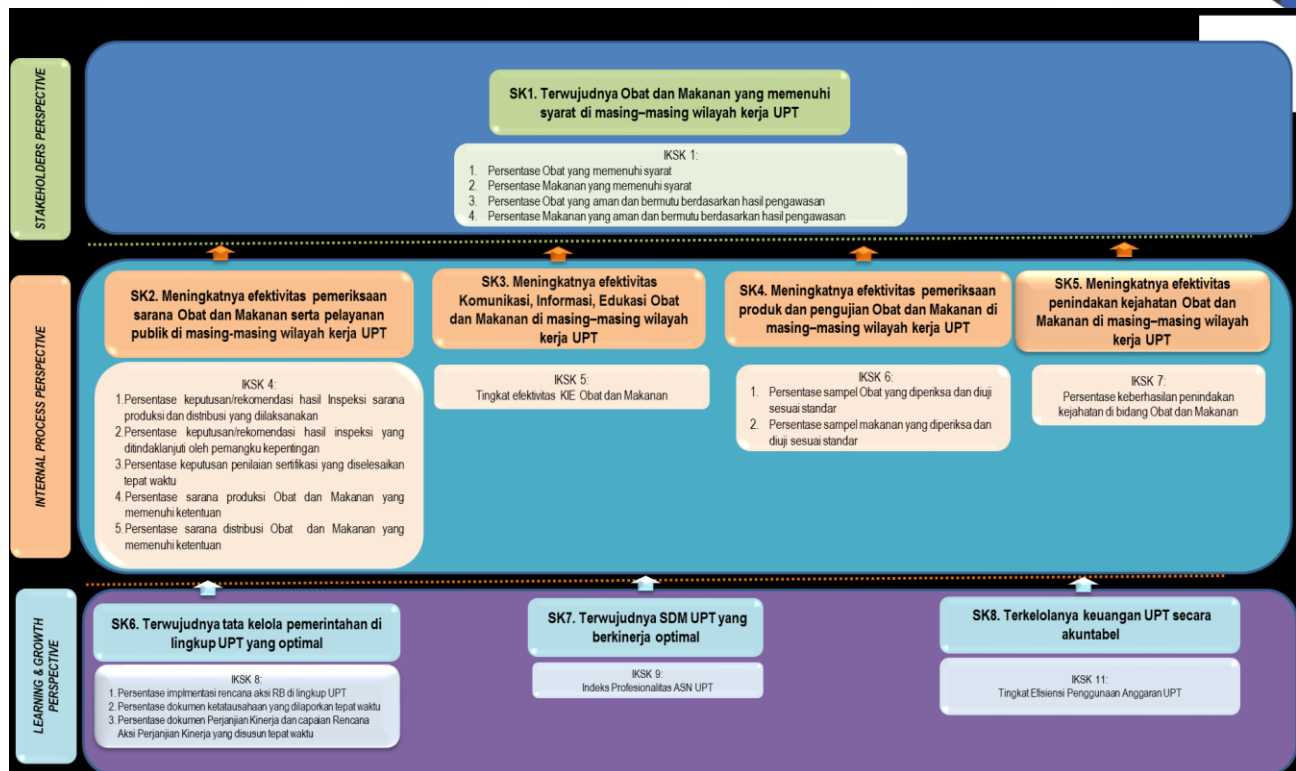
GAMBAR 12 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Semarang Periode 2020-2024

Sasaran strategis BBPOM di Semarang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BBPOM di Semarang dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II BBPOM di Semarang sebagai berikut:



GAMBAR 13 PETA STRATEGI LEVEL II BBPOM DI SEMARANG

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM), bahwa BBPOM di Semarang merupakan koordinator atas Loka POM di Banyumas dan Loka POM di Surakarta. Peta Strategi Loka POM di Banyumas dan Loka POM di Surakarta sebagai berikut :



GAMBAR 14 PETA STRATEGI BSC LOKA POM (2020-2024)

Stakeholder Perspective

SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Komoditas/produk yang diawasi Badan POM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik dari hulu sampai hilir. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan produk sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat,

dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan *farmakovigilan*, serta pengawasan label/ penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan UPT Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ke-empat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat disertai dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang professional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. **Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target sebesar 92,3% pada akhir tahun 2024.**
- b. **Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target sebesar 86% pada akhir tahun 2024**
- c. **Persentase Obat yang aman berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 90% pada akhir tahun 2024 .**
- d. **Persentase Makanan yang aman berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 77% pada akhir tahun 2024.**



SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan program multisektoral terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha harus dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, Badan POM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus ditingkatkan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Semarang melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja BBPOM di Semarang, dengan target 84 pada tahun 2024.**

SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Semarang

Badan POM merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi dan peran sebagai organisasi publik nonprofit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam pemberian layanan publik kepada masyarakat, Badan POM telah melaksanakannya sesuai

dengan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM yaitu Peraturan Kepala Badan POM Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Sebagai tuntutan dari krusialnya isu obat dan makanan, Badan POM telah didukung dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang kemudian diikuti oleh Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 yang menjadi titik utama penguatan Badan POM, yang antara lain berdampak pada perubahan Organisasi dan Tata Kelola, termasuk di dalamnya perubahan nomenklatur dan fungsi-fungsi unit kerja yang melakukan pelayanan publik. Guna menyesuaikan dengan perkembangan organisasi terkini maka telah diterbitkan pula Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu sasaran Reformasi Birokrasi adalah Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Dalam rangka mencapai keberhasilan Reformasi Birokrasi telah ditetapkan berbagai program sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015 s/d 2019 yang mencakup Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indikator ukuran keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah, dengan target sebesar 89 di tahun 2024.**
- b. **Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah, dengan target sebesar 82 di tahun 2024.**
- c. **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang, dengan target sebesar 92 di tahun 2024.**

Internal Process Perspective

SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Semarang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi



standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Semarang mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Semarang, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Semarang mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM di Semarang perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 95% pada akhir tahun 2024.**
- b. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di BBPOM di Semarang, dengan target 90% pada akhir tahun 2024.**
- c. **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di BBPOM di Semarang dengan target 97% pada akhir tahun 2024.**
- d. **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 67% pada akhir tahun 2024.**
- e. **Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dengan target 65% pada akhir tahun 2024**
- f. **Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang dengan target nilai 4,51 (Pelayanan Prima) pada akhir tahun 2024.**

SK5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang

Menyadari keterbatasan Badan POM, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh Badan POM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini Badan POM harus jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan

melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. **Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif di BBPOM di Semarang, dengan target 91.26% pada akhir tahun 2024.**
- b. **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target sebesar 103 sekolah pada tahun 2024.**
- c. **Jumlah desa pangan aman, dengan target sebesar 47 desa pada tahun 2024.**
- d. **Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 28 pasar pada tahun 2024.**

SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan *range* yang sangat luas.

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk tersebut cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :



- a. **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 94% pada akhir tahun 2024.**
- b. **Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard dengan target 92% pada akhir tahun 2024**

SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BBPOM di Semarang menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM di Semarang melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja **Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 80 pada akhir tahun 2024.**

Learning and Growth Perspective

SK8. Terwujudnya organisasi BBPOM di Semarang yang efektif

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BBPOM di Semarang berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik terus meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan POM. Pada tahun 2020-2024, Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Badan POM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BBPOM di Semarang untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. **Indeks RB BBPOM di Semarang dengan target 95 pada akhir 2024**
- b. **Nilai AKIP BBPOM di Semarang dengan target 92 pada akhir 2024**

SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari



tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah **Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang dengan target sebesar 85 di tahun 2024.**

SK10. Menguatnya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawas Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan Obat dan Makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BBPOM di Semarang di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, Badan POM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BBPOM di Semarang. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

- a. **Persentase pemenuhan terhadap standar GLP oleh Lab pengujian BBPOM di Semarang dengan target 86 pada akhir 2024.**
- b. **Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal dengan target 3 pada akhir 2024.**

SK11. Terkelolanya keuangan BBPOM di Semarang secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BBPOM di Semarang dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah SK 12, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- a. **Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang dengan target nilai sebesar 97 pada akhir 2024**

- b. **Tingkat Efektivitas Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang dengan target 94% (Efisien) pada akhir 2024**

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang dicanangkan dalam Renstra 2020-2024 telah disusun RKT Tahun 2020 dan PK Tahun 2020 sebagaimana Lampiran 4.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Semarang sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BBPOM di Semarang) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Sasaran kegiatan, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai pada tahun 2020 ditetapkan dalam dokumen RKT dan PK Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 2 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah BBPOM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah BBPOM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah BBPOM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang	88
INTERNAL PERSPECTIVE			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah BBPOM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77.6
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	3.51
		5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah BBPOM di Semarang
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16		
Jumlah desa pangan aman	6		
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah BBPOM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah BBPOM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE			
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Semarang	91
		Nilai AKIP BBPOM di Semarang	81
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	1.51
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	Efisien (90%)

2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Berdasarkan RKT dan PK Tahun 2020 disusun RAPK Tahun 2020 dengan menetapkan target yang akan dicapai pada setiap interim/ triwulan serta anggaran yang dialokasikan sebagaimana Lampiran 5

Target per interim dan kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan BBPOM di Semarang periode 2020 adalah sebagai berikut :

TABEL 3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	Rp369.556.700



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	yang memenuhi syarat di Wilayah BBPOM di Semarang	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78	78	78	Rp162.112.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	Rp369.556.700
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	73	73	Rp162.112.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah BBPOM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	72	Rp7.214.799.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah BBPOM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	82	Rp185.480.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	71	Rp12.255.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang	0	0	0	88	Rp 7.280.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	Rp 348.239.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77.6	77.6	77.6	77.6	Rp132.252.000



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	BBPOM di Semarang	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	Rp 14.180.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	46	46	46	Rp 412.360.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	Rp 421.764.000
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	-	-	-	3.51	Rp 586.223.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah BBPOM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	84.31	84.31	84.31	Rp 267.905.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20%	20%	60%	16	Rp 295.000.000
		Jumlah desa pangan aman	33%	50%	67%	6	Rp 763.017.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	33%	33%	65%	3	Rp 142.440.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah BBPOM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	88	90	91	92	Rp 369.556.600
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	87	88	90	Rp 162.112.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah BBPOM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	30	50	70	Rp 853.008.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Semarang	Indeks RB BBPOM di Semarang	0	0	0	81	Rp 272.003.000
		Nilai AKIP BBPOM di Semarang	0	0	0	81	Rp 1.469.498.000



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	Semarang yang optimal						
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	0	0	0	77	Rp 391.838.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	82	Rp 2.771.125.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	0	1.51	1.51	1.51	Rp 300.000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	88	90	92	94	Rp 30.576.917.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Rp 40.930.000

2.4 Metode Pengukuran dan Kriteria Pencapaian

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja organisasi dari setiap pernyataan kinerja **diukur dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.**







Capaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah capaian kinerja secara mandiri terhadap kinerja BBPOM di Semarang, guna memberikan gambaran efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk pengukuran kinerja dengan indikator kinerja lebih dari satu, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) diukur dengan pembobotan masing-masing indikator, yang ditentukan berdasarkan kontribusi indikator tersebut dalam pencapaian sasaran. Sasaran yang hanya memiliki satu indikator, pencapaian NPS diukur dengan faktor pengali pembobotan satu sehingga nilainya tetap sama dengan persentase pencapaian indikator kinerja sasaran.

Pada evaluasi/ laporan kinerja ini, pencapaian suatu indikator ditetapkan dengan kriteria penilaian sebagai berikut :



TABEL 4 KRITERIA PENILAIAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

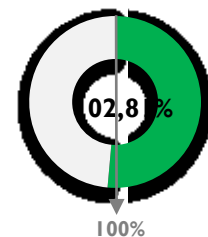
4.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Profil Capaian Sasaran BBPOM di Semarang Tahun 2020

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara realisasi dicapai dengan target untuk setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam PK BBPOM di Semarang Tahun 2020. Hasil pengukuran capaian IKU selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja untuk masing-masing sasaran strategis, sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) sasaran kegiatan (SK), yaitu : SK1,SK2, SK3,SK4, SK5, SK 6, SK7, SK8, SK 10, dan SK 11 dalam kategori **BAIK**;
- 1 (satu) sasaran kegiatan, yaitu : SK9 dalam kategori **SANGAT BAIK**; serta
- Capaian sasaran strategis *Stakeholder Perspective* 98,91%, *Internal Process Perspective* 105,64%, dan *Learning & Growth Perspective* 103,88%; yang ketiganya tercapai dalam kategori **BAIK**; sehingga diperoleh :
- **Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)** total tahun 2020 adalah sebesar **102,81%**, dengan kriteria **BAIK**, secara rinci dapat dilihat pada tabel 5



Berdasarkan nilai NPS, maka **Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2020 adalah akuntable dan berhasil mencapai sasaran dengan kriteria BAIK.**

Tahun 2020 merupakan tahun pertama periode Renstra 2020-2024, sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra 2020-2024 berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga NPS Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan NPS tahun 2019.

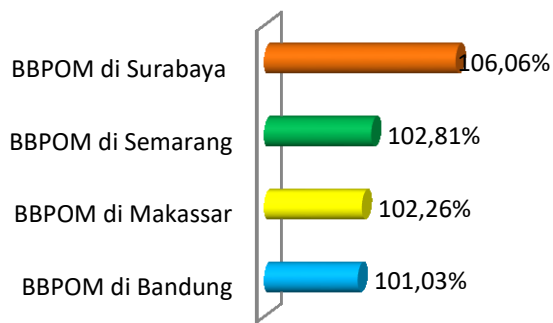
3.1.2 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) BBPOM Klaster 1

Berdasarkan pembagian klaster, BBPOM di Semarang masuk dalam klaster 1 yang terdiri dari: BBPOM di Bandung, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Semarang, dan BBPOM di Makassar. Pencapaian NPS BBPOM Klaster 1 dapat dilihat pada tabel 5, dan nilai capaian kinerja selengkapnya untuk tiap indikator dapat dilihat pada Lampiran 6.

TABEL 5 NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) BBPOM DI SEMARANG DAN BBPOM KLASTER 1 TAHUN 2020

Sasaran Strategis		NPS			
		Semarang	Bandung	Makasar	Surabaya
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	95,95% Baik	104,22% Baik	105,48% Baik	110,06% Sangat Baik
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	99,88% Baik	93,54% Baik	103,19% Baik	100,32% Baik
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	100,89% Baik	104,24% Baik	103,80% Baik	102,49% Baik
CAPAIAN PERSPECTIVE STAKEHOLDER		98,91% Baik	100,67% Baik	104,16% Baik	104,29% Baik
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang	106,89% Baik	104,65% Baik	101,55% Baik	102,77% Baik
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	103,77% Baik	100,94% Baik	102,13% Baik	101,28% Baik
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	109,91% Baik	108,76% Baik	116,01% Sangat Baik	119,08% Sangat Baik
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	101,99% Baik	84,23% Cukup	120,00% Tidak dapat disimpulkan	109,05% Baik
CAPAIAN INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE		105,64% Baik	99,65% Baik	109,92% Baik	108,05% Baik
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	94,41% Baik	93,76% Baik	77,38% Cukup	94,61% Baik
SK 9	Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	111,13% Sangat Baik	104,77% Baik	97,99% Baik	113,45% Sangat Baik
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	105,86% Baik	107,04% Baik	88,51% Cukup	107,57% Baik
SK 11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	104,10% Baik	105,50% Baik	106,86% Baik	107,68% Baik
CAPAIAN LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE		103,88% Baik	102,77% Baik	92,69% Baik	105,83% Baik
NPS Total		102,81% Baik	101,03% Baik	102,26% Baik	106,06% Baik





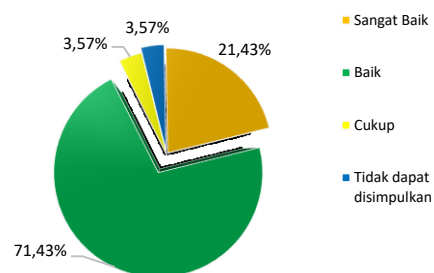
NPS Total untuk BBPOM Klaster 1 Tahun 2020, sebagaimana grafik di samping. BBPOM di Semarang berada pada urutan kedua setelah BBPOM di Surabaya. Analisa, perbandingan, faktor keberhasilan, serta kendala dibahas secara rinci untuk tiap capaian indikator kinerja pada Bab ini di bagian 3.1.4.

GAMBAR 15 NPS TOTAL BBPOM KLASTER 1 TAHUN 2020

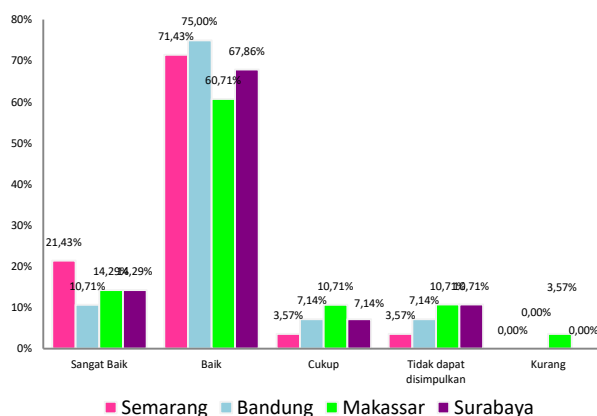
3.1.3 Indikator Kinerja Utama Sasaran BBPOM Di Semarang

Profil capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) utama tahun 2020 sebagian besar tercapai dengan kriteria baik, sebagai berikut :

- 6 (enam) IKK, yaitu : IKK 4.3, IKK 4.6, IKK 5.2, IKK 6.2, IKK 9.1, dan IKK 11.2; **21,43%** tercapai dengan kriteria **SANGAT BAIK**;
- 20 (dua puluh) IKK, yaitu : IKK 1.1, IKK 1.2, IKK 1.4, IKK 2.1, IKK 3.1, IKK 3.2, IKK 3.3, IKK 4.1, IKK 4.2, IKK 4.4, IKK 4.5, IKK 5.1, IKK 5.3, IKK 5.4, IKK 6.1, IKK 7.1, IKK 8.1, 8.2, 10.1, dan SK 11.1; **71,43%** tercapai dengan kriteria **BAIK**;
- 1 (satu) IKK, yaitu IKK 1.3; **3,57%** tercapai dengan kriteria **CUKUP**,
- 1 (satu) IKK, yaitu : IKK 10.2; **3,57%** tercapai dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**



Hasil pengukurannya secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 6



Jika dibandingkan dengan balai seklaster, maka urutan BBPOM di Semarang :

Teratas untuk capaian IKK dengan kriteria **SANGAT BAIK** ①

Kedua, setelah BBPOM di Bandung, untuk IKK dengan kriteria **BAIK**

Paling sedikit untuk IKK dengan kriteria **CUKUP** dan **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN** ①

GAMBAR 16 GRAFIK PERBANDINGAN BALAI SEKLASTER BERDASARKAN KRITERIA NPS

Analisa, perbandingan, faktor keberhasilan serta kendala tiap capaian indikator kinerja dibahas secara rinci pada Bab ini di bagian 3.1.4.

3.1.4 Analisis Capaian Kinerja

CAPAIAN STAKEHOLDER PERSPECTIVE



Terwujudnya Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat Di Wilayah Kerja BBPOM Di Semarang

Pencapaian Sasaran Kegiatan pertama pada Tahun 2020 diukur dengan **4 (empat) indikator kinerja**, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 6 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN PERTAMA

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IKK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00%	84,62%	94,02%	Baik
IKK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	74,34%	95,31%	Baik
IKK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00%	78,45%	88,15%	Cukup
IKK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	77,58%	106,27%	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1				95,95%	Baik

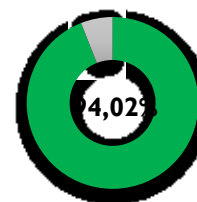
Sumber : Penetapan Kinerja BBPOM Semarang Tahun 2020 dan Laporan Triwulan IV 2020

NPS SK 1 **sebesar 95,95%**, menggambarkan bahwa BBPOM di Semarang mampu Mewujudkan Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerjanya dengan kategori **BAIK**.

IKK 1.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Semarang

- Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Realisasi capaian indikator kinerja obat yang memenuhi syarat (MS) sebesar 84,62% jika dibanding dengan target 90%, maka diperoleh **capaian 94,02%** dengan kategori **BAIK**. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional (OT), suplemen kesehatan (SK), dan kosmetik.



- Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 maupun sebelumnya, karena memiliki definisi operasional yang sedikit berbeda. Untuk tahun 2019 diukur untuk masing-masing komoditi obat, OT, SK, dan kosmetika; serta digabungkan antara sampel *targeted* dengan random/ acak; sedangkan tahun 2020 adalah sebaliknya (digabungkan untuk komoditi, namun dipisahkan antara sampel *targeted* dengan random/ acak).



Dibandingkan terhadap target tahun 2021 sebesar 90,5%; maka BBPOM di Semarang harus menaikkan persentase obat MS lebih tinggi dari yang direncanakan, yaitu sebanyak 5,88%. Diperlukan kerja keras untuk mencapai kinerja yang diharapkan, atau dilakukan penyesuaian target tahun 2021 untuk pencapaian yang optimal.

- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklastr**



GAMBAR 17 CAPAIAN IKK 1.1 DARI KELOMPOK BPOM KLASER 1

Capaian IKK ini, jika dibandingkan dengan 3 (tiga) balai seklastr maka BBPOM di Semarang paling rendah, terlihat dari grafik di samping. Akan tetapi realisasi capaiannya (84,52%) masih di atas target nasional sebesar 80,8%.

Analisa terhadap hasil perbandingan dan kemungkinan penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan target

Target BBPOM di Semarang (90,0%) paling tinggi dibanding dengan balai seklastr, yaitu BBPOM di Surabaya (80,8%), BBPOM di Makasar (80,8%), BBPOM di Bandung (80,8%); serta di atas target nasional (80,8%).

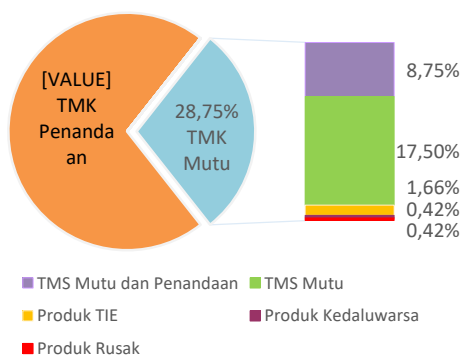
Berdasarkan kondisi masih banyaknya produk OT tidak memenuhi syarat (TMS), maka penetapan target tahun 2020 sedikit besar, namun hampir mendekati *riil* obat MS yang beredar di Jawa Tengah. Sehingga capaian indikator ini dalam kategori **Baik** walaupun di bawah balai seklastr.

TABEL 7 PROFIL MS DAN TMS HASIL SAMPLING OBAT SECARA ACAK TAHUN 2020

Produk	Jumlah Sampling	Kesimpulan		
		MS	TMS	%TMS
Obat	446	365	81	18,16%
Kosmetik	664	622	42	6,75%
SK	124	105	19	15,3%
OT	307	209	98	31,92%
Jumlah	1541	1301	240	15,57%

2. Kondisi peredaran produk obat di Jawa Tengah berbeda dengan provinsi lain. Persentase obat yang MS di wilayah pengawasan BBPOM di Semarang sangat dipengaruhi oleh tingginya prosentase produk OT yang TMS. Dari tabel di samping

terlihat bahwa dari 240 sampel TMS sebesar **98 (31,92%)** merupakan **produk OT**. Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai sentra OT, sehingga tingginya sarana distribusi dan produksi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) secara tidak langsung berdampak pada tingginya presentase produk OT TMS. Sarana distribusi OT TMK sebesar 53,74% paling tinggi jika dibandingkan dengan sarana komoditi lainnya (lihat pada pembahasan IKK 4.4). Sarana produksi Usaha Kecil OT (UKOT) dan Usaha Mikro OT (UMOT) TMK mencapai 48,15% (lihat pada pembahasan IKK 4.5).



GAMBAR 18 DIAGRAM KONDISI PEREDARAN PRODUK OBAT DI JAWA TENGAH

Produk yang beredar di Jawa Tengah lebih banyak yang TMK penandaan jika dibandingkan dengan provinsi seklaster. Dari 240 sampel yang TMS, jumlah produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu hanya 28,75% (TMS mutu dan penandaan 8,75%; TMS mutu 17,50%; produk TIE 1,66%; produk kedaluwarsa 0,42%; dan produk rusak 0,42%, lebih sedikit jika dibandingkan dengan TMK penandaan yang mencapai 71,25%.

3. BBPOM di Semarang menemukan sampel TMS dari sampling acak lebih banyak jika dibandingkan balai seklaster.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Berdasarkan sampling secara acak/ random, persentase obat beredar di Provinsi Jawa Tengah yang MS sebesar 84,43%, dan BBPOM di Semarang dinyatakan berhasil mencapai target dengan **kriteria Baik** (93,81%). Capaian tersebut tidak terlepas dari faktor pendukung, antara lain :

1. Adanya peningkatan komitmen dan kepatuhan pelaku usaha untuk memproduksi dan mengedarkan obat yang aman dan bermutu serta sesuai dengan ketentuan;
2. Tindak lanjut hasil pengawasan BBPOM di Semarang kepada sarana distribusi dan produksi memberi dampak positif terhadap pelaku usaha untuk senantiasa melakukan perbaikan dan *continuous improvement* dalam menjalankan kegiatannya;
3. Bimbingan teknis/ sosialisasi/ workshop kepada masyarakat dan pelaku usaha meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memilih produk yang aman maupun kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan cara produksi/ distribusi yang baik.
4. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman prioritas sampling dan peraturan yang terkait.

Meski demikian, masih ditemukan obat yang TMS (15,57%) di Jawa Tengah walaupun sebagian besar berupa TMK penandaan (71,25%), dan TMS mutu hanya 28,75%. Faktor penyebabnya, antara lain :

1. Masih adanya produsen yang kurang patuh dalam menerapkan dan/ atau kurang memahami peraturan terkait penandaan produk.
2. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik. Sebagai contoh : 23 sampel OT (sebagian besar berupa sediaan kapsul berisi serbuk) memberikan hasil uji TMS dengan parameter mikrobiologi. Aspek yang mungkin berpengaruh adalah kurangnya sanitasi dan hygiene dalam proses



produksi/ distribusi maupun penyimpanan, proses pemilihan bahan baku yang kurang baik, dan atau penetapan masa edar yang kurang tepat.

Adanya obat TMS di wilayah Jawa Tengah, menjadi faktor pendorong bagi BBPOM di Semarang untuk terus berupaya secara bertahap meminimalisasirnya.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja persentase obat MS di tahun mendatang, adalah :

1. Pembinaan kepada pelaku usaha dalam mengimplementasi Cara Distribusi / Produksi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik. Selama masa pandemi Covid19 pembinaan ke sarana distribusi/ produksi tetap dilakukan menggunakan metode daring.
2. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan terhadap sarana produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan.
3. Melaksanakan KIE tentang obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memilih produk yang berkualitas.
4. Menyelenggarakan pendampingan, pembinaan, dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPOTB Bertahap, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran Obat Tradisional untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
5. Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001: 2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen pengawasan, salah satunya dengan verifikasi Metode Analisa yang baru yang telah ditetapkan oleh P3OMN dan disesuaikan dengan tren produk beredar.
6. *Review* terhadap target tahun 2021-2024. Penetapan kembali target yang lebih *reasonable*, sesuai dengan kondisi peredaran obat di Jawa Tengah, sehingga dapat meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu :

1. Sampling acak sesuai dengan pedoman dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pengujian yang didukung dengan kapasitas laboratorium yang memadai.

- **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

Capaian persentase obat, OT, SK, dan kosmetika yang MS tahun 2019 dalam kategori baik maupun tidak dapat disimpulkan (>120%), sehingga tidak ada rekomendasi. Pada analisa keberhasilannya, pembinaan kepada pelaku usaha (terutama produsen OT) tidak ada

pembahasan terkait penandaan. Mengingat jumlah TMK penandaan yang banyak, maka materi terkait penandaan perlu ditambahkan pada bimtek untuk pelaku usaha selanjutnya.

IKK1.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat BBPOM di Semarang

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Realisasi capaian indikator kinerja makanan yang memenuhi syarat sebesar 74,34% jika dibanding dengan target 78,00%, maka diperoleh **capaian 95,31%** dengan kategori **BAIK**. Capaian ini diperoleh dari persentase sampel acak yang memenuhi syarat.

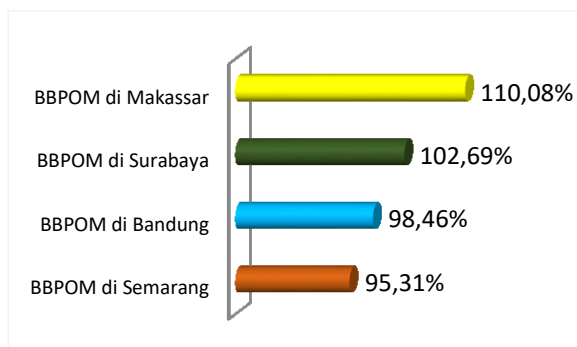


- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Capaian tahun 2020 merupakan *baseline* awal periode Renstra 2020-2024, dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir karena memiliki definisi operasional yang sedikit berbeda. Tahun 2019 sampel *targeted* dan random dihitung gabungan, sedangkan tahun 2020 pengukurannya dipisahkan antara sampel *targeted* dengan random/ acak.

Dibandingkan terhadap target tahun 2021 sebesar 80%; maka BBPOM di Semarang harus menaikkan makanan MS yang beredar lebih tinggi dari yang direncanakan, yaitu sebanyak 5,55%. Target tahun 2021 berpeluang tercapai dengan kinerja tinggi, atau dilakukan penyesuaian target untuk pencapaian yang optimal.

- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklastr**



GAMBAR 19 CAPAIAN IKK 1.2 DARI KELOMPOK BPOM KLASTER 1

Grafik di samping menunjukkan capaian realisasi BBPOM di Semarang paling rendah jika dibandingkan dengan 3 (tiga) balai seklastr. Target dari keempat balai sama dengan target nasional yaitu 78%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk pangan MS yang beredar di Jawa Tengah paling rendah daripada 3 provinsi lainnya, serta belum mencapai target nasional. Hal ini disebabkan karena banyak sampel TMK penandaan

terutama sampel pangan PIRT.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat BBPOM di Semarang 95,31% dengan kategori **Baik**. Hal yang mendukung pencapaian tersebut antara lain :



1. Adanya program Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru untuk meningkatkan pengawasan produk pangan di pasaran.
 2. Adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pangan memberikan efek jera kepada pelaku usaha untuk selalu mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha pangan.
 4. Pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPMB.
 5. Meningkatnya kemampuan laboratorium dalam pengujian produk makanan dengan memutakhirkan metode analisa yang digunakan, memverifikasi metode analisa, dan mengikuti uji profisiensi untuk mempertahankan akreditasi laboratorium.
 6. Faktor pendukung yang sama dengan IKK 1.1, pada halaman 50 faktor pendukung nomor 1 - 4.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Persentase makanan yang memenuhi syarat dicapai melalui kegiatan sampling acak, penandaan dan pengujian. Adapun Rincian capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 8 MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT TAHUN 2020

Jumlah Sampling	MS (MK Penandaan MS Hasil Uji)	TMK			TMS			
		TIE	Kedaluarsa	Rusak	MK Penandaan TMS Uji Lab	TMK Penandaan MS Uji Lab	TMK Penandaan TMS Uji Lab	
495	368 (74,34%)	0	0	0	14 (2,83%)	99 (20%)	14 (2,83%)	
		TMK Penandaan				113 (22,83%)		
		Jumlah TMK & TMS				127 (25,66%)		

Persentase makanan yang MS lebih kecil dibanding persentase makanan yang aman dan bermutu yang disampling *targeted*, sehingga dapat dikatakan sampel acak merupakan representatif produk yang beredar di pasaran.

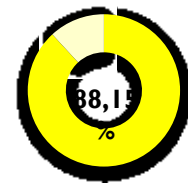
- **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya.**
1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan. Selama masa pandemi Covid-19 pembinaan ke sarana produksi tetap dilakukan baik menggunakan metode daring maupun secara luring dengan protokol kesehatan. Parameter tidak memenuhi syarat yang dominan pada sampel acak adalah TMK penandaan label terutama sampel pangan PIRT yang tidak mencantumkan nomor bets, sehingga pengawasan penandaan perlu lebih diintensifkan.

2. Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.
3. Perlunya pembinaan lebih intensif terkait penandaan produk kepada para pelaku usaha baik melalui penyelenggaraan bimbingan teknis maupun sosialisasi, terutama kepada para pelaku usaha PIRT.
4. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.
5. Meningkatkan kemampuan laboratorium dalam pengujian produk makanan dengan memutakhirkan metode analisa yang digunakan, memverifikasi metode analisa, dan mengikuti uji profisiensi untuk mempertahankan akreditasi laboratorium.

IKK1.3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Realisasi capaian indikator kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 sebesar 78,45% apabila dibandingkan dengan target Balai tahun 2020 sebesar 89% maka nilai **capaiannya adalah 88,15%** dengan kriteria **CUKUP**.



- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 maupun sebelumnya, karena memiliki definisi operasional yang sedikit berbeda. Penjelasan sama dengan persentase obat yang MS, lihat halaman 48.

Dibandingkan terhadap target tahun 2021 sebesar 89,2%; maka BBPOM di Semarang harus menaikkan realisasi capaiannya lebih tinggi dari yang direncanakan, yaitu sebanyak 10,75%. Target tahun 2021 kemungkinan akan sulit dicapai secara optimal mengingat kondisi masih banyaknya obat TMK penandaan, sehingga diperlukan penyesuaian target atau kerja keras untuk meningkatkan realisasi.

- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



Capaian realisasi BBPOM di Semarang lebih rendah jika dibandingkan dengan 3 (tiga) balai yang seklaster, terlihat dari grafik di samping. Meski Target BBPOM di Semarang (89%) lebih tinggi dibanding BBPOM di Surabaya



(80,8%), BBPOM di Makasar (80,6%), dan sedikit di bawah target Bandung (90%), serta di atas target nasional (85%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa obat aman dan bermutu yang beredar di wilayah Jawa Tengah paling rendah daripada 3 provinsi lainnya, serta belum mencapai target nasional. Hal ini disebabkan karena banyak sampel TMK penandaan terutama sampel OT produksi UKOT dan UMOT.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Berdasarkan sampling *targeted*, BBPOM di Semarang dinyatakan Cukup berhasil (88,15%). Belum optimalnya capaian indikator ini disebabkan, antara lain :

1. Penetapan target yang cukup tinggi berakibat pada pencapaian indikator yang belum baik/ maksimal.
2. Adanya sampling *targeted* yang difokuskan pada sampel dengan riwayat TMS dan kasus, sehingga menambah persentase produk TMS.
3. Masih cukup banyak produk OT TMS di pasaran.
4. Produsen kurang patuh dalam menerapkan dan/ atau kurang memahami peraturan terkait penandaan produk.
5. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Persentase obat aman dan bermutu cukup tercapai melalui kegiatan sampling *targeted*, pengawasan penandaan dan pengujian. Adapun rincian hasil kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 9 HASIL SAMPLING TARGETED, PENGAWASAN PENANDAAN, DAN PENGUJIAN TAHUN 2020

Produk	Jumlah Sampling	MS Penandaan MS Hasil Uji	TMK (Tidak Diuji Lab)			TMS		
			TIE	Kedaluarsa	Rusak	MK Penandaan TMS Uji Lab	TMK Penandaan Uji Lab	MS Penandaan TMS Uji Lab
Obat	125	108	0	0	0	1	16	0
Kosmetik	166	139	0	0	0	1	20	6
SK	20	15	0	0	0	5	0	0
OT	116	73	0	0	0	15	22	6
Jumlah	427	335 (78,45%)	0	0	0	22	58	12
Jumlah TMK Penandaan							70 (76,09% dari total TMS)	
Jumlah TMS & TMK			92 (21,55%)					

Sampel *targeted* Obat adalah sampel obat covid, obat JKN (BPJS), obat kasus Inspeksi, sampel rokok. Sampel *targeted* Obat tradisional adalah sampel yang disampling secara *online*, sampel yang mempunyai riwayat TMS, sampel kasus dari bidang Inspeksi, sampel

UMKM, sampel unggulan daerah dan sampel import. Dari tabel di atas, 427 sampel obat yang masuk, sebanyak 335 sampel memenuhi syarat, dan 92 sampel (21,55%) tidak memenuhi syarat. Lebih dari 50% total sampel TMS dikarenakan TMK penandaan (76,09%) dan sebagian besar adalah sampel obat tradisional. Hal ini menunjukkan masih perlu peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha untuk mentaati CPOTB melalui kegiatan pembinaan yang lebih efektif.

- **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya.**

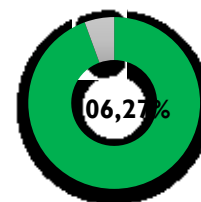
Tidak ada rekomendasi pada tahun sebelumnya, lihat penjelasan rekomendasi obat MS pada halaman 51. Langkah-langkah yang dilakukan agar capaian obat yang aman dan bermutu meningkat sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPOTB Bertahap, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran Obat Tradisional untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.

IKK 1.4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Capaian indikator kinerja indeks makanan yang aman dan bermutu tahun 2020 **mencapai** 77,58% atau **106,27%** jika dibandingkan target 73% dengan kategori **BAIK**. Capaian ini diperoleh dari persentase sampel targeted yang memenuhi syarat.



- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 maupun sebelumnya, karena memiliki definisi operasional yang sedikit berbeda. Penjelasan sama dengan persentase makanan yang MS, lihat halaman 52.

Realisasi tahun 2020 (77,58%) telah melampaui target tahun 2021 (74%) maupun tahun 2024 (77%), namun BBPOM di Semarang akan mempertahankan dan terus berusaha meningkatkan persentase makanan yang aman dan bermutu.

- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**





GAMBAR 21 CAPAIAN IKK 1.4 DARI KELOMPOK BPOM KLASTER 1

Grafik di samping menunjukkan capaian realisasi BBPOM di Semarang berada pada posisi kedua setelah BBPOM di Surabaya dengan kategori **Baik**, sedangkan capaian BBPOM di Surabaya berada pada kategori tidak dapat disimpulkan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan target, dimana target BBPOM di Semarang (73%) lebih tinggi 23% dibanding target BBPOM di Surabaya (50%).

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 106,27% dengan kategori **Baik**. Hal yang mendukung pencapaian tersebut antara lain :

1. Pembinaan pada pelaku usaha dalam rangka permohonan ijin produksi, berupa bimbingan teknis UMKM dan bantuan uji laboratorium untuk pendaftaran pangan pada UMKM.
2. Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan keamanan pangan dan sosialisasi on line keamanan pangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan aman.
3. Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang melibatkan sekolah, perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat, Instansi lintas sektor baik secara tatap muka dengan protokol kesehatan maupun melalui web dan media sosial (facebook, twitter, facebook, instagram).
4. Faktor pendukung yang sama dengan IKK 1.1 pada halaman 51 faktor pendukung nomor 1 – 4; dan IKK 1.2 pada halaman 55 faktor pendukung nomor 2, 3, dan 5.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Persentase makanan yang aman dan bermutu dicapai melalui kegiatan sampling *targeted*, pengawasan penandaan dan pengujian. Adapun rincian capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 10 MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2020

Jumlah Sampling	MS (MK Penandaan MS Hasil Uji)	TMK			TMS		
		TIE	Kedaluarsa	Rusak	MK Penandaan TMS Uji Lab	TMK Penandaan MS Uji Lab	TMK Penandaan TMS Uji Lab
397	308 (74,34%)	0	0	0	58 (14,613%)	19 (4,79%)	12 (3,02%)
		TMS Penandaan			31 (7,81%)		
		Jumlah TMK & TMS			89 (22,42%)		

Sampel makanan yang aman dan bermutu adalah sampel yang disampling *targeted*, yaitu : minyak goreng, tepung terigu, garam beryodium, dan sampel pendampingan UMKM. Dari total 397 sampel yang disampling, 89 sampel yang TMS sebagian besar TMS terhadap mutu.

- **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya.**

Capaian persentase makanan yang MS tahun 2019 lebih dari 120%, sehingga tidak ada rekomendasi. Pada analisa keberhasilannya dipengaruhi oleh prioritas sampling yang berbasis resiko, dan tetap diterapkan pada sampling tahun 2020. Rekomendasi perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya, antara lain :

1. Menyelenggarakan pendampingan, pembinaan dan sertifikasi pemenuhan CPPB, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran pangan untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
2. Meningkatkan mutu pengujian dengan menerapkan jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi/validasi metode dan uji profisiensi maupun uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.
3. Rekomendasi yang sama dengan IKK 1.2, pada halaman 53 nomor 1 dan 2.

**SK
2**

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Dan Mutu Obat Dan Makanan Di BBPOM Di Semarang

Pencapaian Sasaran Kegiatan kedua pada Tahun 2020 diukur dengan **1 (satu) indikator kinerja**, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 11 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN KEDUA

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IKK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang	72	71,91	99,88%	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2				99,88%	Baik

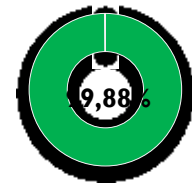
NPS SK 2 **sebesar 99,88%**, menggambarkan bahwa Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Dan Mutu Obat Dan Makanan Di BBPOM Di Semarang meningkat dengan kategori **BAIK**.



IKK 2.1 Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Pengukuran kinerja untuk capaian sasaran 2 yaitu Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan diperoleh dari penilaian persepsi sejauh mana kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat dan bermutu yang akan dikonsumsi.



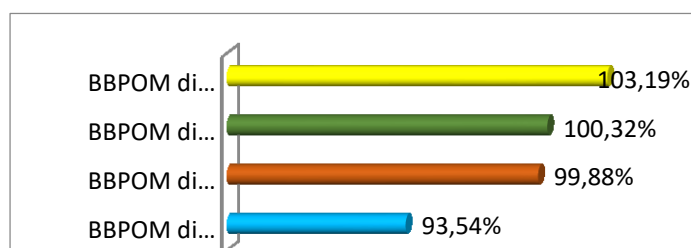
Pada periode tahun 2020 pengukuran dan evaluasi terhadap nilai pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat di BBPOM di Semarang sebesar **71,91** dari target **72,0** yang telah ditetapkan. Sehingga IKK dan sasaran strategis ini **tercapai 99,88%** dengan kriteria penilaian **BAIK**.

• Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir serta terhadap target jangka menengah

Perbandingan realisasi kinerja untuk Indeks Kesadaran Masyarakat dengan tahun 2019 maupun kurun waktu lima tahun terakhir, belum bisa dilakukan karena tahun 2020 merupakan awal ditetapkan IKK ini dengan *base line* secara nasional.

Target pada tahun 2021 adalah sebesar 75, sehingga hanya diperlukan kenaikan indeks sejumlah 3,09. Diharapkan capaian IKK ini dapat tercapai dengan baik pada tahun mendatang.

• Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster



GAMBAR 22 CAPAIAN IKK 2.1 DARI KELOMPOK BPOM KLASER 1

Bila dibandingkan pencapaian IKK Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BBPOM di Semarang memperoleh capaian Indeks Kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan BBPOM di Bandung 93,54%; tetapi lebih rendah

dibandingkan dengan BBPOM di Makasar 103,19%. Namun keempat Balai capaiannya melampaui target nasional sebesar 72%.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi tahun ini lebih rendah daripada target yang ditetapkan namun **capaian 99,88%** tetap dapat diasumsikan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat luas, karena beberapa pertimbangan seperti adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan KIE secara langsung kepada masyarakat luas seperti penyelenggaraan KIE melalui pameran, *Car Free Day* dan penyebaran informasi yang melibatkan masyarakat luas tidak dapat dilaksanakan.

Tercapainya Indeks Kesadaran Masyarakat dengan kriteria baik, didukung oleh beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang antara lain :

- Optimalisasi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat Jawa Tengah terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, melalui berbagai kegiatan baik daring ataupun luring dan pemanfaatan media sosial (instagram, facebook, dll).
- Pemberdayaan Masyarakat Melalui Organisasi Masyarakat
Pemberdayaan dilakukan terhadap berbagai organisasi masyarakat diantaranya Aisyiyah, Salimah, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPEMI), PKK, Dan Pramuka. Dari masing-masing organisasi masyarakat ini ditunjuk beberapa orang untuk dijadikan kader keamanan pangan dan setiap kader diwajibkan melakukan sosialisasi kembali ilmu yang sudah didapat kepada komunitasnya dan secara mandiri juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat lain di sekitarnya.
- Pemberdayaan Masyarakat Desa, Komunitas Sekolah dan Komunitas Pasar
Melalui Program Keterpaduan Gerakan Keamanan Pangan Desa, Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, sehingga mampu secara mandiri melakukan pengawasan atau memilah dan memilih makanan yang aman.
Program keterpaduan ini dilaksanakan di 3 Kabupaten, yaitu : Kabupaten Brebes, Pemalang, dan Klaten dengan sasaran 6 desa, 3 pasar, dan 32 sekolah.
- Pemberdayaan komunitas pramuka melalui pelatihan anggota SAKA POM Kota Semarang dan SAKA POM Kabupaten Kudus yang selanjutnya mensosialisasikan kembali kepada pramuka lainnya.

- **Analisis program /kegiatan keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Untuk pencapaian sesuai target, berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang, diantaranya adalah:

- Memberikan informasi cara cerdas memilih obat dan makanan melalui cek KLIK dan informasi tentang obat dan makanan dalam setiap kegiatan dengan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik yaitu radio-TV, media luar ruang, media massa, dan media online lainnya.
- Membuat materi-materi KIE yang informatif dan konten yang menarik di media sosial (instagram, facebook, twitter), mengunggah berita-berita aktual. Menyelenggarakan



kegiatan inovasi **Sekilas Info Untuk PeLANGgan BPOM (SIULAN)** berupa siaran langsung melalui Instagram *Live*.

- c. Membuat alat peraga dalam bentuk poster, leaflet, spanduk yang dibagikan kepada komunitas pasar, komunitas desa, komunitas sekolah, dan masyarakat saat melakukan KIE atau kunjungan/pembinaan.
 - d. Menyisipkan informasi cek KLIK di semua materi presentasi yang ditujukan kepada masyarakat, agar dapat dipahami dengan lebih baik.
- **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**
 1. Frekuensi, kualitas, dan kuantitas penyelenggaraan KIE kepada komunitas masyarakat yang diberdayakan telah ditingkatkan dengan membuat materi-materi KIE yang informative dan menarik di media sosial (instagram, facebook, twitter), mengunggah berita-berita aktual dan juga membuat kegiatan inovasi SIULAN berupa siaran langsung melalui Instagram Live.
 2. Penyelenggaraan program yang intensif dan komprehensif yang dapat menjangkau masyarakat di pedesaan telah dilakukan melalui program inovasi Pangan Unggulan sehat, keamanannya terjaga dan bergizi (**PanggulSekzi**) berupa kegiatan pembinaan kepada sentra produksi pangan industri rumah tangga yang masih menggunakan bahan berbahaya pada proses produksinya, supaya produk pangan yang dihasilkan oleh sentra industri rumah tangga tersebut aman dan bebas bahan berbahaya.
 3. Telah memanfaatkan secara maksimal pembagian wilayah kerja antara BBPOM di Semarang dengan Loka POM di Surakarta dan Loka POM di Banyumas untuk memperluas jangkauan dan efektifitas luaran hasil pemberdayaan masyarakat.

**SK
3**

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha Dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Di BBPOM Di Semarang

Pencapaian Sasaran Kegiatan ketiga pada Tahun 2020 diukur dengan **3 (tiga) indikator kinerja**, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 12 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN KETIGA

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IKK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	86,03	104,91%	Baik
IKK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	69,3	97,61%	Baik
IKK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88	88,11	100,13%	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3				100,88%	Baik

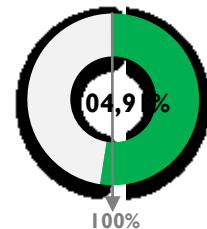


NPS SK 3 **sebesar 100,88%**, menggambarkan bahwa Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang meningkat dengan kategori **BAIK**.

IKK 3.1 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Realisasi capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang terhadap target 2020 adalah **sebesar 104,91%** kriteria **BAIK**.



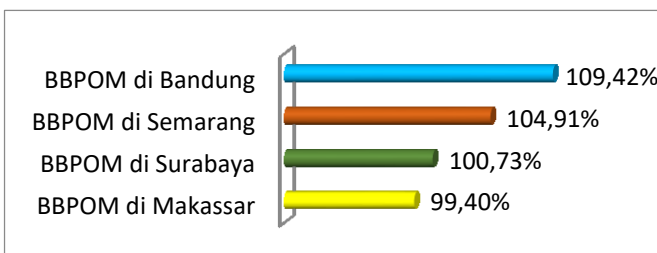
Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha ini merupakan indikator baru dalam Renstra BPOM 2020-2024. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM pada level *stakeholders perspective* yaitu indikator kinerja sasaran strategis 3 (SS3) yaitu meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dan penetapan target nasional 2020 berdasarkan pada survei tingkat kepuasan pelaku usaha Obat dan Makanan terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan BPOM yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) pada tahun 2018 dan 2019.

- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Perbandingan capaian dengan tahun 2019 maupun kurun waktu lima tahun terakhir, belum bisa dilakukan, karena tahun 2020 merupakan awal ditetapkan IKK ini dengan *base line* secara nasional.

Realisasi tahun 2020 (86,03) telah melampaui target tahun 2021 (84) maupun tahun 2022 (86), namun BBPOM di Semarang akan terus berusaha meningkatkan persentase Indeks Kepuasan Pelaku Usaha.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Semarang apabila dibandingkan BBPOM seklaster, menempati urutan kedua setelah BBPOM di Bandung. Jika dibandingkan dengan target Nasional (82) semua balai seklaster di atas

GAMBAR 23 CAPAIAN IKK 3.1 DARI KELOMPOK BPOM KLASER 1



target Nasional, namun jika dibandingkan dengan realisasi nasional (86,81), realisasi BBPOM di Semarang berada sedikit di bawahnya sehingga perlu dilakukan peningkatan layanan pembinaan dan bimbingan Kepada pelaku usaha. Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh PRKOM dengan mempertimbangkan jumlah kegiatan dan nilai kepuasan secara nasional, BBPOM di Semarang menempati peringkat kedua setelah BBPOM di Jakarta.

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang untuk mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Pelaku Usaha melebihi target dan mendekati capaian nasional adalah pelaksanaan desk konsultasi, pendampingan pelaku usaha dalam proses penyelesaian CAPA dalam rangka sertifikasi maupun registrasi produk, serta kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara luring, maupun daring seperti kegiatan Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang dengan pemilihan materi sesuai kebutuhan pelaku usaha dan penyajian materi oleh narasumber yang berkompeten.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya Indeks kepuasan pelaku usaha di wilayah kerja BBPOM di Semarang tahun 2020 selama periode yang ditetapkan PRKOM, yaitu 27 April 2020 – 30 November 2020 adalah 15 kegiatan yang meliputi 3 kegiatan pendampingan, 2 kegiatan desk, dan 12 kegiatan bimtek untuk komoditi Obat, OT, SK, Kosmetik, dan Pangan Olahan, dengan metode luring dan daring.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan BPOM adalah :

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Bagi UMKM untuk komoditi pangan olahan yang dilaksanakan di Salatiga secara luring dan daring dengan metode yang lebih interaktif dan melibatkan instansi lain yang terkait sehingga pelaku usaha dapat menyampaikan permasalahan dan kendala yang dialami secara langsung dan narasumber dalam memberikan alternatif solusi secara langsung.
2. SOS Keamanan Pangan dan Tata Cara Registrasi Pangan Olahan merupakan salah satu kegiatan BBPOM di Semarang yang banyak diminati oleh pelaku usaha karena tetap dapat diikuti di masa pandemic dan memberikan pengetahuan teknis terkait registrasi Pangan Olahan yang sedang banyak diminati oleh UMKM di Jawa Tengah.
3. Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi dan Registrasi Produk memberikan dampak langsung terhadap percepatan penyelesaian proses sertifikasi maupun registrasi yang sedang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga layanan ini mendapat apresiasi yang baik dan meningkatkan kepuasan pelaku usaha.

- **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

Hasil pengukuran kinerja BBPOM di Semarang terkait kepuasan pelaku usaha terhadap layanan bimbingan dan pembinaan memperoleh nilai 86,03 menggambarkan bahwa pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang "Sangat Puas" (rentang 76-100) terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan, sehingga diharapkan dapat berpengaruh pada pemahaman pelaku usaha atas regulasi BPOM yang kemudian berdampak pada kepatuhan dalam memenuhi persyaratan sehingga mendorong peningkatan mutu, khasiat, manfaat, dan keamanan produk Obat dan Makanan.

Pendistribusian jumlah kegiatan untuk tiap komoditi dan jumlah responden pada setiap kegiatan kurang merata menyebabkan kurang meratanya kesempatan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan layanan bimbingan dan pembinaan dari BBPOM di Semarang. Hal tersebut dapat diperbaiki dengan menetapkan target minimal responden per kegiatan sehingga data survei menjadi lebih baik dan lebih representatif.

Survei pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha ini juga memperoleh banyak saran dan masukan dari pelaku usaha, diantaranya berupa apresiasi terkait manfaat pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan kegiatan serupa diadakan secara berkala, usulan materi kegiatan selanjutnya, dan sebagainya. Semua saran dan masukan tersebut akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan pembinaan untuk periode selanjutnya.

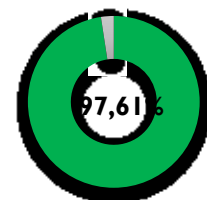
Berdasarkan hasil survei periode 2020 ini, direkomendasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan BBPOM di Semarang selanjutnya lebih fokus pada materi yang berdampak langsung terhadap percepatan perizinan/ sertifikasi pelaku usaha karena parameter ini termasuk parameter yang nilainya di bawah nilai parameter lainnya dan merupakan tujuan utama dari pelaku usaha.

IKK 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Pengukuran kinerja untuk capaian sasaran 3.2 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diperoleh dari penilaian persepsi tingkat kepuasan Masyarakat terhadap keseluruhan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh BBPOM di Semarang.

Pada periode tahun 2020 pengukuran dan evaluasi terhadap nilai pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan BBPOM di Semarang **69,3** dari target **71** yang telah ditetapkan. Sehingga diperoleh persentase capaian pengukuran kinerja sebesar **97,61 %** dengan kriteria penilaian **BAIK**.

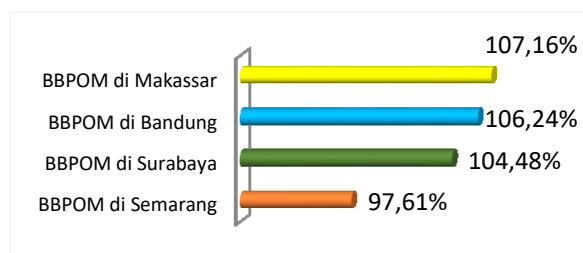


- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Pencapaian realisasi kinerja dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan yang dilaksanakan BBPOM di Semarang pada periode tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 tidak dapat dilakukan, karena Indikator Kinerja ini adalah indikator baru yang ditetapkan di dalam tahun 2020 – 2024.

Dibandingkan terhadap target tahun 2021 sebesar 73; maka BBPOM di Semarang harus menaikkan realisasi capaiannya sedikit lebih tinggi dari yang direncanakan, yaitu sebanyak 3,7%. Target tahun 2021 masih memungkinkan untuk dicapai dengan kinerja yang tinggi.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



GAMBAR 24 CAPAIAN IKK 3.2 DARI KELOMPOK BPOM KLASTER 1

Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Semarang apabila dibandingkan BBPOM seklaster, menempati urutan paling bawah dan belum memenuhi target Nasional (71) maupun realisasi nasional **72,54** rata-rata capaian seluruh balai (98,64%), sehingga perlu dilakukan peningkatan layanan kepada masyarakat.

masyarakat.

Meskipun capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Jawa Tengah terhadap kinerja pengawasan BBPOM di Semarang tergolong Baik, namun perlu dilakukan perbaikan komprehensif pada setiap lini proses pengawasan sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat bersanding sejajar dengan BBPOM lainnya terutama yang berada dalam satu klaster.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Hal yang mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan adalah upaya terus menerus BBPOM di Semarang dalam meningkatkan kinerja pengawasannya meskipun di tengah era pandemik yang berlangsung sepanjang tahun.

Analisis pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan Indikator pembentuk Indeks terdiri dari *Tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*, dengan mengukur melalui bukti langsung, keterandalan kinerja, kecepatan respon terhadap pengaduan dan permintaan pelayanan dan jaminan atas hasil kinerja yang diupayakan serta dukungan moral instansi yang diterima dan dirasakan masyarakat Jawa Tengah. Pengukuran dilakukan terhadap responden yang merupakan anggota rumah tangga di wilayah Jawa Tengah dan secara aktif menggunakan produk obat dan makanan.

BBPOM di Semarang telah melaksanakan kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan budaya kerja Badan POM yaitu PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibel, Kerjasama Tim, Inovatif dan Responsif) meskipun banyak kendala yang dihadapi karena situasi pandemic Covid-19 yang membatasi ruang gerak pengawasan secara langsung, sehingga diperlukan alternative solusi bentuk pengawasan secara tidak langsung namun tetap memperhitungkan keabsahan hasil pengawasan yang dilakukan.

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat ini mengacu pada skala 0-100 dengan perolehan nilai 69,30 termasuk dalam rentang penilaian (60,01 – 75,00) dengan interpretasi **cukup baik**.

Masih rendahnya pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan BBPOM di Semarang disebabkan:

- a. Hasil pengawasan yang telah dilaksanakan belum tersosialisasikan secara optimal kepada masyarakat, meskipun telah diberitakan melalui media sosial.
- b. Tidak seluruh pengguna produk Obat dan Makanan di wilayah Jawa Tengah akrab dengan penggunaan media sosial.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Beberapa kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh BBPOM Semarang selama masa pandemi Covid-19 di antaranya adalah :

1. Inspeksi dan Audit sarana produksi dan distribusi secara online melalui *desktop inspection*.
2. Deks CAPA untuk Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik dengan mengumpulkan Penanggung Jawab Teknis sarana PBF/PBBBBF (Pedagang Besar Farmasi / Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi) dan melakukan proses evaluasi Capa bersama beberapa evaluator. Pelaksanaan Deks CAPA tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan.
3. Sampling produk Obat dan Makanan di Sarana Produksi, Distribusi dan Pelayanan Farmasi
4. Pengawasan intensifikasi inspeksi sarana distribusi Pangan menjelang hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

Kegiatan pengawasan 2,3 dan 4 dilaksanakan dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (petugas mengenakan masker, *face shield*, baju rompi pelindung dan membawa *themo gun*) sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sebagai edukasi dan proses keterbukaan kepada masyarakat, pada even tertentu kegiatan pengawasan tersebut diberitakan melalui media sosial Insta Gram, Twitter, Face book dan You Tube.

- **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

IKK 3.2 baru diukur kinerjanya pada periode renstra 2020 - 2024, sehingga belum ada rekomendasi tahun sebelumnya. Di tahun mendatang BBPOM di Semarang akan senantiasa



meningkatkan kualitas pengawasan secara profesional sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, serta lebih aktif mensosialisasikan hasil pengawasannya kepada masyarakat; sehingga berdampak pada meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.

IKK 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Hasil survei pada tahun 2020 ini dilaksanakan oleh Inspektorat Utama Badan POM secara serentak melalui aplikasi Simolekdesi (Sistem Monitoring Elektronik & Evaluasi Kinerja). Survei dilaksanakan terhadap tiga jenis pelayanan yaitu, pengujian, penerbitan rekomendasi SKI/SKE serta layanan informasi dan pengaduan dengan jumlah responden sebanyak 162 menunjukkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat BBPOM di Semarang terhadap penyelenggaraan layanan publik sebesar **88,11** di atas target nilai yang ditetapkan yaitu **88,00**. Sehingga diperoleh persentase capaian pengukuran kinerja Sasaran sebesar **100,13 %** dengan kriteria penilaian **BAIK**.



Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja dapat disimpulkan Sasaran Strategis ke-3 dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik BBPOM di Semarang sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini di dukung upaya terus menerus BBPOM di Semarang dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

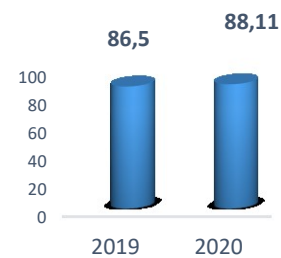
- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Meskipun indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik baru dimasukkan pada periode 2020, sebagai salah satu Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3, tetapi Inspektorat Utama Badan POM telah melaksanakan Survei secara Nasional dan serentak terhadap penyelenggaraan pelayanan public unit kerja Badan POM seluruh Indonesia pada tahun 2019. Terjadi peningkatan perolehan Nilai persepsi Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 86,51 dengan selisih sebesar 1,6 poin.

Perbandingan nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 dan 2020 disajikan pada gambar di samping.

Secara keseluruhan pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019, namun perlu adanya perhatian khusus terhadap penurunan persentase capaian jika dianalisa per unsur layanan. Penurunan capaian terdapat pada unsur layanan kompetensi pelaksana sebesar **1, 22** poin serta pada unsur layanan penanganan pengaduan, saran dan masukan sebesar **8,53** poin.

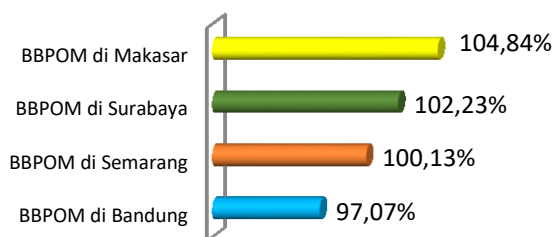
Survei Kepuasan Pelanggan periode sebelumnya dilaksanakan secara mandiri oleh BBPOM di Semarang yang merupakan program berkelanjutan sebagai salah satu upaya untuk mengetahui Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai kualitas pelayanan Publik yang diselenggarakan di BBPOM di Semarang setiap periode tahun berjalan. Terhitung mulai tahun 2019 Inspektorat Utama menyelenggarakan survei Kepuasan Masyarakat berskala Nasional, meskipun Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik baru dimasukkan sebagai Indikator Kinerja per 2020. Karena metode pengukurannya berbeda, perbandingan hasil persepsi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan survei mandiri BBPOM di Semarang tahun 2016 – 2018 tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020.



GAMBAR 25 GAMBAR PERBANDINGAN CAPAIAN IKK 3.3 TAHUN 2019-2020

Dengan melihat capaian Tahun 2020 (88,11), maka target tahun 2021 sebesar 89,5 memungkinkan dicapai, hanya diperlukan kenaikan indeks sebesar 1,39.

- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



GAMBAR 26 CAPAIAN IKK 3.3 DARI KELOMPOK BPOM KLASTER 1

Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan BBPOM di Semarang pada periode 2020 apabila dibandingkan berada di atas rata-rata Nasional yaitu **87,0** dengan selisih nilai sebesar **1,11** poin. Nilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di BBPOM lebih tinggi jika dibandingkan dengan BBPOM di Bandung yang memperoleh 85,91 (97,07%).

Sedangkan jika dibandingkan dengan balai lain seklaster perolehan nilai IKM BBPOM di Semarang jauh lebih rendah seperti BBPOM di Medan (nilai IKM = 89,87), BBPOM di Surabaya 102,23% (nilai IKM = 91,50) dan BBPOM di Makassar 104,84% (Nilai IKM 93,91).

Perbedaan ini dimungkinkan karena banyak responden dari BBPOM di Semarang yang masih salah persepsi dalam memberikan penilaian jenis layanan seperti keliru dalam pemilihan jenis layanan dan keliru mempersepsikan jenis layanan yang diterima sebagai keseluruhan proses dan tidak spesifik pada jenis layanan yang diselenggarakan di BBPOM di Semarang yaitu (Pengujian, SKI/SKE dan Layanan Informasi dan Pengaduan).

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan publik BPOM dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPOM. Terhadap adanya kesenjangan antara kualitas dan harapan pelayanan diharapkan dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai prioritas masing-masing unit pelayanan publik. Dengan demikian, harapan Presiden bahwa tidak ada lagi pola pikir lama, harus berubah membangun nilai-nilai baru dalam bekerja dan cepat beradaptasi pada perkembangan zaman dapat diwujudkan.

Peningkatan realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di BBPOM di Semarang dari tahun ke tahun dimungkinkan karena :

1. Adanya perbaikan sarana dan prasarana di ruang layanan, misalnya :
 - Memperkuat jaringan internet sehingga kendala lambatnya koneksi internet yang dialami oleh pelanggan di BBPOM di Semarang dapat teratasi.
 - Merenovasi ruang pelayanan publik dan ruang tunggu sehingga lebih nyaman untuk pelanggan.
2. Penambahan akses pelayanan permohonan informasi dan pengaduan melalui sarana *on line*, terutama saat di awal masa pandemi, di mana PSBB pembatasan sosial berskala besar diberlakukan secara ketat, sehingga pelanggan yang membutuhkan informasi tetap memiliki alternatif sarana komunikasi yang mudah diakses tanpa harus tatap muka.
3. Selama di awal masa pandemi, apabila dirasakan perlu pelanggan tetap bisa melakukan konsultasi tatap muka dengan mengajukan janji temu terlebih dahulu melalui bitly dengan tetap disiplin protokol kesehatan.
4. Percepatan time line penyelesaian pengujian produk pihak ke tiga menjadi 15 hari kerja dari sebelumnya 30 hari kerja, dan percepatan rata-rata penyelesaian penerbitan SKI/SKE dari 8 jam menjadi 3 jam.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Beberapa program / kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Semarang selama periode tahun 2020 yang meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, antara lain :

1. Kegiatan Lakone Sekti sebagai salah satu inovasi untuk mendekatkan BBPOM di Semarang hadir langsung ke Masyarakat yang berasal dari Kabupaten yang jauh dari kota Semarang (untuk periode tahun 2020, pelaksanaan kegiatan ini baru terbatas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen)
2. Kegiatan BPOM SIMPATIC (**SI**lap **M**emberikan **P**elay**A**nan **T**erbaik dan **I**ntensif di tempat **C**ustomer) selama periode tahun 2020 ini, telah dilakukan di Kota Pekalongan, Banjarnegara dan Gombang, Kebumen (2 kali), di mana petugas BBPOM di

Semarang memberikan konsultasi langsung di sarana produksi pangan dan Obat Tradisional sebagai persiapan sarana tersebut untuk melegalisasi produknya.

3. Melayani pemberian informasi secara online baik melalui whatsapp layanan informasi, layanan sertifikasi maupun layanan pengujian.
4. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Sinau on line sareng (SOS) BBPOM di Semarang dan inovasi SIULAN yang dilakukan rutin sebulan sekali.

Tindak lanjut perbaikan kinerja periode sebelumnya sudah dilaksanakan seperti peningkatan kompetensi petugas, namun masih ada persepsi masyarakat yang menilai kompetensi petugas belum memenuhi harapan sehingga tahun ini terjadi penurunan nilai IKM pada unsur layanan kompetensi pelaksana.

Perbaikan terhadap sarana prasarana ruang publik sudah dilakukan seperti penambahan bandwidth jaringan WIFI, untuk memperkuat koneksi internet bagi pelanggan yang membutuhkan, tempat charger HP, pembuatan kantin, dan lain-lain. Perbaikan sarana prasarana untuk kenyamanan ruang layanan selama tahun 2020 terus dilakukan, seperti membuka sekat pembatas ruang layanan informasi dengan ruang layanan SKI/SKE sehingga terkesan lebih terang dan luas, memberi jarak antara meja / loket layanan dan memasang sekat akrilik sebagai upaya proteksi terhadap penyebaran virus Corona-19. Perbaikan ini berdampak positif dengan meningkatnya capaian nilai IKM sebesar **2,93** poin.

- **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

IKK 3.3 tidak ada pada tahun 2019, sehingga belum ada rekomendasi. Catatan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun mendatang antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi pelaksana layanan secara terus menerus dengan materi yang beragam, sehingga ke depannya semua petugas layanan memiliki tingkat kompetensi yang secara umum sama, dan hal ini akan mampu memberikan daya ungkit untuk peningkatan kepuasan pelanggan.
2. Menyediakan layanan konsultasi secara online untuk memudahkan pelanggan yang jauh dan tidak dapat berkonsultasi secara tatap muka.
3. Melakukan penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dapat menjadi daya ungkit nilai IKM untuk unsur layanan penanganan pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat.
4. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan partisipasi masyarakat memberi kritik, saran, dan masukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, karena masyarakat sebagai pengguna jasa layanan BBPOM di Semarang yang lebih mengetahui seperti apa harapan/ ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan BBPOM di Semarang.



CAPAIAN INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

SK
4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat Dan Makanan Serta Pelayanan Publik Di Wilayah Kerja BBPOM Di Semarang

Pencapaian Sasaran Kegiatan ke-empat pada Tahun 2020 diukur dengan **6 (enam) indikator kinerja**, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 13 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN KEEMPAT

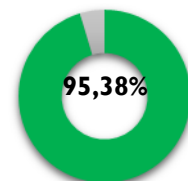
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IKK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00%	82,98%	95,38%	Baik
IKK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,60%	78,01%	100,53%	Baik
IKK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	99,09%	116,58%	Sangat Baik
IKK 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00%	47,91%	104,15%	Baik
IKK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	58,66%	106,65%	Baik
IKK 4.6	Indeks Pelayanan Publik	3,51	4,14	117,95%	Sangat Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK4				106,89%	Baik

NPS SK 4 sebesar **106,87%**, menggambarkan bahwa efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik BBPOM di Semarang telah **tercapai** dengan kategori **BAIK**.

IKK 4.1 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

- Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Berdasarkan rekomendasi yang diterima BBPOM di Semarang tahun 2020 dari unit kerja, pusat, dan pemangku kepentingan yang telah ditindaklanjuti; serta rekomendasi BBPOM di Semarang yang ditindaklanjuti oleh unit kerja pusat maupun UPT lain, diperoleh nilai persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 82,98% dengan target 87% sehingga capaian indikator ini adalah **95,38%** dengan kriteria **BAIK**.



- Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Perbandingan capaian IKK 4.1 dengan tahun 2019 maupun kurun waktu lima tahun terakhir, belum bisa dilakukan karena tahun 2020 merupakan awal ditetapkannya indikator kinerja

persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

Realisasi 82,98% jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 89%; maka BBPOM di Semarang harus mampu menaikkan realisasi capaiannya sebanyak 6,02%. Kenaikan capaian yang diharapkan tersebut lebih besar dari yang direncanakan hanya sebesar 2%, sehingga ada kemungkinan tidak akan tercapai optimal jika tidak ada penurunan target atau kinerja yang tinggi.

- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



GAMBAR 27 CAPAIAN IKK 4.1 DARI KELOMPOK BPOM KLASER 1

Capaian IKK 4.1 BBPOM Semarang berada pada urutan ketiga, setelah BBPOM Bandung dan BBPOM Surabaya terlihat dari grafik di samping. Realisasi IKK ini telah melampaui capaian rata-rata nasional (82%), namun belum mencapai target (87%). Belum optimalnya capaian IKK ini, dikarenakan masih ada

rekomendasi BBPOM di Semarang yang belum ditindaklanjuti oleh pusat maupun UPT lain.

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor keberhasilan pencapaian nilai persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, diantaranya :

1. Tersedianya peraturan terkait sebagai pedoman untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan baik.
2. Adanya standar operasional yang jelas terkait alur penyampaian rekomendasi hasil pengawasan, dan tindaklanjutnya.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh pusat, pemangku kepentingan/ lintas sektor yang perlu ditindaklanjuti; serta rekomendasi dari BBPOM di Semarang yang perlu ditindaklanjuti oleh pusat/ UPT lain.
4. Adanya aplikasi sikd.pom.go.id yang mempermudah penyampaian, monitoring dan dokumentasi surat, termasuk surat rekomendasi dari pusat.
5. Kemudahan koordinasi dan komunikasi yang baik, efektif, serta lancar antara pusat, lintas sektor, serta UPT lain.
6. Kompetensi inspektur yang memadai, menunjang terlaksananya tindak lanjut rekomendasi maupun penyampaian rekomendasi yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Penetapan target pada tahun 2020 untuk indikator ini kategori baik, mendekati kondisi riil, sehingga meski belum tersedia *baseline* data, capaian kinerja termasuk dalam kategori/



kriteria baik.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Koordinasi dan Monitoring Tindak Lanjut (TL) dengan Lintas Sektor terkait melalui pertemuan pertemuan rutin setiap tahun.
2. Peningkatan kompetensi inspektur dan *up date* ilmu yang terus dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal, meski tahun 2020 sebagian besar diselenggarakan melalui *daring* dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

- **Evaluasi dan analisis terkait tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

Indikator persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan baru ada padatahun 2020, sehingga tidak dapat dievaluasi maupun analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya.

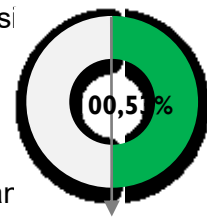
Dalam rangka *continuous improvement*, direkomendasikan peningkatan kinerja untuk tahun selanjutnya, sebagai berikut :

1. Adanya petunjuk teknis yang lebih rinci terkait rekomendasi dan tindak lanjut yang termasuk dalam kategori indikator kinerja ini.
2. Penyampaian rekomendasi dari balai ke unit kerja pusat/ UPT lain dapat difasilitasi melalui aplikasi sikd.pom.go.id; guna kemudahan dan percepatan pengiriman serta monitoringnya.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap rekomendasi dan TL untuk mendapatkan solusi terkait kendala yang ada.

IKK 4.2 Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

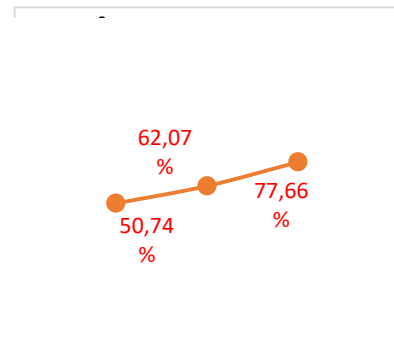
- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi/ distribusi obat dan makanan yang TMK, BBPOM di Semarang telah melakukan tindak lanjut berupa sanksi administrasi berupa peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, laporan hasil pemeriksaan, atau perintah perbaikan dan pencegahan kepada pelaku usaha serta kepada instansi terkait (antara lain : Dinas Kesehatan Kab/Kota). Realisasi 78,01% terhadap target 77,60%, maka capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2020 adalah **100,53%** dengan **kriteria BAIK**.



- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, persentase realisasi tahun 2020 naik sebesar 15,53% (dari 62,07% menjadi 77,60%), dengan target naik sebesar 27,6% (dari 50% menjadi 77,6%). Meski capaian kinerja indikator ini menurun 23,61%, namun kriteria capaian tidak dapat disimpulkan pada tahun 2019 menjadi **baik** pada tahun 2020, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 capaian kinerja persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan **lebih baik** jika dibandingkan dengan tahun 2019.



GAMBAR 28 GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN IKK 4.2 TAHUN 2018-2020

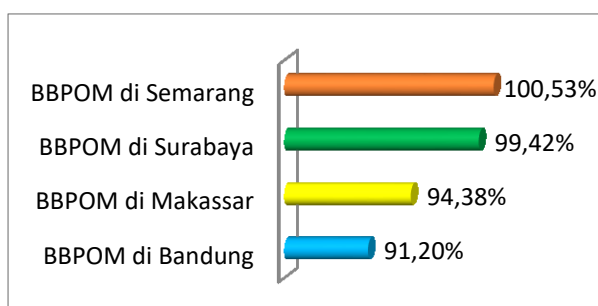
Indikator kinerja ini baru diukur selama tiga tahun terakhir. Realisasi (kurva garis) dan Capaian (diagram batang) periode tahun 2018-2020 dapat digambarkan melalui grafik di samping.

Meski capaian menurun, namun realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan selalu meningkat setiap tahunnya, dan pada **tahun 2020** adalah **realisasi yang tertinggi**.

Hasil capaian kinerja berkriteria **baik tercapai pada tahun 2020** dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya yang berkriteria tidak dapat disimpulkan karena capaian melebihi 120%. Faktor yang mempengaruhi adalah penetapan target yang semakin tajam mendekati riil/ kondisi yang sebenarnya.

Realisasi 77,60% jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 80,7%; maka BBPOM di Semarang harus mampu menaikkan realisasi capaiannya sebanyak 3,1%. Kinerja BBPOM di Semarang yang tinggi dan *feedback* pelaku usaha/ lintas sektor yang baik akan mendukung tercapainya target IKK ini di tahun 2021.

- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



GAMBAR 29 CAPAIAN IKK 4.2 DARI KELOMPOK BPOM KLASTER 1

Capaian IKK 4.2 BBPOM di Semarang berada pada urutan **pertama** jika dibandingkan dengan balai seklaster, terlihat dari grafik di samping. Realisasi IKK ini melampaui target nasional (55%).



- **Faktor keberhasilan pencapaian nilai persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, diantaranya:**

1. Monitoring dan evaluasi terhadap keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang sudah dan belum ditindaklanjuti.
2. *Reminder* dan/ atau komunikasi ke pelaku usaha maupun pemangku kepentingan jika *timeline* penyampaian telah terlewati namun feedback belum diterima.
3. Kompetensi inspektur yang baik dan selalu *up date* mampu memberikan keputusan/ rekomendasi sesuai dengan ketentuan.
4. Tersedianya peraturan dan standar operasional terkait tindak lanjut pengawasan yang jelas dan mutakhir.
5. Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha dalam menyusun CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*), serta peran aktif maupun komitmen untuk selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus.
6. Partisipasi aktif dari dinas terkait/ lintas sektoral, termasuk organisasi profesi; untuk melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dari BBPOM di Semarang.
7. Koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait/ pemangku kepentingan.
8. Tersedianya Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang obat dan makanan tahun 2020, sehingga memudahkan lintas sektor terkait untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi dari BBPOM di Semarang, serta menyelenggarakan pelatihan/ bimtek kepada pelaku usaha.
9. Adanya Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dimana BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan bersinergi dengan pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Pembinaan kepada pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi yang diterima, baik secara langsung pada saat pemeriksaan setempat maupun penyelenggaraan kegiatan sosialisasi/ pelatihan, seperti: Sosialisasi Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB) tanggal 14 Juli 2020.
2. Peningkatan kompetensi inspektur dan *up date* ilmu yang terus dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal.
3. Pelatihan/ sosialisasi/ bimtek kepada pelaku usaha termasuk lintas sektor terkait, dengan narasumber BBPOM di Semarang maupun Badan POM RI, baik secara *daring* maupun *luring*, yang sebagian penyelenggaraannya menggunakan dana DAK.



4. Desk CAPA kepada penanggung jawab/ pemilik sarana, baik yang dilakukan langsung oleh inspektur balai maupun bersama petugas pusat.

- **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya yang terealisasi dan menunjang pencapaian IKK ini, yaitu :

1. Telah diterbitkannya peraturan terbaru tentang pedoman tindak lanjut sangat membantu inspektur dalam menetapkan keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang disampaikan ke pelaku usaha dan lintas sektor/ pemangku kepentingan.
2. Adanya penambahan sumber daya manusia, memperlancar proses administrasi penyelesaian keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi.

Dalam rangka *continuous improvement* untuk peningkatan kinerja tahun selanjutnya direkomendasikan sebagai berikut :

1. Sarana penunjang seperti komputer, *scanner* dan printer di Seksi Inspeksi masih belum memadai. Alat pengolah data yang tersedia belum mencakup untuk setiap inspektur, dan sebagian peralatan sudah rusak atau tidak dapat digunakan. Pemutakhiran dan *up date* alat pengolah data sangat penting guna mendukung kelancaran penyelesaian keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi.
2. Kelancaran penggunaan aplikasi sipt dan *smart bpom*, diharapkan akan memudahkan penyampaian, tindak lanjut oleh lintas sektor terkait, serta monitoring dari keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan BBPOM di Semarang.

IKK 4.3 Persentase Keputusan Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

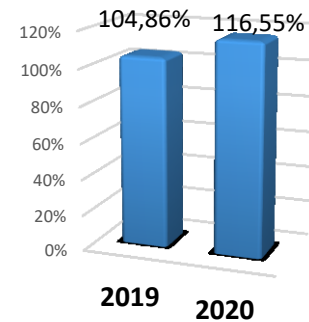
Keputusan penilaian sertifikasi meliputi Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT, hasil pemeriksaan sarana produksi Suplemen Kesehatan dalam rangka pendaftaran produk, surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik, surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar, Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB, Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan Obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan, Surat rekomendasi hasil pemeriksaan importir kosmetik/ obat tradisional/ suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kosmetik, SK, dan Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga. Capaian keputusan penilaian sertifikasi tepat waktu BBPOM di Semarang tahun 2020 dengan target 85% dan realisasi 99,09% adalah sebesar **116,58%** dengan kategori **SANGAT BAIK**.



- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

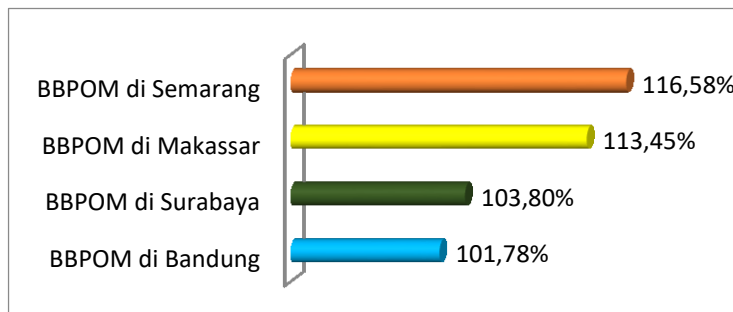
Jika dibandingkan dengan tahun 2019, capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 11,69%, yaitu dari 104,86% menjadi 116,58%.

Realisasi 99,09% telah melampaui target tahun 2021 (92%) bahkan sampai akhir periode renstra tahun 2024 (97%); maka BBPOM di Semarang hanya perlu mempertahankan atau meningkatkan capaiannya.



GAMBAR 30 PERBANDINGAN CAPAIAN IKK 4.3 TAHUN 2019-2020

- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



GAMBAR 31 CAPAIAN IKK 4.3 DARI KELOMPOK BPOM KLASER 1

Dari gambar di samping bisa dilihat bahwa capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dari BBPOM di Semarang memiliki capaian paling tinggi, yaitu sebesar 116,55%; serta realisasi (99,07%) melampaui target nasional (85%)

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam meningkatkan persentase keputusan penilaian sertifikasi tepat waktu tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan antara lain :

- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berkesinambungan antara lain Inspektur Pangan Junior, Inspektur CPKB Junior serta Inspektur CPKB Senior .
- Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif percepatan pemenuhan dokumentasi CPOTB terhadap pelaku usaha OT yang belum mempunyai sertifikat CPOTB bertahap.
- Melakukan desk evaluasi CAPA untuk PBF yang kesulitan dalam menindaklanjuti temuan dalam rangka sertifikasi CDOB.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pemenuhan timeline pelayanan sertifikasi sesuai dengan SOP.
- Melakukan bimtek/sosialisasi kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dalam rangka menyelesaikan proses sertifikasi

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

TABEL 14 JUMLAH LAYANAN SERTIFIKASI TAHUN 2020

Layanan Sertifikasi	Jumlah Permohonan/ Keputusan Diselesaikan	Jumlah Keputusan Tepat Waktu	%
Surat Keterangan Impor (SKI)	2612	2607	99,81
Surat Keterangan Ekspor (SKE)	1385	1385	100
Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	414	382	92,27
Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	630	620	98,41
Total	5041	4994	99,07

Kegiatan tahun 2020 yang menunjang keberhasilan penilaian sertifikasi yang dilakukan tepat waktu antara lain telah dilakukannya layanan pemberian rekomendasi sarana produksi/ distribusi/ importir/ eksportir dengan rincian terlihat pada tabel di samping

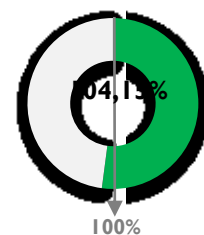
- Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang dilaksanakan tepat waktu untuk BBPOM di Semarang tahun 2020 mencapai 116,55%. Capaian ini naik dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini tidak lepas dari peningkatan pelayanan sertifikasi dengan melakukan bimtek-bimtek bagi pelaku usaha.

IKK 4.4 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

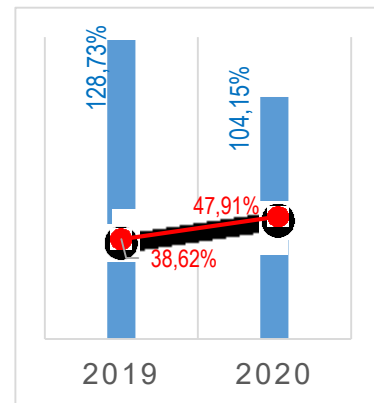
- Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan (MK) tahun 2020 adalah 47,91% dimana persentase capaian terhadap target (46%) sebesar **104,15%** dengan **kriteria BAIK**. Cakupan sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa meliputi sarana produksi obat, sarana produksi OT (UKOT, UMOT, IOT, IEBA), sarana produksi SK, sarana produksi kosmetik (golongan A dan B), sarana produksi pangan (MD dan IRTP).



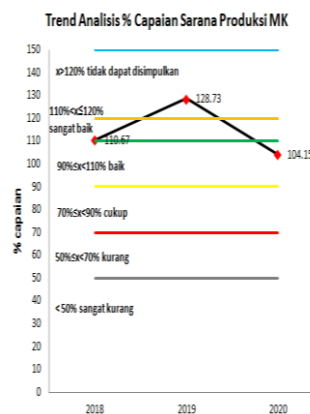
- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, capaian (diagram batang) sarana produksi obat dan makanan yang MK mengalami penurunan sebesar 24,58% karena adanya kenaikan target di tahun 2020 sebesar 16%. Namun persentase sarana yang MK (kurva garis) mengalami kenaikan sebesar 9,29% di banding tahun 2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 capaian kinerja persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan **lebih baik** dibanding tahun 2019. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan 5 tahun terakhir



GAMBAR 32 GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN IKK 4.4 TAHUN 2019-2020

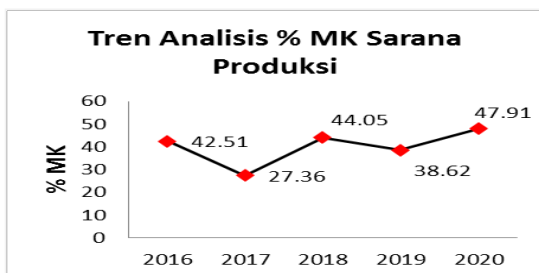
% Capaian hanya bisa dilakukan tren analisis dari tahun 2018 s/d tahun 2020 karena di tahun sebelumnya % MK sarana tidak memiliki target. Tren analisis menunjukkan fluktuasi selama tahun terakhir disebabkan perubahan target dan perubahan jumlah %MK sarana tiap tahunnya. Dimana setiap tahun target mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.



GAMBAR 33 TREND ANALISIS %CAPAIAN SARANA PRODUKSI MK

Tahun	% Target	% MK	% Capaian
2016	-	42,51	
2017	-	27,36	
2018	39,8	44,05	10,67
2019	30	38,62	28,73
2020	46	47,91	04,15

TABEL 15 CAPAIAN SARANA PRODUKSI YANG MEMENUHI KETENTUAN



GAMBAR 34 TREND ANALISIS % MK SARANA PRODUKSI

Untuk trend analisis % MK sarana selama 5 tahun terakhir bersifat *fluktuatif*. Namun dari grafik dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase sarana produksi obat dan makanan yang MK selama periode 5 tahun terakhir yang **tertinggi** yaitu di tahun 2020.

BBPOM di Semarang masih harus meningkatkan kinerjanya di tahun 2021 untuk mencapai target 51%, dibutuhkan kenaikan persentase sebesar 3,09% dari realisasi tahun 2020 (47,91%).

- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



GAMBAR 35 CAPAIAN IKK 4.4 DARI KELOMPOK BPOM KLASER 1

Capaian IKK 4.4. dibandingkan dengan balai seklaster, maka capaian BBPOM di Semarang menempati urutan ke-3 setelah BBPOM di Bandung dan BBPOM di Surabaya. Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang MK BBPOM di Semarang 47,91% belum mencapai target nasional yang dicanangkan (50%)

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di tahun 2020 berada dalam rentang kriteria **Baik** dan merupakan capaian **tertinggi** selama periode 5 tahun terakhir. Hal yang mendukung pencapaian tersebut antara lain :

1. BBPOM di Semarang berupaya untuk selalu melibatkan lintas sektor dalam rangka pembinaan kepada sarana produksi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal ini sebagai tindak lanjut Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah.
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota di seluruh Jawa Tengah untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan sarana produksi obat dan makanan di Jawa Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 03 Desember 2020.
3. Adanya penetapan kriteria hasil pemeriksaan sarana produksi yang memenuhi ketentuan terutama untuk sarana produksi kosmetik dan sarana produksi obat tradisional.
4. BBPOM di Semarang ikut aktif menjadi narasumber untuk kegiatan bimbingan teknis kepada penanggungjawab/ pelaku usaha di bidang obat dan makanan yang diselenggarakan oleh pemda yang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Badan POM. Kabupaten/ Kota yang memperoleh DAK untuk pengawasan sarana produksi pangan (IRTP) di Jawa Tengah tahun 2020 sebanyak 27 kabupaten/kota.
5. Selama masa pandemi Covid-19, BBPOM di Semarang tetap aktif melakukan pengawasan dan pembinaan sarana dengan menerapkan protokol kesehatan baik secara *onsite* maupun daring. Pengawasan secara daring terhadap sarana produksi obat, produksi pangan MD, produksi Kosmetik dan produksi obat tradisional.
6. BBPOM di Semarang mengadakan pendampingan dan pembinaan bagi UMKM Obat Tradisional di wilayah kerja dengan Program Sipemandu dari Kedepuyan 2 Badan POM



sehingga banyak UMKM Obat Tradisional yang mengajukan legalitas usaha dan mengajukan Sertifikasi CPOTB bertahap.

7. Meningkatnya kompetensi SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis, antara lain : Pelatihan Nasional Food Inspector Tingkat Dasar, Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior, Pelatihan Inspektur Kosmetik Senior.

- **Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis resiko dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan :

1. Pengawasan sarana produksi obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 16 HASIL PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

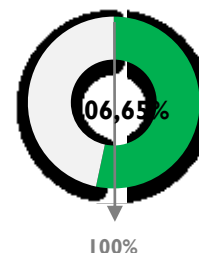
Pemeriksaan Sarana	Jumlah Diperiksa	Jumlah MK	Persentase MK
1. Produksi Obat (Industri Farmasi)	14	14	100%
2. Produksi Obat Tradisional :			
- IOT	9	8	88,89%
- IEBA	2	2	100%
- UKOT	50	25	50%
- UMOT	4	1	25%
3. Produksi Suplemen Kesehatan	5	4	80%
4. Produksi Kosmetik	38	18	47,37%
5. Produksi Pangan :			
- MD	186	84	45,16%
- IRTP	51	16	31,37%

- **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**
1. Hasil trend analisis % MK sarana selama 5 tahun terakhir bersifat fluktuatif menunjukkan belum adanya konsistensi dalam pemenuhan/ penerapan cara produksi yang baik. Oleh karena itu perlu terus dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha. Terutama untuk sarana produksi obat tradisional UMOT, sarana produksi pangan MD dan IRTP yang hasil %MK nya masih rendah dibawah target.
 2. Dengan dibentuknya Loka POM di Banyumas dan Kota Surakarta jangkauan pengawasan sarana produksi obat dan makanan menjadi lebih luas.
 3. Dalam penyusunan perencanaan pengawasan sarana produksi obat dan makanan berdasarkan kajian analisis resiko.
 4. Perlunya peningkatan kompetensi dan pengetahuan SDM sehingga pengawasan sarana menjadi lebih optimal, efektif dan *update* mengikuti perkembangan/ perubahan-perubahan yang terjadi.

IKK 4.5 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang MK tahun 2020 adalah 58,66% dimana persentase capaian terhadap target (55%) sebesar **106,65%** dengan **kriteria BAIK**. Cakupan sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa meliputi sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian, sarana distribusi OT dan SK, sarana distribusi kosmetik serta sarana distribusi pangan.



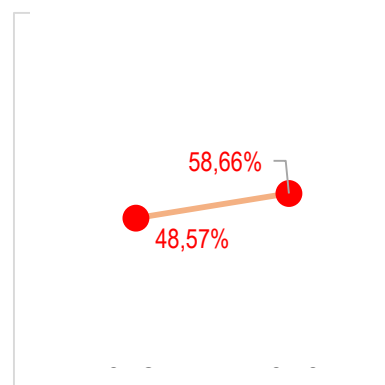
- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, %capaian (diagram batang) sarana distribusi obat dan makanan yang MK mengalami penurunan sebesar 14,76%.

Penurunan %capaian disebabkan adanya peningkatan persentase target capaian sarana yang MK dari tahun 2019 sebesar 15% dan perubahan definisi operasional (DO) dimana pada tahun 2019 definisi hanya mencakup sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian, sedangkan pada tahun 2020 mencakup semua sarana distribusi (distribusi obat dan pelayanan kesehatan, distribusi OT dan SK, distribusi kosmetik serta distribusi pangan).

Namun persentase sarana (kurva garis) yang MK naik sebesar 10,09% dibanding tahun 2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 capaian kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang MK **lebih baik/meningkat** dibanding tahun 2019.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan 5 tahun terakhir.



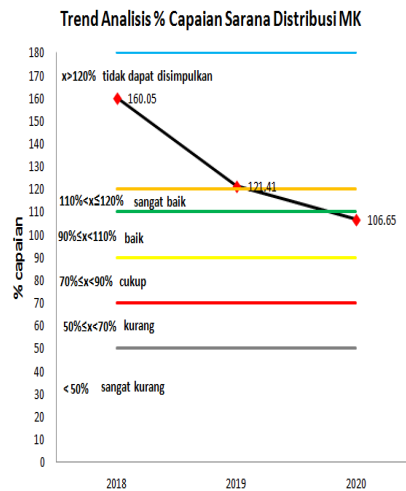
GAMBAR 36 GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN IKK 4.5 TAHUN 2019-2020



Capaian hanya bisa dilakukan tren analisis dari tahun 2018 s/d tahun 2020 karena di tahun sebelumnya %MK sarana tidak memiliki target. Tren analisis menunjukkan penurunan capaian selama 3 tahun terakhir. Hal ini disebabkan adanya perubahan definisi output di tahun 2020 dan adanya peningkatan target capaian dibanding tahun sebelumnya.

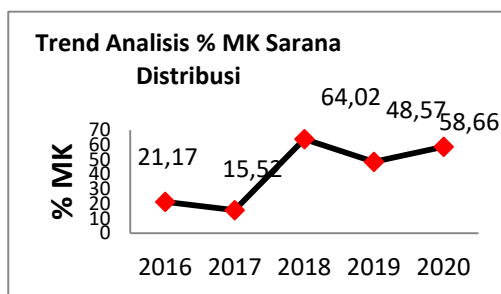
TABEL 17 TABEL CAPAIAN SARANA DISTRIBUSI YANG MEMENUHI KETETNTUAN

Tahun	% Target	% MK	% Capaian
2016	-	21,17	-
2017	-	15,52	-
2018	40	64,02	160,05
2019	40	48,57	121,41
2020	55	58,66	106,65



GAMBAR 37 TREND ANALISIS % CAPAIAN SARANA DISTRIBUSI MK

Peningkatan target untuk menggambarkan kondisi riil sebenarnya sehingga tidak terjadi lagi capaian yang berada di rentang kriteria tidak dapat disimpulkan



GAMBAR 38 TREND ANALISIS % MK SARANA DISTRIBUSI

Untuk tren analisis % MK sarana selama 5 tahun terakhir bersifat fluktuatif. Namun % MK di tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 dan merupakan nomor 2 tertinggi selama periode 5 tahun terakhir.

Realisasi tahun 2020 (58,66%) telah melampaui target tahun 2021 (57%), sehingga BBPOM di Semarang harus mempertahankan serta meningkatkan capaiannya.

- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



GAMBAR 39 CAPAIAN IKK 4.5 DARI KELOMPOK BPOM KLASER 1

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Semarang bila dibandingkan dengan BBPOM lain yang satu klaster, maka capaian BBPOM di Semarang menempati urutan ke-2 setelah BBPOM di Makassar. Namun % capaian BBPOM di Makassar berada pada kriteria tidak dapat disimpulkan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di tahun 2020 berada dalam rentang kriteria **Baik** dan **meningkat** dibandingkan tahun 2019. Hal yang mendukung pencapaian tersebut antara lain :

1. BBPOM di Semarang berupaya untuk selalu melibatkan lintas sektor dalam rangka pembinaan kepada sarana distribusi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Hal ini sebagai tindak lanjut Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah. BBPOM di Semarang terlibat sebagai anggota tim dan narasumber dalam penyusunan petunjuk teknis/pedoman operasional mekanisme pengawasan obat dan makanan oleh Tim Koordinasi.
2. BBPOM di Semarang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia di cabang dalam pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian maupun distribusi obat untuk meningkatkan efektifitas dalam pengawasan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana distribusi obat.
3. Untuk menekan penyalahgunaan obat di masyarakat, BBPOM di Semarang berkoordinasi dan bekerja sama dengan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat).
4. BBPOM di Semarang terlibat aktif dalam penyusunan draft Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Daerah (Perda) maupun rapat dengar pendapat dengan DPRD dalam rangka penyusunan regulasi di bidang obat dan makanan.
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota di seluruh Jawa Tengah untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan di Jawa Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 03 Desember 2020.
6. BBPOM di Semarang dalam masa pandemi Covid-19 tetap aktif menyelenggarakan bimbingan teknis/ sosialisasi yang dilakukan secara daring kepada para pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan pengetahuan para pelaku usaha di bidang distribusi obat dan makanan : Sosialisasi Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik (CRPB) terhadap sarana distribusi pangan ritel modern di wilayah Jawa Tengah tanggal 14 Juli 2020.
7. BBPOM di Semarang ikut aktif dalam memberikan narasumber untuk kegiatan bimbingan teknis kepada penanggungjawab/ pelaku usaha di bidang obat dan makanan yang diselenggarakan oleh pemda yang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Badan POM. Kabupaten/ Kota yang memperoleh DAK untuk pengawasan sarana pelayanan kefarmasian di Jawa Tengah tahun 2020 sebanyak 28 kabupaten/ kota.
8. BBPOM di Semarang secara berkala melakukan pendampingan dan monitoring evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran DAK Non Fisik tahun 2020 agar memberikan out



put yang maksimal dan serapan anggaran yang optimal. Pengawasan anggaran DAK juga dilakukan secara daring melalui Pertemuan Evaluasi Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 07 Juli 2020.

9. Selama masa pandemi Covid-19, BBPOM di Semarang tetap aktif melakukan pengawasan dan pembinaan sarana pelayanan kefarmasian dengan menerapkan protokol kesehatan baik secara *onsite* maupun secara daring terutama terhadap sarana-sarana yang memiliki kesiapan untuk dilakukan inspeksi secara daring, seperti Apotek dan Klinik.
10. Melaksanakan Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.
11. Mendukung program pemerintah dalam rangka Vaksinasi Covid-19 dengan ikut melakukan pembinaan dan pengawasan sarana pendistribusian terkait pemenuhan sarana prasarana dan kompetensi petugasnya.
12. Pengawasan pangan bersama lintas sektor melalui Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) Provinsi Jawa Tengah : sampling dan pengujian di Pasar Bintoro, Demak serta pembinaan kepada pedagang pasar dan edukasi kepada masyarakat sekitar. Tim JKPD yang terlibat meliputi BBPOM di Semarang, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Tanaman dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Biro Infrastruktur dan Sumberdaya Alam Sekda Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak.
13. BBPOM di Semarang menjadi Narasumber Pelatihan *District Food Inspector* (DFI) yang menghasilkan 35 Sanitarian dari 35 Puskesmas se-Kabupaten Banjarnegara yang mampu mendukung dan meningkatkan kualitas pengawasan pangan di kabupaten tersebut.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis resiko dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan :

1. Pengawasan sarana distribusi obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 18 HASIL PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

Pemeriksaan Sarana	Jumlah Diperiksa	Jumlah MK	Persentase MK
Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian	471	256	54,35%
Distribusi Obat Tradisional	147	68	46,26%
Distribusi Suplemen Kesehatan	28	26	92,86%
Distribusi Kosmetik	153	85	55,56%
Distribusi Pangan	287	202	70,38%
Total	1086	637	58,66%

- **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**
 1. Tren %MK sarana selama 5 tahun terakhir bersifat *fluktuatif*, hal ini menunjukkan belum adanya konsistensi dalam pemenuhan/ penerapan cara distribusi yang baik di sarana distribusi. Oleh karena itu perlu terus dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha. Terutama untuk sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian serta sarana distribusi obat tradisional yang hasil %MK nya masih rendah dibawah target.
 2. Dengan dibentuknya Loka POM di Banyumas dan Kota Surakarta jangkauan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan menjadi lebih luas.
 3. Dalam penyusunan perencanaan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan berdasarkan kajian analisis resiko.
 4. Perlunya peningkatan kompetensi dan pengetahuan SDM sehingga pengawasan sarana menjadi lebih optimal, efektif dan *update* mengikuti perkembangan/ perubahan-perubahan yang terjadi.

IKK 4.6 Indeks Pelayanan Publik (IPP) BBPOM di Semarang

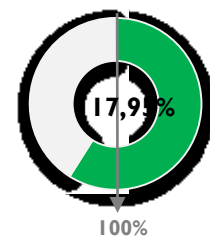
- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Salah satu indikator kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM sangat bermanfaat mendorong BBPOM di Semarang sebagai salah satu UPP Badan POM untuk terus menerus melakukan peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik menuju Pelayanan Prima yang menjadi kriteria evaluasi kinerja UPP oleh Kementerian PAN-RB. Nilai persepsi IPP yang diperoleh BBPOM di Semarang pada tahun 2020 berdasarkan hasil penilaian tim penilai internal kinerja UPP di lingkungan Badan POM adalah **4,14** dari target yang ditetapkan **3,51**. Berdasarkan hasil penilaian persepsi tersebut, kinerja UPP BBPOM di Semarang diasumsikan telah memenuhi target dengan persentase capaian **117,95%** dengan kriteria penilaian **SANGAT BAIK**.

Pengukuran IPP didasarkan atas 6 aspek komponen penilaian, yaitu : Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi Pelayanan.

Hal ini didukung upaya terus menerus BBPOM di Semarang dalam meningkatkan standar dan kinerja pelayanan publik. Seluruh aspek penilaian kinerja terus menerus ditingkatkan seperti perbaikan sarana dan prasarana unit pelayanan publik, peningkatan kompetensi SDM sebagai pelaksana layanan yang berhubungan langsung dengan pelanggan serta menciptakan terobosan dan inovasi baru untuk mempermudah akses pelayanan, juga mempersingkat waktu penyelesaian layanan yang diberikan.

Terdapat perbedaan hasil penilaian secara eksternal yang diselenggarakan oleh Tim Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB pada tahun 2020, UPP



BBPOM di Semarang memperoleh nilai IPP 3,39 dari skala maksimal 5 sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai UPP untuk memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi), dan pada tanggal 21 Desember 2020 UPP BBPOM di Semarang menerima penganugerahan predikat WBK dari Kementerian PAN-RB.

- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Indikator Kinerja IPP baru dimasukkan menjadi target penilaian pada tahun 2020, dengan menggunakan baseline capaian tahun 2019. Capaian IPP yang diperoleh BBPOM di Semarang pada tahun 2020, mengalami peningkatan yang signifikan sebesar **1,09** poin yaitu dari *baseline* **3,05** di tahun 2019 menjadi IPP **4,14** di tahun 2020.

Peningkatan capaian ini menunjukkan bahwa perbaikan pada setiap komponen/ aspek penilaian IPP yang dilakukan BBPOM di Semarang selama tahun 2020 memberikan hasil respon yang positif dari pengguna layanan publik. Pelaksanaan survei oleh Tim Penilai Internal Pelayanan Publik Badan POM mulai tahun 2020 menggunakan aplikasi Simolekdesi (Sistem Monitoring Elektronik dan Evaluasi Kinerja), tidak lagi secara manual seperti tahun sebelumnya, sehingga responden dapat secara langsung mengisi jawaban kuesioner yang terdiri dari 11 pertanyaan Unsur Pelayanan dan 6 pertanyaan terkait Anti Korupsi.

Perbandingan capaian nilai IPP BBPOM di Semarang selama lima tahun terakhir tidak dapat dilakukan, karena baseline nilai IPP untuk masing-masing UPP di lingkungan Badan POM baru ditetapkan pada Rencana strategis 2020-2024, di mana *base line* untuk nilai IPP BBPOM di Semarang pada tahun 2019 adalah **3,53**.

Namun sejak tahun 2017 sudah dilakukan petikan survey untuk beberapa UPP di lingkungan Badan POM yang bertujuan mengukur Kualitas pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi. Hasil survei tersebut menjadi penunjang Badan POM dalam penilaian sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu Pelayanan Publik yang Prima sesuai dengan PerMenPAN-RB No. 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Realisasi tahun 2020 (4,14) telah melampaui target tahun 2021 (3,76) dan tahun 2022 (4,01), sehingga BBPOM di Semarang harus mempertahankan serta meningkatkan capaiannya, atau dapat melakukan penyesuaian target.

- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklastr**

Penilaian persepsi IPP secara Nasional Badan POM merupakan hasil rata-rata dari 14 UPP Pusat bersama 33 UPP di daerah. Tahun 2020 selama di masa pandemi covid-19 Badan POM telah mengalihkan pelayanan publik menjadi full online sehingga meminimalkan kontak fisik untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badan POM juga mengawal pengembangan kandidat obat dan vaksin Covid-19 serta percepatan perizinan semua komoditi maupun penggunaan darurat obat dan vaksin Covid-19. Atas Inovasi yang telah dilakukan Badan POM, maka pada tahun 2020 Badan POM memperoleh penghargaan dari KeMenPAN RB sebagai role model pelayanan publik kategori A (Pelayanan Prima) dengan indeks **4,52** dari

nilai maksimal **5,0**. Bila dibandingkan dengan hasil Tim Internal Penilaian UPP Badan POM, perbandingan pencapaian nilai IPP BBPOM di Semarang pada tahun 2020 hanya sebesar **0,38** poin. Namun apabila dibandingkan dengan hasil penilaian IPP secara eksternal oleh Tim KeMenPAN-RB, maka selisih hasil penilaian UPP BBPOM di Semarang masih cukup besar yaitu menunjukkan masih sangat banyak komponen penilaian pada unit pelayanan publik BBPOM di Semarang yang harus ditingkatkan, terutama pada aspek Inovasi.



GAMBAR 40 CAPAIAN IKK 4.6 DARI KELOMPOK BPOM KLASTER 1

Apabila dibandingkan dengan balai seklastr BBPOM di Semarang berada di urutan pertama dan di atas rata-rata capaian seluruh balai/ nasional (113,06%)

Diperlukan upaya dan kerja keras untuk bisa meraih predikat pelayanan prima sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang menjadi target tahun 2021 dengan minimal IPP **4,51**.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Hasil survei pengukuran kualitas pelayanan publik kepada 50 responden pengguna pelayanan publik pada UPP BBPOM di Semarang pada periode 2020 menunjukkan peningkatan sehingga BBPOM di Semarang pada akhir tahun 2020 berhasil memperoleh predikat WBK. Keberhasilan ini antara lain ditunjang dengan adanya penyelenggaraan:

1. Penggalangan komitmen internal untuk mewujudkan BBPOM di Semarrang sebagai UPP yang berpredikat WBK di awal tahun dari seluruh jajaran, baik petugas yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pelanggan eksternal.
2. Internalisasi Reformasi Birokrasi kepada seluruh karyawan di setiap apel virtual pada hari Senin dan Kamis pagi untuk meningkatkan *sense of belonging* dan *sense of responsibility* terhadap keberhasilan program-program pelayanan publik dalam rangka mewujudkan zona integritas di lingkungan menuju WBK-WBBM.
3. Sosialisasi kepada masyarakat pengguna layanan publik BBPOM di Semarang, terkait pembangunan zona integritas, jenis layanan yang tersedia, peningkatan dan kemudahan akses pelayanan secara on line.
4. Perbaiki sarana prasarana pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh pelanggan pengguna layanan informasi dan pengaduan, layanan pengujian (penerimaan sampel) dan layanan penerbitan SKI/SKE, antara lain perbaikan/ renovasi ruang layanan sehingga menambah keindahan, kenyamanan bagi pelanggan, dan penambahan unit PC khusus untuk pelanggan.



5. Perbaiki aspek kebijakan pelayanan antara lain :
 - Penurunan *time line* penyelesaian hasil uji pihak ketiga, pemenuhan SLA (*Service Level Agreement*) dalam pelayanan penerbitan SKI/SKE dengan memperbesar bandwidth jaringan internet sehingga kendala yang sering terjadi saat proses evaluasi dokumen oleh pejabat pemeriksa, pejabat penindaklanjut dan pejabat pemberi rekomendasi dapat diatasi dan waktu penyelesaian proses menjadi lebih singkat.
 - Sosialisasi maklumat pelayanan yang ditandatangani Kepala BBPOM di Semarang ditempel di dinding ruang layanan dan dinding ruang tamu, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa halus (kromo inggil); sebagai jaminan kepada masyarakat bahwa mereka akan diberikan pelayanan terbaik, transparan, tanpa diskriminasi serta tepat waktu.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Beberapa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian nilai indeks pelayanan public tahun 2020 antara lain :

1. Forum Evaluasi Layanan dan Konsultasi Publik BBPOM di Semarang yang diselenggarakan via zoom dengan Nara sumber Bonita D. Sampurno (*Certified Image and Public Speaker*) dan Kepala BBPOM di Semarang Dra. I. Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt. Dalam forum konsultasi ini disampaikan tentang kiat-kiat membangun komunikasi efektif dengan pelanggan dan penjelasan terkait pelaksanaan Survei penilaian kualitas pelayanan publik. Dengan diselenggarakannya Forum konsultasi publik ini, para pengguna jasa layanan publik dan juga pelaksana / petugas layanan publik mendapatkan informasi penting dalam membangun komunikasi secara efektif. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah terbentuknya Group Whatsapp sebagai media komunikasi antara pelaku usaha, pengguna layanan publik lainnya dengan petugas layanan publik.
2. Mengedukasi para pelanggan baru pengguna layanan publik informasi dan pengaduan untuk memperluas wawasan dan pemahaman terkait proses pendaftaran maupun pembelajaran langsung menggunakan aplikasi e-registration pangan olahan, asrot (Aplikasi Sistem Registrasi on line Obat Tradisional), dll melalui program Sinau Online Sareng BBPOM di Semarang
3. Penyelenggaraan konsultasi secara online melalui *whatsapp* khusus untuk masing-masing jenis layanan (Layanan Pengujian : 081326759688; Layanan Sertifikasi : 081227701941, dan Layanan Informasi dan Pengaduan : 081225694252). Seluruh nomor layanan ini dipublikasikan secara luas melalui media sosial BBPOM di Semarang maupun di setiap pemaparan pada kegiatan KIE.

SK
5

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat Dan Makanan Di BBPOM Di Semarang

Pencapaian Sasaran Kegiatan ke-lima pada Tahun 2020 diukur dengan **4 (empat) indikator kinerja**, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 19 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN KELIMA

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IKK 5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	84,31	91.38	108.39%	Baik
IKK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	18	112,50%	Sangat Baik
IKK 5.3	Jumlah desa pangan aman	6	5,65	94,17%	Baik
IKK 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	3	100,00%	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5				103,77%	Baik

NPS SK 5 **sebesar 103,77** Penentuan tingkat efektifitas KIE Obat Dan Makanan dilaksanakan oleh Biro HDSP Badan POM melalui *link survey* yang disebarakan kepada responden. Indikator pembentuk tingkat efektifitas KIE terdiri atas 4 (empat) aspek :

- Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

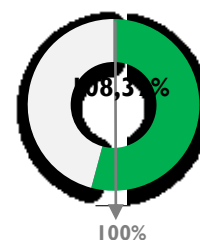
IKK 5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Penentuan tingkat efektifitas KIE Obat Dan Makanan dilaksanakan oleh Biro HDSP Badan POM melalui *link survey* yang disebarakan kepada responden. Indikator pembentuk tingkat efektifitas KIE terdiri atas 4 (empat) aspek:

- Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

tingkat efektifitas KIE BBPOM di Semarang dengan Loka POM di Surakarta dan Loka POM di Banyumas adalah 91,38 dengan target 84,31, sehingga capaian indikator ini adalah **108,39%** dengan **kriteria BAIK**.



- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019 maupun sebelumnya, karena merupakan indikator kinerja baru yang mulai diukur pada tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebesar 91,38 telah melampaui target tahun 2021, sehingga BBPOM di Semarang hanya perlu mempertahankan atau menaikkan capaiannya.

- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



GAMBAR 41 CAPAIAN IKK 5.1 DARI KELOMPOK BPOM KLASTER 1

Jika dibandingkan dengan balai seklaster, maka capaian IKK 5.1 BBPOM di Semarang di urutan kedua setelah BBPOM di Makassar.

Meskipun nilai Indeks efektivitas KIE memenuhi target namun masih berada di bawah rata-rata nasional 92,06, dengan selisih nilai 0,68. Karenanya

perlu usaha yang lebih keras untuk peningkatan tingkat efektifitas KIE.

KIE yang dilakukan berupa pemberian informasi, sebagai narasumber sesuai permintaan lintas sektor, KIE melalui media sosial, media elektronik/cetak, media luar ruang/ billboard/ baliho, Pameran, KIE bersama tokoh masyarakat dan Pramuka. Jumlah KIE di tahun 2020 adalah 6.545 KIE yang menasar pelaku usaha, masyarakat luas baik dari lingkungan sekolah dan akademisi, desa, tenaga kesehatan, pramuka, organisasi wanita, organisasi masyarakat, asosiasi pelaku usaha, maupun lintas sektor terkait.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

BBPOM di Semarang dengan Loka POM di Surakarta dan Loka POM di Banyumas telah melakukan beberapa hal untuk mendukung tercapainya tingkat efektifitas KIE, yaitu :

1. Kegiatan KIE secara tatap muka menjadi terhambat karena pandemic covid-19 tetapi upaya lain tetap dilakukan yaitu dengan melakukan KIE secara daring.
2. Penganekaragaman konten materi, terutama materi yang ditayangkan di media sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkini dari berbagai macam strata pendidikan dan usia.
3. Pemilihan narasumber yang kompeten, sesuai dengan kebutuhan peserta.
4. Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta/ *audience* yang akan mengikuti kegiatan, untuk memudahkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah :

1. Peningkatan frekuensi KIE melalui media sosial dengan setiap hari mengunggah berita-berita aktual dan juga membuat inovasi kegiatan SIULAN berupa siaran langsung melalui Instagram Live.
2. Peningkatan frekuensi tayangan atau konten informatif dan menarik melalui media elektronik/cetak dan memilih media yang paling banyak diakses oleh masyarakat.

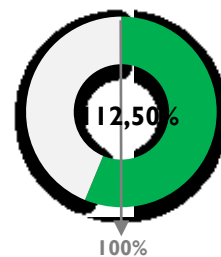
- **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

Rekomendasi yang disampaikan pada pengukuran kinerja indikator Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Obat dan Makanan Aman tahun 2019, telah diaplikasikan pada tahun 2020, lihat penjelasan faktor keberhasilan dan program/ kegiatan yang menunjang di atas.

IKK 5.2 Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Dengan adanya pandemic Covid maka kegiatan belajar mengajar secara langsung di sekolah ditiadakan, oleh karena itu Badan POM melakukan perbaikan terkait petunjuk pelaksanaan kegiatan. Beberapa tahapan mengalami perubahan disesuaikan dengan kondisi operasional sekolah. Program PJAS Aman merupakan kegiatan yang berkelanjutan dengan beberapa tahap kegiatan. Setelah melalui tahapan kegiatan diperoleh 18 sekolah dengan PJAS Aman dari target 16 sekolah di 3 kabupaten yang menjadi fokus kegiatan yaitu Kabupaten Brebes, Pemalang, dan Klaten, sehingga capaian indikator ini adalah **112,50%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**.



- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019 maupun sebelumnya, karena merupakan indikator kinerja baru yang mulai diukur tahun 2020.

Target tahun 2021 sebanyak 41 sekolah, target ini merupakan akumulasi dengan realisasi tahun 2020 dimana realisasi tahun 2020 adalah 18 sekolah sehingga target untuk tahun 2021 menjadi 23 sekolah. Target ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020, sehingga BBPOM di Semarang harus berusaha keras menaikkan capaiannya atau melakukan penyesuaian target tahun 2021.



- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklastr**



GAMBAR 42 CAPAIAN IKK 5.2 DARI KELOMPOK BPOM KLASTER 1

Jika dibandingkan dengan balai seklastr, maka capaian IKK 5.2 BBPOM di Semarang di urutan pertama dan di atas rata-rata capaian seluruh balai/ nasional (102,21%) dibandingkan balai seklastr.

Sampai dengan laporan ini disusun belum ada data standar nasional untuk IKK ini.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang mendukung tercapainya kriteria sangat baik (112,5%) adalah :

1. Peningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah melalui bimbingan teknis keamanan pangan, mampu membuat Kepala Sekolah/Guru dan Pengelola Kantin sebagai kader keamanan pangan menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah, dan mendorong kemandirian sekolah untuk melakukan pengawasan keamanan pangan dan penyebaran pesan keamanan pangan pada komunitas sekolah.
2. Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait berjalan dengan baik, serta didukung juga dengan komitmen lintas sektor terkait yang besar dalam mengimplementasikan kegiatan ini.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

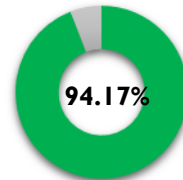
Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya :

1. Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan berupa buku, poster, permainan edukasl, dan flashdisk berisi materi-materi dan video tentang keamanan pangan yang dapat digunakan oleh komunitas sekolah sebagai referensi dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah.
2. Bersinergi dengan Kegiatan yang merupakan inovasi dari BBPOM Semarang yaitu kegiatan Layanan Laboratorium Melayani Sekolah dan Masyarakat (Layla Mesem) yang juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan komunitas sekolah pada keamanan pangan dan mendekatkan layanan laboratorium BBPOM di Semarang pada masyarakat, sehingga kegiatan dapat menunjang keberhasilan indikator ini.

IKK 5.3 Jumlah Desa Pangan Aman

- Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Pada kegiatan Desa Pangan Aman, desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting. Target jumlah desa yang akan diintervensi mengalami penurunan pada bulan April sehubungan dengan adanya pandemik Covid 19 yang berdampak di seluruh wilayah Indonesia dan mengakibatkan refocusing anggaran untuk penanganan pandemik. Jumlah desa yang diintervensi semula 9 desa menjadi 6 desa di 3 kabupaten yaitu 2 desa dari tiap kabupaten yaitu Kabupaten Pemalang, Brebes dan Klaten yang menjadi lokus kegiatan, yaitu Desa Malahayu dan Desa Kaliwlingi di Kabupaten Brebes, Desa Banjardawa dan Desa Banyumudal di Kabupaten Pemalang, serta Desa Candirejo dan Desa Randusari di Kabupaten Klaten. Pada keenam desa tersebut telah dilaksanakan seluruh rangkaian tahapan intervensi, namun ada 1 Desa yang tidak selesai diintervensi (hanya sampai tahap pelatihan kader) yaitu Desa Banyumudal dikarenakan desa tersebut menutup akses masuk warga dari luar dan menghentikan kegiatan dengan alasan ada warga yang meninggal karena Covid-19 sehingga capaian dari indikator ini adalah 94,17% dengan Kriteria **BAIK**. Namun demikian tahapan kegiatan yang belum dilaksanakan tersebut akan tetap dilaksanakan dalam bentuk pengawalan pada tahun 2021.

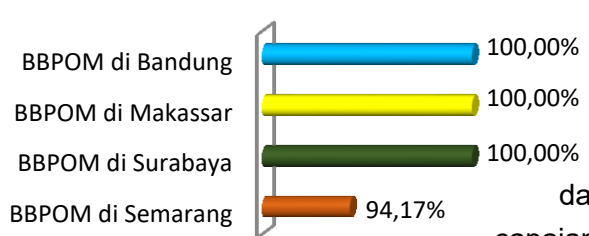


- Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019 maupun sebelumnya, karena merupakan indikator kinerja baru yang mulai diukur pada tahun 2020.

Target tahun 2021 sebanyak 19, yang merupakan akumulasi dengan realisasi tahun 2020, sehingga BBPOM di Semarang harus berusaha keras menaikkannya atau melakukan penyesuaian target tahun 2021.

- Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



Berdasarkan grafik disamping, capaian realisasi BBPOM Semarang di urutan keempat dibandingkan dengan capaian Balai lain yang se klaster, dengan capaian 94,17%, dan capaian BBPOM di Semarang di bawah rata-rata capaian seluruh balai/ nasional (100,28%).

GAMBAR 43 CAPAIAN IKK 5.3 DARI KELOMPOK BPOM KLASTER 1

BBPOM Semarang tidak dapat mencapai target karena meskipun kinerja telah dioptimalkan tetapi kegiatan terpaksa tidak dapat diselesaikan karena terkendala pandemic Covid-19.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Komitmen tinggi perangkat desa, tim keamanan pangan desa maupun dari kader keamanan pangan desa dalam mengimplementasikan keamanan pangan di desanya.
2. Komitmen dan kerjasama yang baik dari lintas sektor terkait.
3. Kegiatan Desa Pangan Aman ini tetap dilaksanakan walaupun di masa pandemic covid-19 namun tetap disiplin dengan protokol kesehatan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Beberapa hal telah dilakukan oleh BBPOM Semarang untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini, yaitu :

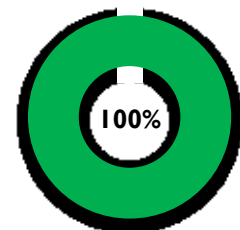
1. Melakukan komunikasi yang baik dengan pihak desa dalam menentukan personil yang akan ditunjuk sebagai tim keamanan pangan desa dan juga kader keamanan pangan desa sehingga terpilih orang-orang yang aktif dan berdedikasi tinggi.
2. Melakukan pengawalan/ pendampingan intensif dalam penyiapan dokumen perencanaan program keamanan pangan mandiri baik dengan dana desa, atau integrasi dengan program lain.
3. Mensinergikan program GKPD dengan kegiatan inovasi Pangan unggulan sehat, keamanannya terjaga dan bergizi (Panggul Sekzi) berupa kegiatan pembinaan kepada sentra produksi pangan industri rumah tangga yang masih menggunakan bahan berbahaya pada proses produksinya, sehingga produk yang dihasilkan aman dan bebas bahan berbahaya.

IKK 5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Pasar yang diintervensi sebanyak pasar, yaitu : Pasar Ketanggungan di Kabupaten Brebes, Pasar Banjardawa di Kabupaten Pemasang, dan Pasar Tanjung di Kabupaten Klaten.

Pada tahun 2020, target untuk indikator 'Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya' adalah 3 dan ketiga pasar diatas telah melalui seluruh rangkaian tahapan intervensi, sehingga capaian indikator ini adalah 100,00%.



- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019 maupun sebelumnya, karena merupakan indikator kinerja baru yang mulai diukur tahun 2020.

Target tahun 2021 sebanyak 10, target ini merupakan akumulasi dengan realisasi tahun 2020 dimana realisasinya sebanyak 3 pasar dan target tahun 2021 sebanyak 7 pasar, sehingga BBPOM di Semarang harus berusaha keras menaikkan capaiannya atau melakukan penyesuaian target tahun 2021.

- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklastr**



Berdasarkan grafik disamping, capaian kinerja seluruh BBPOM seklastr adalah sama yaitu 100%. dan di atas rata-rata capaian seluruh balai/ nasional (98,03%).

Sampai dengan laporan ini disusun belum ada data standar nasional untuk IKK ini.

GAMBAR 44 CAPAIAN IKK 5.4 DARI KELOMPOK BPOM KLASER 1

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang mendukung tercapainya target indikator jumlah pasar aman dari bahan berbahaya adalah

1. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan komunitas pasar tentang keamanan pangan dan bahan berbahaya setelah mengikuti pelatihan dalam bentuk penyuluhan kepada komunitas pasar yaitu pedagang pasar, pengunjung pasar dan masyarakat lainnya.
2. Pengelola pasar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya secara mandiri dan melaporkan.
3. Partisipasi pengelola pasar dalam menerapkan CRPB di pasar rakyat
4. Dukungan serta komitmen penuh dari lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan program pasar aman dari bahan berbahaya.



- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Keberhasilan capaian indikator ini ditunjang dengan beberapa kegiatan seperti :

1. Penyediaan Pojok Informasi bagi masyarakat pengunjung pasar. Pada Pojok Informasi tersebut masyarakat diberikan KIE tentang Keamanan Pangan, Cek KLIK dan aplikasi BPOM Mobile/Cek BPOM, Call Centre BPOM dan ULPK BBPOM/BPOM, serta masyarakat dapat meminta pengujian cepat terhadap pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya.
2. Bersinergi dengan kegiatan yang inovasi BBPOM di Semarang yaitu Layanan Laboratorium Melayani Sekolah dan Masyarakat (Layla Mesem) yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan komunitas pasar pada keamanan pangan dan mendekatkan layanan laboratorium BBPOM di Semarang pada masyarakat.

SK

6

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk Dan Pengujian Obat Dan Makanan Di BBPOM Di Semarang

Pencapaian Sasaran Kegiatan ke-enam pada Tahun 2020 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 20 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN KEENAM

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IKK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,00%	100,00%	108,70%	Baik
IKK 6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,00%	100,00%	111,11%	Sangat Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6				109,91%	Baik

NPS SK 6 sebesar 111,66% menggambarkan bahwa **efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat Dan Makanan di BBPOM di Semarang telah tercapai** dengan kategori **BAIK**.

IKK 6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Target indikator kinerja ini untuk tahun 2020 adalah 92,00% dan realisasinya sebesar 100,00%, dengan capaian kinerja 108,70% artinya telah melampaui target yang ditetapkan.



Indikator kinerja ini tersusun dari 2 komponen yaitu:

- a) Perbandingan jumlah sampel obat, OT, SK, dan kosmetik yang diperiksa sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun.
Definisi pemeriksaan sesuai ketentuan meliputi pemeriksaan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.
- b) Perbandingan jumlah sampel obat, OT, SK, dan kosmetik yang diuji sesuai standar dengan jumlah target sampel setahun.
Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pengujian parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam pedoman sampling.

- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir karena memiliki definisi operasional indikator yang berbeda.

Realisasi tahun 2020 (100,00%) telah melampaui target tahun 2021 (92,50%), tahun 2022 (93,00%), tahun 2023 (93,50%), maupun tahun 2024 (94,00%), namun BBPOM di Semarang akan terus berusaha meningkatkan persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



GAMBAR 45 CAPAIAN IKK 6.1 DARI KELOMPOK BPOM KLASER 1

Pada grafik di samping terlihat capaian BBPOM di Semarang masih di bawah balai lain dalam 1 klaster, namun capaian melebihi standard nasional sebesar 82,00%.

Parameter uji kritis adalah parameter uji yang ditetapkan berdasarkan kajian risiko keamanan dan mutu yang dapat berpengaruh langsung pada kesehatan dengan mempertimbangkan

bentuk sediaan dan sifat kimia fisika zat aktif. Parameter uji kritis telah ditetapkan dalam Pedoman Sampling Obat dan Makanan tahun 2020.

TABEL 21 JUMLAH SAMPEL YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Jenis Sampel	Target sampel	Jumlah Sampel yang diperiksa sesuai standar	Jumlah Sampel Yang diuji sesuai standar
Obat & Napza	566	571	571
OT	423	423	420
SK	144	144	144
Kosmetika	827	830	827
Jumlah	1960	1968	1962

Pada tahun 2020 telah diperiksa sampel obat, OT, SK, dan kosmetik sebanyak 1968 melebihi target yaitu 1960 sampel, dan telah diuji sesuai standar sebanyak 1962. Enam (6) sampel tidak diuji karena merupakan sampel TIE (4 sampel), ED (1 sampel) dan rusak (1 sampel).



- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

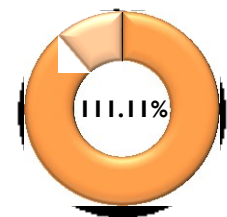
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan laboratorium pengujian BBPOM di Semarang dalam memenuhi pengujian sesuai standar pada tahun 2020 diantaranya:

1. Pelatihan teknis pengujian dan bimbingan teknis yang secara kontinyu dilakukan untuk personil-personil pengujian.
2. Aktif melakukan kegiatan untuk menjaga mutu pengujian melalui uji profisiensi, kolaborasi, melaksanakan verifikasi metode Analisa dan kalibrasi alat-alat laboratorium
3. Konsisten menerapkan Sistem Mutu dengan diperolehnya sertifikat ISO /IEC 17025:2017 pada bulan Januari 2020

IKK6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Pada tahun 2020 telah diperiksa sampel makanan sebanyak 892 sampel dari target 841 sampel, dan semua sampel telah diperiksa dan diuji sesuai standard, sehingga realisasi hasil pengujian sampel makanan adalah sebesar 100,00% dari target 90,0%. Capaian kinerja untuk pengujian sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sebesar 111,11%, termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.



Pada sampel makanan, indikator ini juga tersusun dari 2 komponen yaitu:

1. Perbandingan jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun,
Definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.
2. Perbandingan jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun.
Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pengujian parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam pedoman sampling.

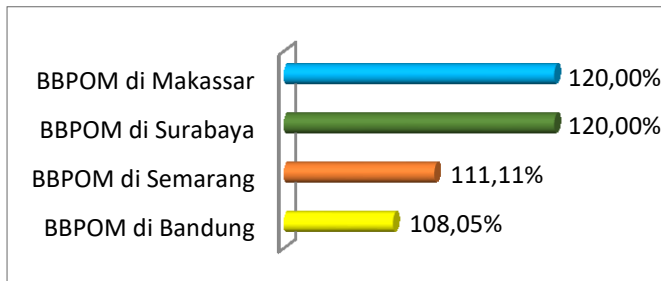
- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir karena memiliki definisi operasional indikator yang berbeda.

Realisasi tahun 2020 (100,03%) telah melampaui target tahun 2021 (90,50%), tahun 2022 (91,00%), tahun 2023 (91,50%), maupun tahun 2024 (92,00%), namun BBPOM di Semarang

akan terus berusaha meningkatkan persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



GAMBAR 46 CAPAIAN IKK 6.2 DARI KELOMPOK BPOM KLASER 1

Pada grafik di samping terlihat capaian BBPOM di Semarang apabila dibandingkan BBPOM seklaster, menempati urutan ketiga setelah BBPOM di Makassar dan BBPOM di Surabaya, namun semua BBPOM di Klaster 1 memperoleh capaian melebihi standar nasional sebesar 75,00%.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja antara lain disebabkan oleh kedisiplinan semua pihak dalam menepati ketentuan dan standar yang telah ditetapkan serta adanya monitoring dan pengawasan yang melekat dari atasan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

1. Pelatihan teknis pengujian dan bimbingan teknis yang secara kontinyu dilakukan untuk personil-personil pengujian.
2. Laboratorium pengujian pangan secara aktif melakukan kegiatan untuk menjaga mutu pengujian dengan mengikuti uji profisiensi baik dari provider internal P3OMN maupun provider dari eksternal seperti dari BBIA, PT Scheme Coordinator Thailand, kolaborasi metode, melaksanakan verifikasi metode Analis dan kalibrasi alat-alat laboratorium.
3. Konsisten dalam penerapan Sistem Mutu dengan diperolehnya sertifikat ISO /IEC 17025:2017 pada bulan Januari 2020.

SK
7

Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat Dan Makanan Di Wilayah Kerja BBPOM Di Semarang

Pencapaian Sasaran Kegiatan ketujuh pada Tahun 2020 diukur dengan **1 (satu) indikator kinerja**, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



TABEL 22 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN KETUJUH

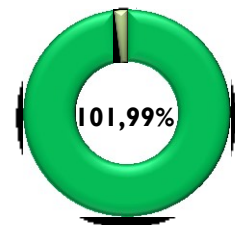
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IKK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00%	71,39%	101,99%	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7				101,99%	Baik

NPS SK 7 sebesar **101,99%** menggambarkan bahwa **efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang meningkat** dengan kategori **BAIK**.

IKK7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang di tahun 2020 merupakan indikator yang harus dicapai oleh BBPOM di Semarang, Loka POM di Surakarta dan Loka POM di Banyumas. Target persentase keberhasilan penindakan di BBPOM di Semarang pada tahun 2020 adalah sebesar 70 %.



Tahapan Penindakan yang dilakukan dalam perhitungan capaian keberhasilan penindakan, antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

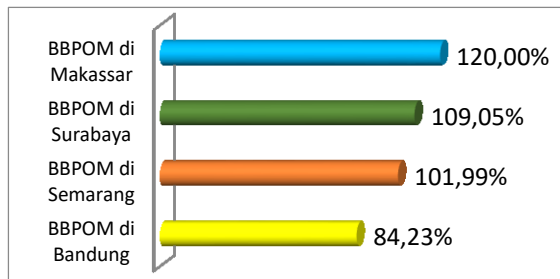
• Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir serta terhadap target jangka menengah

Sasaran strategis bidang penindakan BBPOM di Semarang yang ditetapkan tahun 2020 menggunakan parameter indikator yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 sasaran strategis bidang penindakan yaitu meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan dengan indikator data presentasi perkara yang diselesaikan hingga tahap II. Pada tahun 2020 ditetapkan sasaran strategis yang berbeda untuk bidang penindakan yaitu meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dengan indikator persentase keberhasilan penindakan

kejahatan di bidang Obat dan Makanan, sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Realisasi tahun 2020 (100,99%) telah melampaui target tahun 2021 (72,5%), tahun 2022 (75,00%), tahun 2023 (77,50%), maupun tahun 2024 (80,00%), namun BBPOM di Semarang akan terus berusaha meningkatkan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



GAMBAR 47 CAPAIAN IKK 7.1 DARI KELOMPOK BPOM KLASTER 1

Realisasi keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Semarang apabila dibandingkan BBPOM Klaster 1 lain, menempati urutan ketiga setelah BBPOM di Makassar dan BBPOM di Surabaya. Apabila dibandingkan dengan target nasional, capaian semua BBPOM di Klaster 1 melebihi target nasional yang ditetapkan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Terdapat beberapa kendala/hambatan yang ditemui selama melakukan kegiatan penindakan di tahun 2020 yang berpengaruh kepada capaian kinerja, antara lain:

1. Pandemi Covid-19, sehingga proses pemberkasan dan koordinasi dengan lintas sektor menjadi tertunda. Akibat pandemic Covid-19 Proses penindakan juga dilakukan di akhir tahun sehingga berdampak pada penanganan kasus menjadi *Carry Over*.
2. Kewenangan PPNS terkait penangkapan dan penahanan yang terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menaunginya, seperti saksi yang tidak menghadiri panggilan untuk BAP, sudah diterbitkan Daftar Pencarian Orang tetapi tidak diketahui keberadaannya sementara PPNS tidak mempunyai kewenangan untuk menangkap dan menahan.
3. Tersangka melakukan upaya hukum gugatan Pra Peradilan terhadap BBPOM di Semarang sebanyak 2 kali dimana hal tersebut mengakibatkan bertambah lamanya proses pemberkasan sehingga kasus tidak bisa diselesaikan hingga akhir tahun berjalan (*carry over*)
4. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan berubahnya pola budaya pada masyarakat, salah satunya adalah pergeseran budaya jual beli yang tidak lagi mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertatap muka atau bertemu langsung, termasuk kegiatan distribusi (jual/beli) obat dan makanan Tanpa Izin Edar, untuk melakukan jual beli atau kegiatan distribusi di masa sekarang ini para pihak bisa memanfaatkan beberapa



aplikasi *e-commerce* yang sudah menjamur di Indonesia. Hal ini mengakibatkan kegiatan distribusi obat dan makanan ilegal semakin sulit untuk terlacak, sehingga perlu adanya *upgrade* SDM di bidang IT dan juga *upgrade* sarana dan prasarana.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

TABEL 23 PENANGANAN CARRY OVER DI TAHUN 2020

Perkara tahun	Jumlah Carry Over	Status
2018	1	DPO
2019	7	1 DPO 6 Disidangkan

Pada tahun 2020, Bidang penindakan BBPOM di Semarang bersama Loka POM di Banyumas dan Loka POM di Surakarta masih menyelesaikan berkas perkara yang belum selesai (*Carry Over*)

pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebanyak 1 perkara dengan status tersangka DPO (Daftar Pencarian Orang) dan tahun 2019 sebanyak 7 perkara dengan status 1 perkara DPO dan 6 perkara lainnya telah disidangkan di tahun 2020. Sehingga total perkara *carry over* yang ditangani tahun 2020 oleh BBPOM Semarang beserta Loka POM di Banyumas dan Loka POM di Surakarta sebanyak 8 perkara.

Jumlah perkara yang ditangani tahun 2020 yaitu sebanyak 13 perkara pidana dengan rincian 9 perkara ditangani BBPOM di Semarang, 2 perkara ditangani Loka POM di Kabupaten Banyumas, dan 2 perkara ditangani Loka POM di Surakarta.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

{(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Tahap penyelesaian perkara di tahun 2020 sebagai berikut :

TABEL 24 TAHAP PENYELESAIAN PERKARA DI TAHUN 2020

No	Tahap	Jumlah
1	Carry over	8
2	SPDP	3
3	Tahap I	5
4	P21	1
5	Tahap II	4

Berdasarkan perhitungan capaian keberhasilan penindakan, pada tahun 2020 BBPOM di Semarang mendapatkan nilai capaian kinerja sebesar 71,39% sedangkan target yang harus

dicapai yaitu sebesar 70%. Sehingga persentase pencapaian kinerja BBPOM di Semarang apabila dibandingkan dengan target perkara adalah sebesar 101,99%.

CAPAIAN LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

SK
8

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI SEMARANG YANG OPTIMAL

Pencapaian Sasaran Kegiatan kedelapan pada Tahun 2020 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 25 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN KEDELAPAN

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IKK 8.1	Indeks RB BBPOM di Semarang	91	84,76	93,14%	Baik
IKK 8.2	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	81	77,49	95,67%	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8				94,40%	Baik

NPS SK 8 sebesar **94,40%** menggambarkan bahwa **BBPOM di Semarang telah mewujudkan tatakelola pemerintahan yang optimal** dengan kategori **BAIK**.

IKK8.1 Indeks RB BBPOM di Semarang

Indeks RB merupakan salah satu indikator pada sasaran strategis 8 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal. Bertujuan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dari waktu ke waktu.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja Menuju Predikat WBK/ WBBM adalah sebagai berikut:

Komponen pengungkit sebesar 60%

1. Manajemen Perubahan: bobot 8%
2. Penataan Tatalaksana: bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%



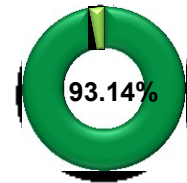
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Komponen hasil sebesar 40%:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

• **Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI), Indeks RB BBPOM di Semarang Tahun 2020 adalah 84.76. Dibandingkan dengan target Tahun 2020 sebesar 91, maka capaian Indeks RB BBPOM di Semarang sebesar 93.14% dengan kriteria Baik. Tahun 2020, BBPOM di Semarang berhasil meraih **Predikat WBK dari Kementerian PAN dan RB**.

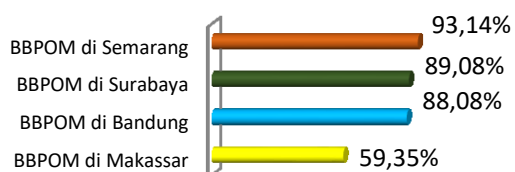


• **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Pencapaian realisasi kinerja Indeks RB BBPOM di Semarang pada periode tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 dan 5 tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena Indikator Kinerja ini adalah indikator baru yang ditetapkan periode tahun 2020 – 2024.

Dibandingkan terhadap target tahun 2021, maka BBPOM di Semarang masih harus meningkatkan kinerjanya di tahun 2021 untuk mencapai target 92, dibutuhkan kenaikan indeks sebesar 7,24 dari realisasi tahun 2020 (84,76).

• **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



GAMBAR 48 CAPAIAN IKK 8.1 DARI KELOMPOK BPOM KLASTER 1

Apabila dibandingkan dengan realisasi BBPOM Klaster 1, maka capaian realisasi Indeks RB BBPOM di Semarang menempati peringkat tertinggi. Jika dibandingkan dengan target Nasional (81) BBPOM di Semarang telah mencapai target Nasional dengan realisasi 84,76.

• **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Program/kegiatan yang telah dilakukan guna menunjang keberhasilan pencapaian target Indeks RB BBPOM di Semarang antara lain:

1. Upaya terus menerus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Hal ini terbukti pada tahun 2020 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat BBPOM di Semarang mengalami peningkatan menjadi 88.11 dari semula 86.51 pada tahun 2019 .

2. Komitmen BBPOM di Semarang untuk selalu memberikan Pelayanan Publik terbaik kepada seluruh masyarakat juga dibuktikan dengan diraihnya Penghargaan sebagai Unit Pelayanan Publik BPOM Tahun 2020 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik".
3. Dalam rangka Penguatan Pengawasan BBPOM di Semarang meluncurkan inovasi Laporan SiBOS (Lapor Gratifikasi dan *Whistle Blowing System*).
4. Penandatanganan "Komitmen membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)" sebagai bentuk komitmen pimpinan dan seluruh staf.
5. Pengendalian proses kegiatan sebagai bentuk implementasi RB dengan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD) Fraud Risk Assessment (FRA) dalam rangka penerapan Fraud Control Plan (FCP)* bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat II Badan POM, BPKP Provinsi Jawa Tengah, pelaku usaha dan lintas sektor terkait.
6. Penerapan Sistem Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten dan pada bulan Agustus 2020 berhasil mempertahankan status tersertifikasi ISO 9001:2015.

IKK8.2 Nilai AKIP BBPOM di Semarang

TABEL 26 KOMPONEN PENILAIAN INDEKS RB

Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2020
Perencanaan Kinerja	30	25,46
Pengukuran Kinerja	25	17,50
Pelaporan Kinerja	15	13,29
Evaluasi Internal	10	7,43
Capaian Kinerja	20	13,80
Nilai Hasil Evaluasi	100	77,49
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2019 pada BBPOM di Semarang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

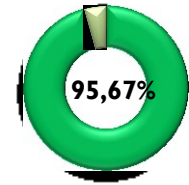
di Lingkungan Badan POM Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020, dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor B.PI.04.7.72.07.20.581 tanggal 1 Juli 2020. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang telah cukup akuntabel dan berkinerja baik serta memiliki manajemen kinerja yang handal dengan rincian seperti pada tabel di atas.

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana diatas, maka implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2019 di BBPOM di Semarang, dapat dikategorikan BB atau Sangat Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kerja, namun perlu terus ditingkatkan.



• **Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Berdasarkan Tabel 27 pada tahun 2020, pencapaian indikator nilai SAKIP BBPOM di Semarang adalah baik, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 95,67%.



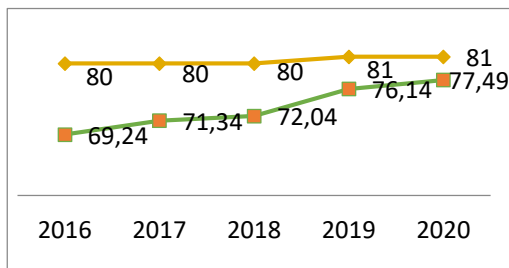
• **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

TABEL 27 PERBANDINGAN CAPAIAN NILAI AKIP BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020

2019			2020			Kriteria
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
81	76,14	94,00%	81	77,49	95,67%	Baik

Jika capaian tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat kenaikan

sebesar 1,67% dengan kriteria yang baik.

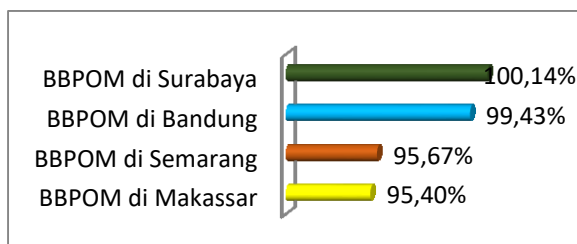


Berdasarkan grafik di samping menunjukkan bahwa realisasi selama 5 (lima) tahun masih di bawah target yang diharapkan tetapi nilai SAKIP dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

GAMBAR 49 PERBANDINGAN NILAI SAKIP 2016-2020

Dibandingkan terhadap target tahun 2021, maka BBPOM di Semarang masih harus meningkatkan kinerjanya di tahun 2021 untuk mencapai target 85, dibutuhkan kenaikan nilai sebesar 7,51 dari realisasi tahun 2020 (77,49).

• **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



GAMBAR 50 CAPAIAN IKK 8.2 DARI KELOMPOK BPOM KLASER 1

Dibandingkan dengan 3 (tiga) Balai yaitu Surabaya, Bandung dan Makassar, Semarang menempati posisi ke 3 (tiga). Tertinggi diraih oleh BBPOM di Surabaya mencapai 100,14%. Jika dibandingkan dengan target Nasional (81), BBPOM di Semarang belum mencapai target tersebut.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Seluruh instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja di setiap tahunnya, hal itu merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
2. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan pada BBPOM di Semarang
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya
5. Memberikan informasi kinerja pada BBPOM di Semarang
6. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas ada BBPOM di Semarang

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

1. Perencanaan

- a. Telah menerapkan sistem AKIP yang terdiri dari tahapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja BBPOM di Semarang. Penerapan sistem AKIP tersebut tercermin dalam berbagai dokumen yang meliputi Renstra, RKT, PK, IKU, dan Laporan Kinerja BBPOM di Semarang. BBPOM di Semarang telah menyusun Renstra yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target. Pada tahun 2019 telah dilakukan reviu Renstra 2015-2019 namun belum mengakomodir IKU tambahan, demikian juga dengan Renstra 2020-2024. Dalam hal implementasi Renstra, penyusunan anggaran tahun 2020 tidak mengacu pada Renstra 2020-2024 melainkan pada rencana kerja (Renja) dan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Renstra dan Renja.

- b. Telah menyusun RKT, PK dan IKU Tahun 2019 sedangkan PK dan IKU tahun 2020 yang selaras Renstra 2020-2024 belum selesai diformalkan. Pada PK yang disusun telah dilengkapi dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) namun belum dilakukan pemetaan atas kegiatan yang mendukung masing-masing indikator.

2. Pengukuran

- a. Telah mempublikasikan Renstra 2015-2019 dan 2020-2024, PK 2019 dan Laporan Kinerja tahun 2019 melalui website BPOM maupun subsite BBPOM di Semarang, namun publikasi terhadap IKU dan PK Tahun 2020 yang sesuai renstra 2020-2024 belum dilakukan.

- b. Pada tahun 2019 BBPOM di Semarang telah menyusun perjanjian kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV namun belum seluruhnya selaras dengan indikator di atasnya. Pada tahun 2020 telah dilakukan penyusunan kinerja sampai dengan



level individu namun belum selaras terutama terkait target kinerja yang diperjanjikan dan belum terdapat dokumen *formal cascading* kinerja.

- c. IKU BBPOM di Semarang telah direviu sehingga terdapat IKU tambahan sebagai karakteristik BBPOM di Semarang akan tetapi belum terdapat bukti pengukuran yang terdokumentasi.
- d. Telah memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja sesuai SOP POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.104.01 Perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan namun belum memuat mekanisme verifikasi dalam penyediaan data yang valid dan mekanisme jika terjadi kesalahan data capaian kinerja.
- e. Telah dilakukan pemantauan kinerja sampai dengan eselon IV akan tetapi belum terdapat pembahasan tentang kendala/hambatan untuk masing-masing indikator dan rencana tindak lanjutnya. Hasil pemantauan kinerja telah dijadikan salah satu dasar dalam penetapan kebijakan *reward & punishment* namun belum terdapat bukti implementasinya.

3. Pelaporan

- a. Telah disusun laporan kinerja dan telah disampaikan tepat waktu melalui esr.menpan.go.id. Laporan kinerja telah menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya, namun data yang disajikan masih di level kegiatan.
- b. Laporan kinerja BBPOM di Semarang TA 2019 telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU namun tidak dilengkapi dengan capaian pada IKU tambahan. Analisis capaian IKU juga belum seluruhnya disajikan. Masih terdapat perbedaan penyajian data capaian pada indikator "Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Tengah" pada pembahasan dengan lampiran.

4. Evaluasi Internal

Telah dilakukan evaluasi internal atas capaian kinerja setiap triwulan. Evaluasi kinerja belum dilakukan pada seluruh IKU, utamanya IKU Tambahan. Rekomendasi/arahan pimpinan atas hasil evaluasi kinerja belum terpantau tindaklanjutnya.

5. Capaian Kinerja

Sebagian besar kinerja BBPOM di Semarang TA 2019 tercapai sesuai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan TA 2018 rata-rata capaian kerjanya hampir sama dengan tahun sebelumnya dan terdapat indikator yang pengukurannya hanya dilaksanakan di periode akhir renstra 2015-2019. Masih terdapat IKU berupa IKU Tambahan yang tidak terukur capaiannya sehingga data capaian kinerja BBPOM di Semarang belum andal.

- **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

Terhadap kelemahan yang masih ada direkomendasikan kepada Kepala BBPOM di Semarang beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Melakukan reuiu Renstra 2020 - 2024 yang meliputi pemetaan sasaran dan indikator kinerja terhadap tujuan dan IKU selain yang telah ditetapkan Badan POM Pusat.
- b. Mempublikasikan dokumen IKU 2020-2024, PK 2020, dan RAPK 2020 pada salah satu media publikasi seperti Website BPOM/Subsite Unit/Sosial Media Unit yang mudah di akses oleh *stakeholder/masyarakat*;
- c. Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan;

2. Pengukuran

- a. Melakukan publikasi IKU dan PK sesuai Renstra 2020 - 2020 pada Website Badan POM/Subsite/Media sosial BBPOM di Semarang agar mudah di akses oleh *stakeholder/masyarakat*.
- b. Melakukan pengukuran terhadap seluruh IKU termasuk IKU tambahan dan mendokumentasikannya secara memadai.
- c. Mendokumentasikan pemantauan kinerja termasuk kinerja Eselon III dan IV secara memadai dengan memuat kendala/hambatan beserta rencana tindak lanjutnya.
- d. Menyempurnakan mekanisme pengumpulan data kinerja yang memuat mekanisme verifikasi dalam penyediaan data yang valid dan jika terjadi kesalahan data capaian kinerja.
- e. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
- f. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi *e-performance* BPOM.

3. Pelaporan

- a. Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja mengenai analisis efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran serta menyajikan kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra



- b. Menyempurnakan penyajian efisiensi sumber daya pada laporan kinerja yang memuat analisis penggunaan sumber daya pada level sasaran.
 - c. Menyempurnakan penyajian analisis seluruh capaian IKU termasuk IKU tambahan.
4. Evaluasi Internal
- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.
 - b. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan.
5. Capaian Kinerja
- Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.

**SK
9**

Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang Yang Berkinerja Optimal

Pencapaian Sasaran Kegiatan kesembilan pada Tahun 2020 diukur dengan **1 (satu) indikator kinerja**, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 28 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN KESEMBILAN

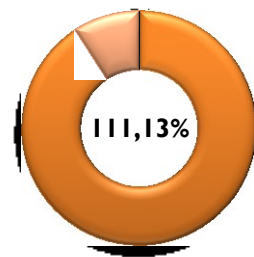
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IKK 9.1	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	77	85,57	111,13%	Sangat Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9				111,13%	Sangat Baik

NPS SK 9 sebesar **111,13%**, menggambarkan bahwa **BBPOM di Semarang** telah dapat mewujudkan **SDM yang berkinerja optimal** dengan kategori **SANGAT BAIK**.

IKK9.1 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN BBPOM di Semarang Tahun 2020 sebesar 85,57 dengan kategori tinggi. Dibandingkan dengan target tahun 2020 yaitu 77, maka indeks profesionalitas ASN ini telah memenuhi target dengan capaian sebesar 111,13%.

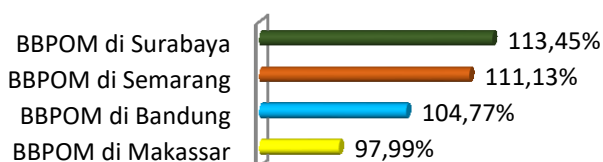


- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Pencapaian realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang pada periode tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir tidak dapat dilakukan karena Indikator Kinerja ini adalah indikator baru yang ditetapkan periode tahun 2020 – 2024.

Realisasi tahun 2020 (85,87) telah melampaui target tahun 2021 (82), tahun 2022 (83), tahun 2023 (84), maupun tahun 2024 (85), namun BBPOM di Semarang akan terus berusaha meningkatkan profesionalitas ASN di BBPOM di Semarang.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



GAMBAR 51 CAPAIAN IKK 9.1 DARI KELOMPOK BPOM KLASTER 1

Capaian Indeks Profesionalitas ASN di BBPOM di Semarang apabila dibandingkan BBPOM Klaster 1 lainnya, menempati urutan kedua setelah BBPOM di Surabaya. Jika dibandingkan dengan target Nasional (75), realisasi BBPOM di Semarang 85,57 sehingga telah melebihi target nasional yang ditetapkan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:



1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai (Bobot 25%)
2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan (Bobot 40%)
3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS (Bobot 30%)
4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami (5%)

Pada tahun 2020, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks Profesionalitas BBPOM di Semarang'. Pada triwulan III tahun 2020 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja di atas adalah:

1. Melakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan untuk setiap pegawai minimal 20 JP/tahun
2. Melakukan desiminasi pelatihan, sosialisasi dan webinar.
3. Meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk pegawai yang berpendidikan setingkat SMA, D3 maupun S1.
4. Melakukan bimbingan pegawai untuk mencapai nilai SKP yang baik
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan peraturan kepegawaian

• **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Pada tahun 2020, BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan kompetensi sebanyak 150 pegawai dari 153 pegawai (98,04%) melalui seminar, workshop, dan diklat teknis. Dari 150 pegawai tersebut, 8 orang pegawai merupakan CPNS Tahun 2019 yang mengikuti diklat fungsional pengawas farmasi dan makanan, sehingga membantu meningkatkan nilai pada komponen diklat fungsional, 3 pegawai lainnya (1,96%) merupakan pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar, dimana setiap 1 semester pembelajarannya setara dengan 20 jam pelajaran.

**SK
10**

*Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data Dan Informasi
Pengawasan Obat Dan Makanan*

Pencapaian Sasaran Kegiatan ke-lima pada Tahun 2020 diukur dengan **5 (lima) indikator kinerja**, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



TABEL 29 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN KESEPULUH

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IKK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	75,2	91,71%	Baik
IKK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	1,82	120,00%	Tidak dapat disimpulkan
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK10				105,86%	Baik

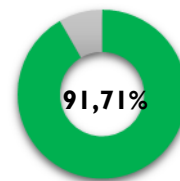
Nilai Pencapaian Sasaran SK10 105,86% dengan kategori baik, kedua capaian indikator tersebut dapat menggambarkan bahwa **BBPOM di Semarang telah dapat menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan.**

IKK 10.1 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Adapun cara perhitungannya diperoleh berdasarkan nilai assesmen ulang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN).

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Secara keseluruhan Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium BBPOM di Semarang adalah 75,2%, kurang dari nilai minimal GLP yang ditetapkan yaitu 82% dengan capaian kinerja sebesar **91,71%** termasuk kategori **BAIK**.



Target nilai minimal GLP yang ditetapkan oleh P3OMN adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi Personel laboratorium > 75,
3. Standar Peralatan Laboratorium > 70

Hasil assesmen GLP yang dilakukan P3OMN, BBPOM di Semarang tahun 2020 memperoleh nilai sebagai berikut :

TABEL 30 NILAI PEMENUHAN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM TAHUN 2020

	Standar P3OMN	Capaian BBPOM di Semarang
Standar Ruang Lingkup	65	70,30%
Standar Kompetensi Personel Lab	75	84,20%
Standar Peralatan Laboratorium	70	71,10%
Rata-rata	70	75,20%

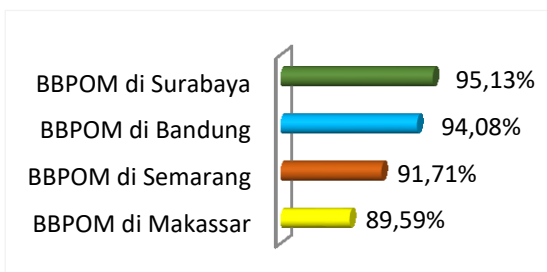


- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Penilaian kemampuan laboratorium BBPOM di Semarang Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan penilaian tahun 2019, karena perbedaan standar kemampuan laboratorium yang digunakan adalah Keputusan Badan POM Nomor HK.04.01.1.84.18. 2307 tahun 2018, sedangkan pada penilaian kemampuan Laboratorium 2020 menggunakan standar kemampuan Laboratorium sesuai Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 yang berlaku untuk tahun 2020-2024.

Laboratorium BBPOM di Semarang harus meningkatkan realisasinya sebesar 7,5% dari realisasi tahun 2020 agar target sebesar 83% di tahun 2021 tercapai.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (Pusat) dan Balai seklaster**



GAMBAR 52 CAPAIAN IKK 10.1 DARI KELOMPOK BPOM KLAS TER 1

Realisasi keberhasilan pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan BBPOM di Semarang sesuai standar GLP apabila dibandingkan BBPOM seklaster, menempati urutan ketiga setelah BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung. Apabila dibandingkan dengan target nasional, realisasi semua BBPOM Klaster 1 di atas target nasional yang ditetapkan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian target indikator kinerja ini antara lain

1. Pemeliharaan alat laboratorium dan pengadaan suku cadang alat lab yang dilaksanakan untuk memelihara fungsi dan kapasitas alat Laboratorium sehingga terpenuhi standar minimum alat laboratorium yang telah ditetapkan tidak seluruhnya bisa terpenuhi karena memerlukan anggaran yang besar.
2. Pengadaan baku pembanding secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan baku pembanding yang tidak tersedia di P3OMN.
3. Personel pengujian yang memperoleh kesempatan tugas belajar sebanyak 8 (delapan) orang mengakibatkan perubahan kompetensi personel di pengujian.



- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Analisis program/kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian minimal GLP

1. Laboratorium pengujian BBPOM di Semarang secara aktif mengikuti kolaborasi metode analisa, kolaborasi baku pembanding serta uji profisiensi untuk meningkatkan kemampuan uji dalam rangka memenuhi standar ruang lingkup parameter pengujian
2. Laboratorium melakukan pengujian sesuai metode analisis yang terbaru, sesuai dengan standar ruang lingkup pengujian yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024.

IKK 10.2 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Semarang yang Optimal

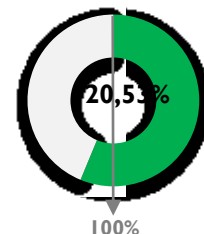
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dihitung dari Indeks Pemanfaatan System Informasi BPOM yang terdiri dari Sharing Folder, BCC, Berita Aktual, Email. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC yang diperoleh dari SIPT dan Spimker. Hasil penilaian indeks pengelolaan data dan informasi tahun 2020, sebagai berikut :

TABEL 31 HASIL PENILAIAN INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI TAHUN 2020

Data dan Informasi Mutakhir		Jumlah	Pemanfaatan Sistem Informasi				Jumlah	Total Nilai $i = c + h / 2$
SIPT (a) 80%	SPIMKer (b) 20%	$c = a + b$	Email (d)	Sharing Folder (e)	Dashboard BCC (f)	Berita Aktual (g)	$h = d+e+f+g/4$	
2,4	0	2,4	0	3	0	2	1,25	1,82
di manfaat kan	tidak dimanfaatkan		tidak dimanfaatkan	sangat di manfaat kan	tidak dimanfaatkan	dimanfaat kan	Kriteria	

- Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di BBPOM di Semarang. Realisasi 1,82 dibandingkan dengan target 1,51, maka capaian kinerja IKK ini adalah **120,53%** dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN.



- Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah

Realisasi indeks pemanfaatan *sharing folder* antara tahun 2020 dan tahun 2019 tidak dapat dibandingkan karena indeks pada tahun 2019 belum diperhitungkan.

Target tahun 2021 adalah 2, hanya selisih 0,18 dari realisasi tahun 2020, sehingga BBPOM di Semarang hanya perlu menaikkan sedikit realisasi di tahun selanjutnya.



- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan Balai seklastr**



GAMBAR 53 CAPAIAN IKK 10.2 DARI KELOMPOK BPOM KLASTER 1

Sesuai grafik perbandingan di samping, indeks pemanfaatan sistem informasi BBPOM di Semarang, ada di urutan ketiga setelah BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung. Belum ada standar/ target nasional untuk indikator ini.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Sharing Folder

Jika dihitung secara akumulasi banyaknya jumlah akses terhadap sharing folder, masih dalam kriteria sangat dimanfaatkan yang artinya jumlah akses dalam satu bulan melebihi 100, namun jika dilihat per bulannya pada bulan April, Mei dan Desember tidak mencapai 100 akses perbulan. Hal tersebut terjadi antara lain :

1. Belum semua petugas mengetahui adanya sharing folder.
2. Tidak semua petugas mengetahui dan mendapatkan akses masuk ke dalam sharing folder.
3. Berkaitan dengan masifnya kegiatan pengawasan yang dilakukan dilapangan misal ketika kegiatan intensifikasi menjelang perayaan hari besar keagamaan, kegiatan terpadu dengan lintas sektor dll.

Berita Aktual, SIPT, Spimker

Secara umum beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target:

1. Pengiriman dokumen elektronik ke Badan POM atau ke stakeholder masih memanfaatkan email unit saja, belum memanfaatkan email corporate individu.
2. Dashboard belum digunakan secara maksimal untuk melakukan penelusuran.
3. Belum semua rumah Sakit mengirimkan data SPIMKER secara periodik.
4. Data yang diinput tidak semuanya diverifikasi pada bulan yang sama.
5. Banyak kendala di sistem SIPT untuk melakukan input baik hasil pemeriksaan sarana maupun sampel.
6. SIPT belum berjalan maksimal, tidak dapat digunakan dari awal tahun, baru bisa digunakan pada bulan April 2020 dan masih banyak kendala di sistem.
7. Tersedia menu "Tiket" yang berfungsi menyampaikan kendala yang ditemui, tetapi lama mendapat respon oleh Pusdatin.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Data SPIMKER

Diperoleh dari data kasus keracunan yang diverifikasi dibandingkan dengan data kasus keracunan yang diinput oleh Rumah Sakit dalam aplikasi Spimker. Pada tahun 2020 TW 1 tidak ada data yang masuk ke dalam aplikasi SPIMKER, pada TW 2 jumlah data yang diinput 66 dan yang diverifikasi 28 (Indeks data = 48,41), TW 3 jumlah data yang diinput 66 dan yang diverifikasi 27 (Indeks data = 44,38), TW 4 jumlah data yang diinput 57 dan yang diverifikasi 29 (Indeks data = 50,89).

Data SIPT

Pada triwulan pertama, SIPT belum dapat dimanfaatkan oleh BBPOM di Semarang karena sistem yang belum siap dan masih dalam tahap penyempurnaan oleh Pusdatin. Hal ini yang menjadi dasar tidak ada target pada triwulan pertama.

TABEL 32 INDEKS PEMANFAATAN SIPT BBPOM DI SEMARANG

Triwulan	Target	Realisasi	Perhitungan (%)	Nilai Indeks	Komposit SIPT (80%)
2	4187	1442	34,44	0	0
3	4187	3192	76,24	2	1,6
4	4187	4133	98,71	2	1,6

Berita Aktual

Berita yang diupload adalah kegiatan yang melibatkan stake holder eksternal seperti KIE, Bimtek, Talkshow, Workshop dan sebagainya.

TABEL 33 PROFIL BERITA AKTUAL BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2020

Jenis Berita	Berita Aktual
Penindakan	4
Lintas Sektor/Stakeholder	22
Bimtek/Talkshow	27
Reformasi Birokrasi/WBK	8
Kepegawaian	11
Penandatanganan MOU	5
Pengawasan Obat dan Makanan	3
KIE	10
Laboratorium	5
QMS	1
Total	96

Email

Perhitungan pemanfaatan email BBPOM di Semarang Tahun 2020 sebesar 52,37% dan masuk dalam kategori tidak dimanfaatkan dengan nilai indeks 0. Dibandingkan dengan target tahun 2020 yaitu 70%, maka pemanfaatan email ini belum memenuhi target dengan capaian sebesar 74,81%.

Perhitungan indeks pemanfaatan email ini berdasarkan pada tiga aspek yaitu aspek login, aspek pemanfaatan unit dan aspek pemanfaatan individu. Tahun 2020 jumlah akun unit BBPOM di Semarang sebanyak 1 dan telah aktif dimanfaatkan sedangkan jumlah akun



individu sebanyak 151. Dari jumlah akun individu yang ada baru 90 akun yang aktif atau 59,6% akun yang dimanfaatkan.

- **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

Sharing Folder

- a. Sharing folder yang saat ini dikembangkan sangat bermanfaat dalam mendukung kinerja pengawasan UPT, terutama jika terjadi temuan ketidaksesuaian antara produk beredar dengan yang sudah terdaftar.
- b. Sharing folder mendukung kemandirian balai dalam mengakses informasi.
- c. Perlu ditingkatkan data pre market dan post market yang dapat diakses pada sharing folder, misal pada data produk obat tradisional label/penandaan yang disetujui belum semuanya dapat tersedia.

Email, SIPT, Spimker

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja:

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kesadaran seluruh pegawai agar selalu menggunakan email corporate dalam setiap urusan kedinasan.
2. Meningkatkan penggunaan email *corporate* dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik ke Pusat maupun *stakeholder*.
3. Menghimbau rumah sakit untuk aktif melaporkan data keracunan melalui SPIMKER.
4. Menghimbau data yang diinput semuanya diverifikasi pada bulan yang sama.
5. Menghimbau kepada lintas sektor terkait (seperti : Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, atau Laboratorium Kesehatan Daerah/ Labkesda Provinsi Jawa Tengah) untuk menyampaikan data hasil uji pengujian sampel KLB ke BBPOM di Semarang.
6. Agar SIPT dapat digunakan dari awal tahun sehingga input sampel, sarana dan hasil pengujian tidak menumpuk di pertengahan sampai dengan akhir tahun.
7. Melakukan pengembangan bitly kartu kendali pemeriksaan sarana di seksi inspeksi sehingga dapat digunakan untuk sistem monitoring input SIPT sarana, selain untuk monitoring tindak lanjut dan feedback CAPA dari sarana.
8. Komunikasi dan koordinasi secara aktif dengan Pusdatin Badan POM tentang kendala yang dihadapi terkait SIPT baik secara WAGrup atau melalui menu "Tiket".
9. Secara aktif melakukan monitoring realisasi input SIPT.

**SK
11**

TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI SEMARANG SECARA AKUNTABEL

Pencapaian Sasaran Kegiatan Kesebelas pada Tahun 2020 diukur dengan 2 (**dua**) indikator **kinerja**, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



TABEL 34 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN KESEBELAS

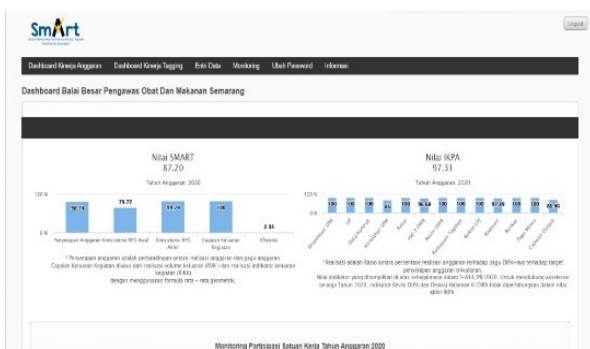
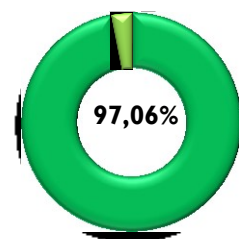
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
IKK 11.1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94	91,24	97,06%	Baik
IKK 11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	90,00%	100%	111,11%	Sangat Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11				104,08%	Baik

NPS SK 11 sebesar **104,08%** menggambarkan bahwa **BBPOM di Semarang telah mengelola Keuangan secara akuntabel** dengan kategori **BAIK**.

IKK 11.1 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang

- Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Semarang Tahun 2020 berdasarkan monev SMART DJA pada aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id adalah 91,24%. Nilai NKA sendiri diperoleh dari 40% nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan 60% Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Dari target yang telah ditetapkan (94%) diperoleh capaian 97,06% (Baik).



GAMBAR 54 DASHBOARD NILAI KINERJA ANGGARAN TW IV TAHUN 2020

IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

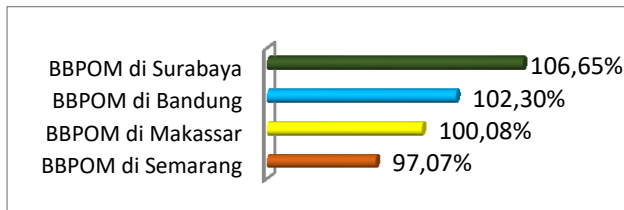
Sumber : Aplikasi Smart DJA 2020

- Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah**

Pencapaian realisasi kinerja Anggaran BBPOM di Semarang pada periode tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 maupun 5 tahun terakhir tidak dapat dilakukan karena Indikator Kinerja ini adalah indikator baru yang ditetapkan periode tahun 2020 – 2024.

Dibandingkan terhadap target tahun 2021, maka BBPOM di Semarang masih harus meningkatkan kinerjanya di tahun 2021 untuk mencapai target 94,5, dibutuhkan kenaikan nilai sebesar 3,26 dari realisasi tahun 2020 (91,24).

- **Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster**



GAMBAR 55 CAPAIAN IKK 11.1 DARI KELOMPOK BBPOM KLASER 1

Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Semarang apabila dibandingkan BBPOM Klaster 1 lainnya, menempati urutan terendah setelah BBPOM di Bandung, BBPOM di Makassar, dan BBPOM di Surabaya, dan belum mampu mencapai Standar Nasional (93).

- **Analisis penyebab kegagalan pencapaian kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai Nilai Kinerja Anggaran diantaranya melalui :

1. Monitoring dan evaluasi berkala oleh pimpinan mengenai penyerapan anggaran terhadap PoA (*Plan of Action*) dan RPD (Rencana Penarikan Dana) setiap minggu/bulan.
2. Masing-masing penanggung jawab kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penarikan Dana.
3. Mereviu anggaran yang diprediksi tidak terlaksana agar dialihkan ke bentuk kegiatan lain yang memiliki daya ungkit sama dalam pengawasan Obat dan Makanan
4. Adanya Edaran Menteri Keuangan terhadap prioritas terhadap penggunaan anggaran untuk penanganan covid (revisi, pencairan anggaran)

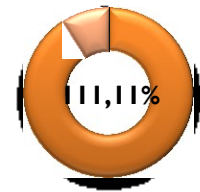
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

1. Pengalihan metode penyelenggaraan beberapa kegiatan menjadi secara daring.
2. Melakukan desk anggaran antara pimpinan dengan penanggung jawab dan pengelola anggaran pada masing-masing program/kegiatan.
3. Monitoring secara aktif oleh petugas Monev terhadap nilai IKPA dan EKA khususnya terkait unsur-unsur meliputi : Monitoring Realisasi DIPA, Hal III DIPA, Capaian Keluaran Kegiatan (CKK), Efisiensi, Saldo Minus, revolving UP, data kontrak, dispensasi SPM, Renkas, Kesalahan SPM, monitoring tagihan, rekonsiliasi keuangan dan monitoring penyampaian LPJ Bendahara, penyelesaian retur serta capaian output.

IKK11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2020**

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2020 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat baik. Hal ini bisa dilihat secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kerjanya. Namun masih ada 2 (dua) sasaran kegiatan yang masih perlu ditingkatkan efisiensinya yaitu Sasaran Kegiatan 1 “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang” dan Sasaran Kegiatan 8 “Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal”.



TABEL 35 PROFIL TINGKAT EFISIENSI SETIAP SASARAN KEGIATAN BBPOM DI SEMARANG

Sasaran Strategis		IE	TE	Capaian TE
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	0,97	-0,03	Tidak Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1,03	0,03	Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1,01	0,01	Efisien
Capaian Perspective stakeholder		1,01	0,01	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	1,08	0,08	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1,06	0,06	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1,11	0,11	Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1,03	0,03	Efisien
Capaian Internal Process Perspective		1,07	0,07	Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	0,96	-0,04	Tidak Efisien
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1,12	0,12	Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1,07	0,07	Efisien
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1,05	0,05	Efisien
Capaian Learning & Growth Perspective		1,05	0,05	Efisien
NPS TOTAL		1,04	0,04	Efisien



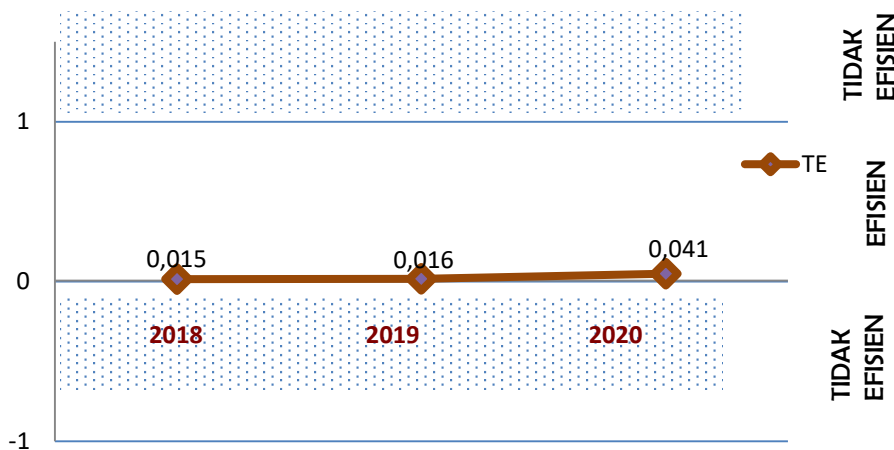
- Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 maupun 3 tahun terakhir, serta terhadap target jangka menengah

TABEL 36 TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2019 DAN 2020

2019	2020			
Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
0,016 100% (efisien)	90% (efisien)	0,041 100% (efisien)	111.11%	Sangat Baik

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, tahun 2020 masih menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan

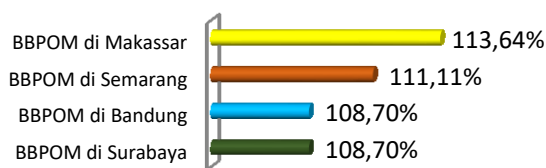
anggaran yang relative efisien. Namun tahun 2019 lebih efisien dibandingkan tahun 2020.



GAMBAR 56 GRAFIK PERBANDINGAN TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BBPOM DI SEMARANG 2018-2020

Berdasarkan Gambar 54. terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran selama 3 (tiga) tahun berada di range axis 0 dan 1 atau dapat diartikan ketiga titiknya berada diantara garis batas “Efisien”. Belum ada standar/ target nasional untuk indikator ini.

- Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (pusat) dan balai seklaster



Dibandingkan dengan 3 (tiga) BBPOM Klaster 1 lainnya, yaitu BBPOM di Surabaya, BBPOM di Bandung, dan BBPOM di Makasar, BBPOM di Semarang menempati posisi ke 2 (dua). Tertinggi diraih oleh BBPOM di Makassar mencapai 113,64%.

GAMBAR 57 CAPAIAN IKK 11.2 DARI KELOMPOK BPOM KLASER 1

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor keberhasilan pencapaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang, diantaranya:

1. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi.
2. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
3. Ketelitian pejabat serta pengelola keuangan dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D
4. Revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Dengan demikian upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja adalah:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala dengan melaksanakan rapat progresif bulanan monev realisasi anggaran setiap hari senin minggu ke 2.
2. Mengoptimalkan sisa anggaran kegiatan atau pengadaan barang dan jasa dengan melakukan revisi DIPA atau POK.
3. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
4. Melakukan monitoring pelaksanaan refocusing anggaran penanganan Covid-19.
5. Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.
6. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

- **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang baru ditetapkan pada tahun 2020, sehingga tidak dapat dievaluasi maupun analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya.

- **Rekomendasi peningkatan/mempertahankan kinerja untuk tahun selanjutnya**

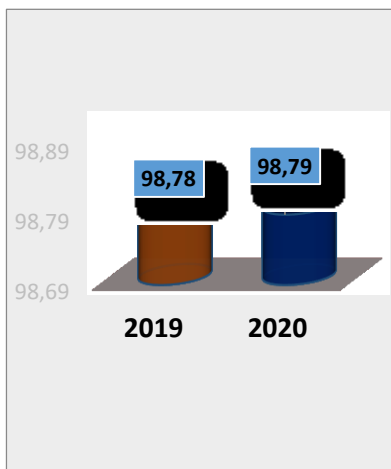
Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam laporan ini, perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang membandingkan antara capaian



anggaran dengan capaian kegiatan. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, misalnya memperhitungkan kapasitas SDM yang dimiliki oleh BBPOM di Semarang dengan dukungan data yang lebih memadai sehingga diperoleh tingkat efisiensi yang lebih optimal. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 laporan ini.

Selain itu setiap pelaksana kegiatan di setiap bidang harus menyiapkan dan mematuhi *Plan of Action* (POA) yang telah dibuat, karena hal tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan koordinasi dan monitoring implementasi rencana dalam maksud menghasilkan setiap sasaran hasil kinerja instansi.

3.1.5 Realisasi Anggaran BBPOM di Semarang Tahun 2020



GAMBAR 58 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019-2020

Pagu anggaran BBPOM di Semarang yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar Rp 48.773.819.000,00 yang merupakan dasar evaluasi dan pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 sesuai revisi APBNP 30 April 2020. Pada anggaran DIPA awal Tahun 2020 sebesar Rp 54.650.785.000,00,00 yang disahkan tanggal 12 November 2019. Pengurangan anggaran ini merupakan kebijakan pimpinan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 untuk direalokasi ke beberapa kegiatan penanganan Covid-19. Realokasi anggaran berasal dari Anggaran Belanja Modal (pengadaan alat laboratorium dan pengadaan mobil laboratorium keliling di Loka POM di Surakarta dan kegiatan lain yang tidak mempengaruhi capaian target dan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Analisis Capaian Kinerja

Realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 48,181,781,899,00 atau 98.79%. Terjadi penurunan realisasi anggaran dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Hal ini dikarenakan selama masa pandemic Covid-19 beberapa pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan diselenggarakan secara luring dialihkan/direvisi menjadi daring namun demikian tidak dapat menyerap optimal anggaran yang telah disiapkan, karena selama tahun berjalan terdapat beberapa daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mengalami peningkatan status menjadi zona merah sehingga tidak dapat diselenggarakan secara optimal di wilayah tersebut.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Semarang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan Monev anggaran oleh pimpinan dan melibatkan perwakilan seluruh bidang dilakukan berdasarkan POA (*plan of action*) secara berkala (bulanan)
2. Pelaksanaan revisi anggaran untuk meningkatkan capaian kinerja dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

3. Optimalisasi anggaran untuk kegiatan yang telah selesai.

Realisasi anggaran BBPOM di Semarang dimanfaatkan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 sebagai berikut:

TABEL 37 REALISASI ANGGARAN TERHADAP PAGU ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis		Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1.063.337.400	1.053.376.504	99,06
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7.214.799.000	7.010.395.383	97,17
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	205.015.000	204.037.900	99,52
Capaian Perspective stakeholder		8.483.151.400	8.267.809.787	97,46
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	1.915.018.000	1.900.961.290	99,27
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1.468.362.000	1.431.634.807	97,50
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	531.668.600	526.688.252	99,06
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	853.008.000	845.770.718	99,15
Capaian Internal Process Perspective		4.768.056.600	4.705.055.067	98,68
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	1.741.501.000	1.711.483.080	98,28
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	391.838.000	390.439.750	99,64
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	2.771.425.000	2.734.963.249	98,68
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	30.617.847.000	30.375.155.967	99,21
Capaian Learning & Growth Perspective		35.522.611.000	35.212.042.046	99,13
TOTAL		48.773.819.000	48.184.906.900	98,79

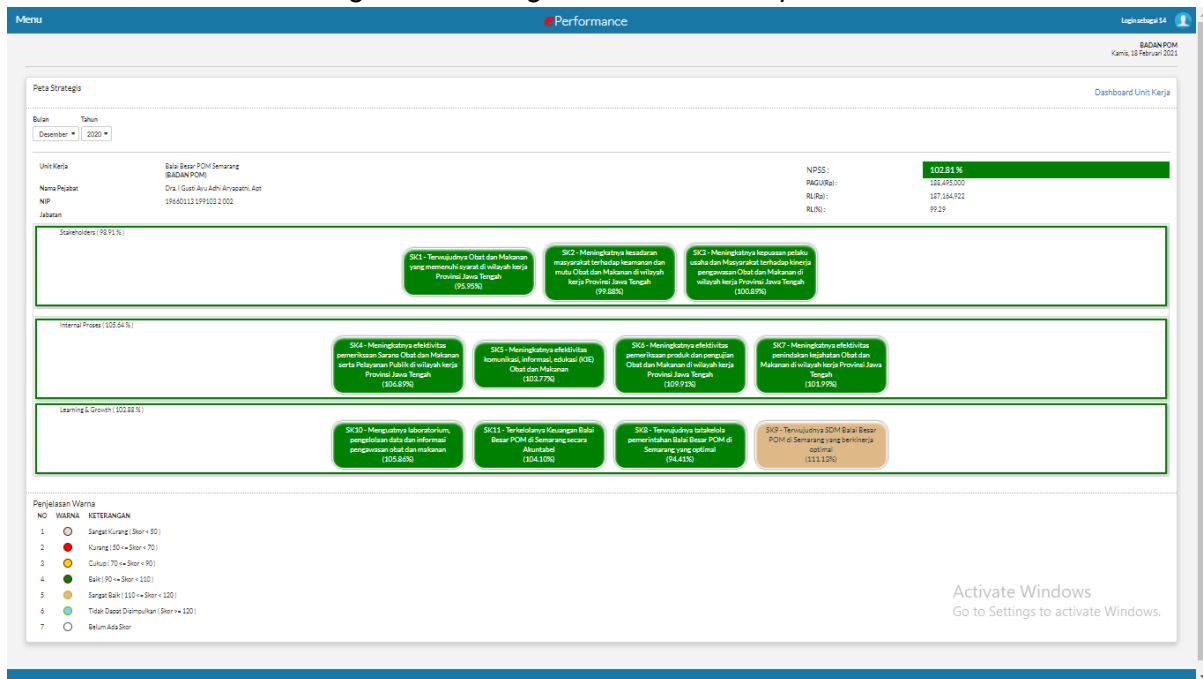
Sumber : Laporan Monev E-Performance Tahun 2020

Langkah-langkah yang sudah dilakukan BBPOM di Semarang dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran antara lain:

- 1) Menjaga komitmen yang tinggi dari level pimpinan hingga staf BBPOM di Semarang, Penyusunan PoA yang selalu dimonitoring.



- 2) Menguatkan pengendalian internal melalui pembentukan tim penyusun program/kegiatan (PIPK) dan Tim Monev sehingga tersedia informasi data dapat diandalkan.
- 3) Tahun 2020 dengan capaian anggaran 98,74% BBPOM di Semarang dapat melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian kinerja baik 101,40% sesuai dengan monitoring dan evaluasi di *e-performance* BPOM.



GAMBAR 59 LAPORAN MONEV E-PERFORMANCE TAHUN 2020

Sumber : Aplikasi Monev E-Performance Tahun 2020



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LK) ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas BBPOM di Semarang kepada publik dalam mencapai capaian kinerja tahun 2020 yang diukur dari indikator yang dapat menggambarkan sasaran target. Dari hasil evaluasi kinerja BBPOM di Semarang dapat disimpulkan bahwa sasaran pada setiap tujuan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2020 secara keseluruhan dapat **tercapai** dikategorikan **BAIK** dengan **NPS total sebesar 102,81%**, dengan **tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 111,11%**.

Dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang terbagi kedalam 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, terdapat 6 indikator kinerja tercapai dengan kriteria sangat baik, 20 (dua puluh) indikator tercapai dengan kriteria baik, 1 (satu) indikator tercapai dengan kategori cukup serta 1 (satu) indikator memperoleh kriteria tidak dapat disimpulkan. Kedepannya 1 (satu) indikator kinerja yang belum tercapai 100% dapat dievaluasi melalui perbaikan-perbaikan kinerja sehingga perlu ditingkatkan pada tahun tahun mendatang agar capaian menjadi memuaskan atau sangat baik. Adapun uraian 1 indikator kinerja tersebut adalah :

Indikator Presentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan yang terdapat pada Sasaran Kegiatan Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di BBPOM di Semarang dengan persentase capaian kinerja 88,15%. Dari hasil tersebut perlu adanya kerja keras untuk meningkatkan capaian dan atau dilakukan penyesuaian target balai jikadiperlukan, guna tetap mendukung target dan capaian nasional.

Pada tahun mendatang BBPOM di Semarang akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dengan lebih optimal sehingga pada akhirnya dapat tercipta performa pelayanan publik yang berkualitas.

Laporan Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan kedepannya.

Demikian, Laporan Kinerja BBPOM di Semarang disusun dan dapat menggambarkan capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2020 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Badan POM.



4.2 Saran

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang, saran perbaikan dan *continuous improvement*, antara lain :

- c. Meningkatkan serta mengefektifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi/ capaian dari setiap indikator kinerja kegiatan, disertai dengan analisa kendala/ keberhasilan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan kesimpulan.
- d. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja tersebut untuk perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang, serta menilai keberhasilan program/ kegiatan.
- e. Melakukan review Renstra 2020 – 2024 terkait penetapan target indikator kinerja kegiatan di tahun selanjutnya, terutama untuk capaian kinerja tahun 2022 yang masih berkategori cukup dan tidak dapat disimpulkan.
- f. Terus menerus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha, guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, komitmen, serta kepatuhannya dalam mewujudkan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu.
Sosialisasi dan pelatihan kepada produsen obat dan makanan dapat lebih difokuskan terkait penandaan/ label produk maupun percepatan perizinan/ sertifikasi.
- g. Tetap menjalin kerjasama yang efektif dan meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan.
- h. Meningkatkan frekuensi, kualitas, dan kuantitas penyelenggaraan KIE kepada masyarakat; hingga menjangkau ke pedesaan.
- i. Menambah frekuensi serta meluaskan pewartaan hasil pengawasan kepada masyarakat; sehingga dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.

Peningkatan kompetensi dan pengetahuan SDM BBPOM di Semarang secara kontinu dan berjenjang



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1. SURAT KEPUTUSAN RENSTRA BBPOM DI SEMARANG 2020



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : likpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG

NOMOR PR.01.02.104.05.20.1040 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI SEMARANG TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : likpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI SEMARANG 2020-2024.
- Kesatu :** Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020 –2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai/Balai Besar POM di Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Renstra Balai/Balai Besar POM di Semarang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai/Balai Besar POM di Semarang untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga :** Renstra Balai/Balai Besar POM di Semarang sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai/Balai Besar POM di Semarang dan Loka POM di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai/Balai Besar POM di Semarang.
- Keempat :** Terhadap pelaksanaan Renstra Balai/Balai Besar POM di Semarang dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : likpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada Tanggal : 20 Mei 2020

Kepala Balai Besar POM di Semarang



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt

LAMPIRAN 2 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA BALAI BESAR POM DI SEMARANG 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90,5	91	91,5	92
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89,2	89,4	89,6	90
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	74	75	76	77
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	70	72	74	76	78
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	74	76	78	80	82
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	71	72	73	75	78
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	84	85	86	87	88
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	70	73	75	78	80

SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	85	92	93	95	97
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	51	56	61	67
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55	57	60	63	65
	Indeks pelayanan publik di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	3.51	3.76	4.01	4.26	4.51
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Jawa Tengah	Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	84.31	86	87.72	89.47	91.26
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20	41	61	81	103
	Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	5	10	16	22	28
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92	92,5	93	93,5	94
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90,5	91	91,5	92
Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90	91	92	94	95
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						
Terwujudnya organisasi Balai Besar POM di Semarang yang efektif	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	81	82	83	84	85
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	81	82	83	84	85
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	77	79	81	83	85
Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan terhadap standar GLP oleh Lab pengujian Balai Besar POM di Semarang	82	83	84	85	86

SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	1,5	2	2,3	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	94	94,5	95	96	97
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	Efisien (90%)	Efisien (91%)	Efisien (92%)	Efisien (93%)	Efisien (94%)

Sumber : Renstra 2020-2024

LAMPIRAN 3. PERJANJIAN KINERJA BBPOM DI SEMARANG 2020



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : lkpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Semarang
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Semarang, 29 Mei 2020

Pihak Pertama



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : ikpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang	88
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti	77.6



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

J. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
 Telp. (024) 7612024 Fax. (024) 7613633
 Email : ikpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	3.51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	84.31
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	91
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	81



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A. Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : ikpomem@yahoo.com Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	yang optimal	Semarang	
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar OLP	82
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	1.51
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	Efisien (90%)

Kegiatan

- 1 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran

Rp 47.311.819.000,-

Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Semarang, 29 Mei 2020

Kepala Balai Besar POM di Semarang

Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt

LAMPIRAN 4. A. RENCANA KINERJA (RENJA) 2020



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : ikpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG NOMOR: PR.04.02.104.12.19.6533.1

TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR POM DI SEMARANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar POM di Semarang pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : ikpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2020**
- KESATU** : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2020
- KEDUA** : Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Maret 2020
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG,



DRA. I. GUSTI AYU ADHI ARYAPATNI, APT



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : ikpomem@yahoo.com Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG
PR.04.02.104.12.19.6533.1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR POM DI SEMARANG
TAHUN 2020

RENCANA KINERJA BALAI BESAR POM DI SEMARANG TAHUN 2020

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Persentase obat yang memenuhi syarat	89,1
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	70,7
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	88,8
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	73
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	78
2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	70
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	71
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang	84
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : ikpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	70
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20
		Jumlah desa pangan aman	9
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	5
7	Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Semarang yang optimal	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100
		Persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu	92
8	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
9	Terwujudnya organisasi Balai Besar POM di Semarang yang efektif	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	81
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	81
10	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	77
11	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Balai Besar POM di Semarang yang Terintegrasi dan Adaptif	Persentase pengelolaan TIK Balai Besar POM di Semarang yang baik	70
12	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	90% (Efektif)

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG,



DRA. I GUSTI AYU ADHI ARYAPATNI, APT

4. B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RENSTRA) 2020



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A. Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : ikpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG

NOMOR: PR.04.02.104.12.19.6533

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR POM DI SEMARANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar POM di Semarang pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : likpomsem@yahoo.com Website : www.pom.go.id

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : likpomem@yahoo.com Website : www.pom.go.id

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

- 7 Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2020
- KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2020
- KEDUA : Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 9 Maret 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG,

DR. IGISELATU ADHI ARYAPATNI, APT



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A. Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : ikpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI SEMARANG

PR.04.02.104.12.19.6533 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR POM DI SEMARANG

TAHUN 2020

RENCANA KINERJA BALAI BESAR POM DI SEMARANG

TAHUN 2020

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	90
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Tengah	78
		Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	73
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	70
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	74
		Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	71
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	84
4	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	70



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A. Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : lkpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	85
		Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	3,85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	70
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20
		Jumlah desa pangan aman	9
		Jumlah pasar aman dan bahan berbahaya	5
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
8	Terwujudnya organisasi Balai Besar POM di Semarang yang efektif	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	81
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	81
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN Balai Besar POM di Semarang	75
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan terhadap standar GLP oleh Lab pengujian Balai Besar POM di Semarang	82
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1.51



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : lkpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	Efisien (90%)

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG,



DRA. I GUSTI AYU ADHI ARYAPATNI, APT

LAMPIRAN 5 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. 024 - 7612324 (JULPK) Fax. 024-7613633

Email : ikpomsem@yahoo.com - bpom_semarang@pom.go.id Website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rp/tah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	Rp369.556.700
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78	78	78	Rp162.112.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	Rp369.556.700
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	73	73	Rp162.112.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	72	Rp7.214.799.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	82	Rp185.480.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	71	Rp12.255.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Semarang	0	0	0	88	Rp 7.280.000



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A. Banyumanik Semarang 50264

Telp. 024 - 7612324 (JULPK) Fax. 024-7613633

Email : lkpomsm@yahoo.com - bpom_semarang@pom.go.id Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	Rp 348.239.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,6	77,6	77,6	77,6	Rp133.262.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	Rp 14.180.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	46	46	46	Rp 412.360.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	Rp 421.764.000
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	-	-	-	3,51	Rp 586.233.000
		5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	-	84,31	84,31
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20%			20%	60%	16	Rp 295.000.000
Jumlah desa pangan aman	33%			30%	67%	6	Rp 763.917.000
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	33%			33%	60%	3	Rp 142.440.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	88	90	91	92	Rp 369.556.600
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	87	88	90	Rp 162.112.000



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A. Banyumanik Semarang 50264

Telp. 024 - 7612324 (ULPK) Fax. 024-7613633

Email : ikpomsem@yahoo.com - bpom_samarang@pom.go.id Website : www.pom.go.id

No.	Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	Balai Besar POM di Semarang						
7	Meningkatnya efektivitas perindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keberhasilan perindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	30	50	70	Rp 853.008.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Semarang yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	0	0	0	81	Rp 272.003.000
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	0	0	0	81	Rp 1.469.498.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	0	0	0	77	Rp 391.838.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar OLP	0	0	0	82	Rp 2.771.125.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	0	1.51	1.51	1.51	Rp 300.000
11	Terkecelarnya Keuangan Balai Besar	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	88	90	92	94	Rp 30.576.917.000



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41A, Banyumanik Semarang 50264

Telp. 024 - 7612324 (ULPK) Fax. 024-7613633

Email : ikpomsm@yahoo.com - bpom_semarang@pom.go.id Website : www.pom.go.id

No.	Batasan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	POM di Semarang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Semarang	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Rp 40.930.000

Semarang, 13 Oktober 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN DI SEMARANG



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt.

LAMPIRAN 6. PENGUKURAN KINERJA

No	Indikator	Target 2020	Target				Realisasi				Capaian			
			TW I	TW II	TWIII	TW IV	TW I	TW II	TWIII	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	80,00%	81,55%	84,58%	84,62%	88,89%	90,61%	93,97%	94,02%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	30,77%	77,19%	75,60%	74,34%	39,45%	98,97%	96,92%	95,31%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	64,71%	70,80%	75,00%	78,45%	72,70%	79,55%	84,27%	88,15%
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,00%	73,00%	73,00%	73,00%	73,00%	71,86%	77,04%	80,63%	77,58%	98,44%	105,54%	110,45%	106,28%
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	72	-	-	-	72	-	-	-	71,91	0	0	0	99,88%
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	-	-	-	82	-	-	-	86,03	0	0	0	104,91%

No	Indikator	Target 2020	Target				Realisasi				Capaian			
			TW I	TW II	TWIII	TW IV	TW I	TW II	TWIII	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	-	-	-	71	-	-	-	69,3	0	0	0	97,61%
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88	-	-	-	88	-	-	-	88,11	0	0	0	100,13%
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	87	68,85	78,96	76,77	82,98	79,14%	90,75%	88,24%	95,38%
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	39,42	59,18	68,35	78,01	50,79%	76,26%	88,08%	100,53%
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	98,57%	98,38%	98,38%	99,09%	115,97%	115,74%	115,74%	116,57%
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	47,62%	51,22%	45,76%	48,16%	103,52%	111,35%	99,47%	104,69%

No	Indikator	Target 2020	Target				Realisasi				Capaian			
			TW I	TW II	TWIII	TW IV	TW I	TW II	TWIII	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	56,34%	64,14%	58,68%	58,66%	102,43 %	116,61%	106,69%	106,65%
14	Indeks Pelayanan Publik	3,51				3,51	-	-	-	4,14	0	0	0	117,95%
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	84,31%	-	84,31%	84,31%	84,31%	-	88,53	93,33	91,38	0	105,01	110,70	108,39
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	20%	20%	60%	16	20,00%	20,00%	0,56	18,00	100,00 %	100,00%	93,75%	112,50%
17	Jumlah desa pangan aman	6	33%	50%	67%	6	20,00%	25,00%	48,00%	5,646	60,61%	50,00%	71,64%	94,10%
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	33%	33%	65%	3	23,34%	23,34%	66,50%	3	70,73%	70,73%	102,31%	100,00%
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,00%	88,00%	90,00%	91,00%	92,00%	15,68	32,74	75,59	100,00	17,82	36,38	83,06	108,70
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,00%	85,00%	87,00%	88,00%	90,00%	20,72	37,25	85,36	100,00	24,38	42,81	97,00	111,11
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00%	20,00%	30,00%	50,00%	70,00%	20,51%	33,69%	60,79%	71,39%	102,56 %	112,31%	121,58%	101,99%
22	Indeks RB UPT	91	-	-	-	91	-	-	-	84,76	0	0	0	93,14%
23	Nilai AKIP UPT	81	-	-	-	81	-	-	-	77,49	0	0	0	95,67%

No	Indikator	Target 2020	Target				Realisasi				Capaian			
			TW I	TW II	TWIII	TW IV	TW I	TW II	TWIII	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
24	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77	-	-	-	77	-	-	-	85,57	0	0	0	111,13%
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	-	-	-	82	-	-	-	75,2	0	0	0	91,71%
26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	-	1,51	1,51	1,51	-	0,25	1,025	1,82	0	16,56%	67,88%	120,53%
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94	88	90	92	94	50,008	50,812	65,864	91,244	56,83%	56,46%	71,59%	97,07%
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	75%	75%	95%	100%	83,33%	83,33%	105,56%	111,11%

Sumber :RAPK 2020 diolah

LAMPIRAN 7. REKAPITULASI HASIL REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020

A. REKAPITULASI PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SAMPEL

BALAI BESAR POM DI SEMARANG

No	No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Total															Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yg selesai)	RAPK 2020
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penanda an	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji			
							TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penanda an dan MS uji lab) *	TMS								
														MK Penanda an dan TMS uji lab **	TMK Penanda an dan MS Uji Lab ***	TMK Penanda an dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)					
SAMPLING DAN PENGUJIAN																						
18	Semarang	Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
		1	Obat	Semarang	98	Targeted	102	0	0	0	13	102	102	88	1	13	0	0	14	0	102	
				Kabupaten Banyumas	11		12	0	0	0	1	12	12	11	0	1	0	0	1	0	12	
				Kota Surakarta	11		11	0	0	0	2	11	11	9	0	2	0	0	2	0	11	
				Semarang	390	Random	390	0	0	0	63	390	390	323	4	63	0	0	67	0	390	
				Kabupaten Banyumas	26		26	0	0	0	9	26	26	17	0	8	1	0	9	0	26	
				Kota Surakarta	30		30	0	0	0	3	30	30	25	2	3	0	0	5	0	30	
				TOTAL	566		571	0	0	0	91	571	571	473	7	90	1	0	98	0	571	82.84

BALAI BESAR POM DI SEMARANG																							
No		No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Total															Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yg selesai)	RAPK 2020
							Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji			
								TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS								
															MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)					
SAMPLING DAN PENGUJIAN																							
		2	Obat Tradisional/Obat Bahan	Semarang	109	Targeted	110	0	0	0	26	110	110	69	15	20	6	0	41	0	110		
				Kabupaten Banyumas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Kota Surakarta	6		6	0	0	0	2	6	6	4	0	2	0	0	2	0	6		
				Semarang	254	Random	253	2	0	0	62	251	251	180	9	53	9	0	73	0	253		
				Kabupaten Banyumas	30		30	0	0	0	16	30	30	13	1	16	0	0	17	0	30		
				Kota Surakarta	24		24	1	0	0	3	23	23	16	4	3	0	0	8	0	24		
				TOTAL	423		423	3	0	0	109	420	420	282	29	94	15	0	141	0	423	66.67	

BALAI BESAR POM DI SEMARANG

No	No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Total															Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yg selesai)	RAPK 2020
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji			
							TIE/ Illegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penanda an dan MS uji lab) *	TMS								
														MK Penanda an dan TMS uji lab **	TMK Penanda an dan MS Uji Lab ***	TMK Penanda an dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)					
SAMPLING DAN PENGUJIAN																						
	3	Suplemen	Semarang	18	Targeted	19	0	0	0	0	19	19	14	5	0	0	0	5	0	19		
			Kabupaten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kota Surakarta	1		1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1		
			Semarang	106	Random	105	0	0	0	4	105	105	88	13	3	1	0	17	0	105		
			Kabupaten	10		10	0	0	0	2	10	10	8	0	1	1	0	2	0	10		
			Kota Surakarta	9		9	0	0	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	9		
			TOTAL	144		144	0	0	0	6	144	144	120	18	4	2	0	24	0	144	83.33	
	4	Kosmetik	Semarang	141	Targeted	144	0	0	0	23	144	144	120	1	18	5	0	24	0	144		
			Kabupaten	7		7	0	0	0	1	7	7	6	0	0	1	0	1	0	7		
			Kota Surakarta	18		15	0	0	0	2	15	15	13	0	2	0	0	2	0	15		
			Semarang	566	Random	566	1	1	1	24	563	563	533	6	15	9	0	33	0	566		
			Kabupaten	53		53	0	0	0	2	53	53	51	0	2	0	0	2	0	53		
			Kota Surakarta	42		45	0	0	0	4	45	45	41	0	4	0	0	4	0	45		
			TOTAL	827		830	1	1	1	56	827	827	764	7	41	15	0	66	0	830	92.05	

BALAI BESAR POM DI SEMARANG

No	No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Total															RAPK 2020
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitun gan Output DJA (jumlah sampel yg selesai	
							TIE/ llegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK Penanda an dan MS uji lab) *	TMS							
														MK Penanda an dan TMS uji lab **	TMK Penanda an dan MS Uji Lab ***	TMK Penanda an dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)				
SAMPLING DAN PENGUJIAN																					
			Total Obat Tradisional	115	Targeted	116	0	0	0	28	116	116	73	15	22	6	0	43	0	116	62.93
			Total Suplemen Kesehatan	19		20	0	0	0	0	20	20	15	5	0	0	0	5	0	20	75.00
			Total Kosmetik	166		166	0	0	0	26	166	166	139	1	20	6	0	27	0	166	83.73
			Semarang	366	Targeted	375	0	0	0	62	375	375	291	22	51	11	0	84	0	375	77.60
			Kabupaten Banyumas	18		19	0	0	0	2	19	19	17	0	1	1	0	2	0	19	89.47
			Kota Surakarta	36		33	0	0	0	6	33	33	27	0	6	0	0	6	0	33	81.82
			Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	420	427	0	0	0	70	427	427	335	22	58	12	0	92	0	427	78.45	
			Total Obat	446	Random	446	0	0	0	75	446	446	365	6	74	1	0	81	0	446	81.84
			Total Obat Tradisional	308		307	3	0	0	81	304	304	209	14	72	9	0	98	0	307	68.08
			Total Suplemen Kesehatan	125		124	0	0	0	6	124	124	105	13	4	2	0	19	0	124	84.68
			Total Kosmetik	661		664	1	1	1	30	661	661	625	6	21	9	0	39	0	664	94.13
			Semarang	1316	Random	1314	3	1	1	153	1309	1309	1124	32	134	19	0	190	0	1314	85.54
			Kabupaten Banyumas	119		119	0	0	0	29	119	119	89	1	27	2	0	30	0	119	74.79
			Kota Surakarta	105		108	1	0	0	10	107	107	91	6	10	0	0	17	0	108	84.26
			Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1540	1541	4	1	1	192	1535	1535	1304	39	171	21	0	237	0	1541	84.62	
			TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1960	1968	4	1	1	262	1962	1962	1639	61	229	33	0	329	0	1968	83.28	

BALAI BESAR POM DI SEMARANG

No	No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Total														Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yang selesai)	RAPK 2020
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji		
							TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS							
														MS (MK Penandaan dan MS uji lab) **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)				
SAMPLING DAN PENGUJIAN																					
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																					
1	Pangan	Semarang	323	Targeted	337	0	0	0	72	337	337	267	39	19	12	0	70	0	337	79.23	
	0	Kabupaten	36		32	0	0	0	0	32	32	23	9	0	0	0	9	0	32	71.88	
	0	Kota Surakarta	28		28	0	0	0	0	28	28	18	10	0	0	0	10	0	28	64.29	
	0	Semarang	432	Random	473	0	0	0	113	473	473	346	14	99	14	0	127	0	473	73.15	
	0	Kabupaten	6		6	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	6	100.00	
	0	Kota Surakarta	16		16	0	0	0	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	16	100.00	
		Total Pangan	387	Targeted	397	0	0	0	72	397	397	308	58	19	12	0	89	0	397	77.58	
		Total Pangan	454	Random	495	0	0	0	113	495	495	368	14	99	14	0	127	0	495	74.34	
		TOTAL PANGAN	841		892	0	0	0	185	892	892	676	72	118	26	0	216	0	892	75.78	

Sumber :RAPK 2020

B. INDEKS KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN MAKANAN

NO	PROVINSI	INDEKS KESADARAN
1	ACEH	71.75
2	SUMATERA UTARA	81.43
3	SUMATERA BARAT	81.14
4	RIAU	75.78
5	JAMBI	72.25
6	SUMATERA SELATAN	78.14
7	BENGKULU	83.80
8	LAMPUNG	82.75
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	76.73
10	KEPULAUAN RIAU	80.65
11	DKI JAKARTA	82.53
12	JAWA BARAT	67.35
13	JAWA TENGAH	71.91
14	DIYOGYAKARTA	76.68
15	JAWA TIMUR	73.23
16	BANTEN	87.33
17	BALI	69.54
18	NUSA TENGGARA BARAT	73.91
19	NUSA TENGGARA TIMUR	68.41
20	KALIMANTAN BARAT	80.54
21	KALIMANTAN TENGAH	68.09
22	KALIMANTAN SELATAN	78.36
23	KALIMANTAN TIMUR	82.98
24	KALIMANTAN UTARA	79.14
25	SULAWESI UTARA	78.22
26	SULAWESI TENGAH	75.78
27	SULAWESI SELATAN	76.36
28	SULAWESI TENGGARA	72.60
29	GORONTALO	79.70
30	SULAWESI BARAT	64.86
31	MALUKU	74.80
32	MALUKU UTARA	71.18
33	PAPUA BARAT	80.30
34	PAPUA	60.85
	Grand Total	74.29

Sumber : Data Inspektorat Badan POM

C. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat Dan Makanan

No	Unit Penyelenggara	KBP	Responden	Target	Capaian
1	Balai Besar POM di Jakarta	17	333	82,00	85,33
2	Balai Besar POM di Semarang	15	468	82,00	86,03
3	Balai Besar POM di Pekanbaru	11	142	86,00	87,1
4	Balai Besar POM di Palembang	11	132	86,00	87,67
5	Balai Besar POM di Yogyakarta	9	292	82,00	85,51
6	Balai Besar POM di Denpasar	9	129	83,00	89,57
7	Balai Besar POM di Surabaya	8	122	82,00	82,60
8	Balai POM di Kupang	7	62	83,00	89,07
9	Balai POM di Batam	7	58	86,00	86,88
10	Balai Besar POM di Bandung	6	161	82,00	90,82
11	Balai Besar POM di Bandar Lampung	6	85	86,00	94,30
12	Balai Besar POM di Medan	6	58	86,00	93,04
13	Balai POM di Mamuju	6	23	83,00	95,08
14	Balai POM di Ambon	6	37	65,40	87,38
15	Balai Besar POM di Samarinda	6	182	86,00	83,58
16	Balai Besar POM di Banda Aceh	5	75	86,00	91,32
17	Balai Besar POM di Serang	4	103	82,00	83,69
18	Balai Besar POM di Mataram	4	63	83,00	86,48
19	Balai POM di Bengkulu	4	44	86,00	93,16
20	Balai Besar POM di Banjarmasin	4	34	86,00	96,35
21	Balai Besar POM di Palangkaraya	4	19	86,00	87,60
22	Balai Besar POM di Padang	5	85	86,00	81,72
23	Balai Besar POM di Makassar	4	96	83,00	82,50
24	Balai POM di Manokwari	3	49	83,50	86,12
25	Balai POM di Kendari	3	43	83,00	79,35
26	Balai Besar POM di Manado	3	24	83,00	88,79
27	Balai POM di Gorontalo	3	22	83,00	84,53
28	Balai POM di Sofifi	3	20	65,00	90,18
29	Balai Besar POM di Jayapura	3	15	83,50	90,59
30	Balai POM di Palu	3	12	83,00	88,89
31	Balai POM di Jambi	3	10	86,00	86,70
32	Balai POM di Pangkalpinang	2	36	86,00	92,21
33	Balai Besar POM di Pontianak	2	16	86,00	92,19

Sumber : Data PMPU Badan POM

D. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan

NO	PROVINSI	INDEKS KEPUASAN
1	ACEH	69.45
2	SUMATERA UTARA	70.90
3	SUMATERA BARAT	71.83
4	RIAU	62.37
5	JAMBI	68.83
6	SUMATERA SELATAN	74.24
7	BENGKULU	76.17
8	LAMPUNG	77.72
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	69.70
10	KEPULAUAN RIAU	68.68
11	DKI JAKARTA	73.30
12	JAWA BARAT	75.43
13	JAWA TENGAH	69.30
14	DI YOGYAKARTA	75.89
15	JAWA TIMUR	74.18
16	BANTEN	79.76
17	BALI	69.08
18	NUSA TENGGARA BARAT	74.98
19	NUSA TENGGARA TIMUR	65.82
20	KALIMANTAN BARAT	65.76
21	KALIMANTAN TENGAH	61.00
22	KALIMANTAN SELATAN	76.11
23	KALIMANTAN TIMUR	70.20
24	KALIMANTAN UTARA	76.26
25	SULAWESI UTARA	81.16
26	SULAWESI TENGAH	65.08
27	SULAWESI SELATAN	73.94
28	SULAWESI TENGGARA	66.14
29	GORONTALO	62.70
30	SULAWESI BARAT	72.00
31	MALUKU	68.15
32	MALUKU UTARA	60.07
33	PAPUA BARAT	66.37
34	PAPUA	63.01
	Grand Total	72.54

Sumber : Data PRKOM Badan POM

E. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bpom

NO	Unit Pelayanan	2019	2020	Naik/ Turun	Target 2020	Tercapai/ Tidak tercapai terhadap target
1	Dit. Registrasi Obat	79,93	82,37	2,44	82,00	Tercapai
2	Dit. Pengawasan Produksi Obat, NPP	83,27	85,16	1,89	85,00	Tercapai
3	Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, NPP	86,36	88,01	1,65	87,50	Tercapai
4	Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Im- por Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	83,72	85,30	1,58	85,00	Tercapai
5	Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	76,70	81,36	4,66	79,00	Tercapai
6	Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	84,25	86,07	1,82	86,00	Tercapai
7	Dit. Pengawasan Kosmetik	81,29	83,63	2,34	83,50	Tercapai
8	Dit. Standardisasi Pangan Olahan	83,27	83,88	0,61	85,00	Tidak Tercapai
9	Dit. Registrasi Pangan Olahan	83,96	82,60	-1,36	85,50	Tidak Tercapai
10	Dit. Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	86,99	80,85	-6,14	88,00	Tidak Tercapai
11	Dit. Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	84,03	89,40	5,37	85,50	Tercapai
12	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	81,18	86,90	5,72	84,00	Tercapai
13	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	82,20	89,51	7,31	84,50	Tercapai
14	Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan	77,08	85,30	8,22	79,50	Tercapai
15	Balai Besar POM Di Banda Aceh	84,41	93,44	9,03	85,00	Tercapai
16	Balai Besar POM Di Medan	89,12	89,87	0,75	89,50	Tercapai
17	Balai Besar POM Di Padang	87,77	89,97	2,20	88,50	Tercapai
18	Balai Besar POM Di Pekanbaru	90,24	92,00	1,76	89,50	Tercapai
19	Balai Besar POM Di Palembang	94,39	91,74	-2,65	89,50	Tercapai
20	Balai Besar POM Di Bandar Lampung	85,16	92,08	6,92	86,00	Tercapai
21	Balai Besar POM Di Jakarta	86,17	88,19	2,02	87,50	Tercapai
22	Balai Besar POM Di Bandung	87,28	85,51	-1,77	86,50	Tidak Tercapai
23	Balai Besar POM Di Semarang	86,51	88,11	1,60	88,00	Tercapai
24	Balai Besar POM Di Yogyakarta	87,84	88,18	0,34	88,50	Tercapai
25	Balai Besar POM Di Surabaya	94,20	91,50	-2,70	89,50	Tercapai
26	Balai Besar POM Di Serang	85,82	85,51	-0,31	86,50	Tidak Tercapai
27	Balai Besar POM Di Denpasar	91,32	89,28	-2,04	89,50	Tidak Tercapai
28	Balai Besar POM Di Mataram	86,90	90,51	3,61	88,00	Tercapai
29	Balai Besar POM Di Pontianak	89,40	89,32	-0,08	89,50	Tidak Tercapai
30	Balai Besar POM Di Palangka Raya	86,96	89,40	2,44	88,00	Tercapai
31	Balai Besar POM Di Banjarmasin	87,90	89,18	1,28	88,50	Tercapai
32	Balai Besar POM Di Samarinda	86,03	85,16	-0,87	87,50	Tidak Tercapai
33	Balai Besar POM Di Manado	81,15	88,12	6,97	82,50	Tercapai
34	Balai Besar POM Di Makassar	88,77	93,31	4,54	89,00	Tercapai
35	Balai Besar POM Di Jayapura	86,52	88,20	1,68	88,00	Tercapai
36	Balai POM Di Jambi	79,42	86,02	6,60	81,00	Tercapai
37	Balai POM Di Bengkulu	90,32	92,14	1,82	89,50	Tercapai
38	Balai POM Di Batam	87,44	86,69	-0,75	88,50	Tidak Tercapai
39	Balai POM Di Kupang	83,21	87,02	3,81	84,00	Tercapai
40	Balai POM Di Palu	86,02	89,08	3,06	87,50	Tercapai
41	Balai POM Di Kendari	87,58	88,54	0,96	88,50	Tercapai
42	Balai POM Di Ambon	84,76	94,99	10,23	85,50	Tercapai
43	Balai POM Di Pangkalpinang	80,28	90,83	10,55	81,50	Tercapai
44	Balai POM Di Gorontalo	88,06	91,47	3,41	89,00	Tercapai
45	Balai POM Di Manokwari	94,44	99,09	4,65	89,50	Tercapai
46	Balai POM Di Mamuju	82,64	82,92	0,28	83,50	Tidak Tercapai
47	Balai POM Di Sofifi	79,56	90,43	10,87	81,00	Tercapai

Sumber : Data Inspektorat Badan POM

F. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan

A, keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan					
No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Total	
				Rekomendasi*	TL**
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Semarang	0	0
			Kabupaten Banyumas	21	24
			Kota Surakarta	30	33
			TOTAL	51	57
		Obat Tradisional/ Obat Bahan	Semarang	6	6
			Kabupaten Banyumas	12	7
			Kota Surakarta	15	14
			TOTAL	33	27
		Suplemen Kesehatan	Semarang	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0
			Kota Surakarta	0	0
			TOTAL	0	0
		Kosmetik	Semarang	5	5
			Kabupaten Banyumas	10	8
			Kota Surakarta	14	5
			TOTAL	29	18
		Pangan	Semarang	4	4
			Kabupaten Banyumas	8	12
			Kota Surakarta	22	20
			TOTAL	34	36
			Semarang	15	15
	Kabupaten Banyumas	51	51		
	Kota Surakarta	81	72		
	Total	147	138		
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Semarang	15	15
			Kabupaten Banyumas	4	3
			Kota Surakarta	3	3
			TOTAL	22	21
		Obat Tradisional/ Obat Bahan	Semarang	107	107
			Kabupaten Banyumas	37	32
			Kota Surakarta	26	22
			TOTAL	170	161
		Suplemen Kesehatan	Semarang	2	2
			Kabupaten Banyumas	7	7
			Kota Surakarta	0	0
			TOTAL	9	9
		Kosmetik	Semarang	21	21
			Kabupaten Banyumas	5	4
			Kota Surakarta	3	3
			TOTAL	29	28
		Pangan	Semarang	21	21
			Kabupaten Banyumas	4	3
			Kota Surakarta	0	0
			TOTAL	25	24
			Semarang	166	166
	Kabupaten Banyumas	57	49		
	Kota Surakarta	32	28		
	Total	255	243		
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Semarang	6	6
			Kabupaten Banyumas	0	0
			Kota Surakarta	0	0
			TOTAL	6	6
		Obat Tradisional/ Obat Bahan	Semarang	3	0
			Kabupaten Banyumas	2	2
			Kota Surakarta	0	0
			TOTAL	5	2
		Suplemen Kesehatan	Semarang	0	0
			Kabupaten Banyumas	2	1
			Kota Surakarta	0	0
			TOTAL	2	1
		Kosmetik	Semarang	14	0
			Kabupaten Banyumas	2	1
			Kota Surakarta	0	0
			TOTAL	16	1
		Pangan	Semarang	23	14
			Kabupaten Banyumas	0	0
			Kota Surakarta	0	0
			TOTAL	23	14
			Semarang	46	20
	Kabupaten Banyumas	6	4		
	Kota Surakarta	0	0		
	Total	52	24		

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Total	
				Rekomendasi*	TL**
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Semarang	22	20
			Kabupaten Banyumas	8	8
			Kota Surakarta	0	0
			TOTAL	30	28
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang	6	6
			Kabupaten Banyumas	1	1
			Kota Surakarta	0	0
			TOTAL	7	7
		Suplemen Kesehatan	Semarang	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0
			Kota Surakarta	0	0
			TOTAL	0	0
		Kosmetik	Semarang	6	6
			Kabupaten Banyumas	0	0
			Kota Surakarta	0	0
			TOTAL	6	6
		Pangan	Semarang	5	5
			Kabupaten Banyumas	11	11
			Kota Surakarta	0	0
			TOTAL	16	16
	Semarang	39	37		
	Kabupaten Banyumas	20	20		
	Kota Surakarta	0	0		
	Total	59	57		

Sumber : RAPK 2020

G. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

B, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Total	
				Rekomendasi*	TL**
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Semarang	195	137
			Kabupaten Banyumas	56	47
			Kota Surakarta	36	17
			TOTAL	287	201
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang	74	63
			Kabupaten Banyumas	13	8
			Kota Surakarta	9	4
		TOTAL	96	75	
		Suplemen Kesehatan	Semarang	6	2
			Kabupaten Banyumas	0	0
			Kota Surakarta	0	0
		TOTAL	6	2	
		Kosmetik	Semarang	65	55
			Kabupaten Banyumas	7	4
			Kota Surakarta	5	1
		TOTAL	77	60	
		Pangan	Semarang	152	71
			Kabupaten Banyumas	12	6
			Kota Surakarta	13	2
			TOTAL	177	79
		Semarang	492	328	
		Kabupaten Banyumas	88	65	
		Kota Surakarta	63	24	
		Total	643	417	
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Semarang	3	2
			Kabupaten Banyumas	36	37
			Kota Surakarta	1	0
		TOTAL	40	39	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang	0	3
			Kabupaten Banyumas	1	1
			Kota Surakarta	0	0
		TOTAL	1	4	
		Suplemen Kesehatan	Semarang	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0
			Kota Surakarta	0	0
		TOTAL	0	0	
		Kosmetik	Semarang	0	2
			Kabupaten Banyumas	2	2
			Kota Surakarta	0	0
		TOTAL	2	4	
		Pangan	Semarang	18	10
			Kabupaten Banyumas	7	5
			Kota Surakarta	0	0
			TOTAL	25	15
		Semarang	21	17	
		Kabupaten Banyumas	46	45	
		Kota Surakarta	1	0	
		Total	68	62	
TOTAL			Semarang	513	345
			Kabupaten Banyumas	134	110
			Kota Surakarta	64	24
			total	711	479

H. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN					Total			
	No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomenda si/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomenda si/ sertifikat yang diterbitkan Tepat	
								Semarang
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Semarang	1385	1385	1385		
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Semarang	284	284	280		
			Kabupaten Banyumas	65	56	56		
			Kota Surakarta	65	46	46		
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Semarang	565	565	555		
			Kabupaten Banyumas	47	47	47		
			Kota Surakarta	18	18	19		
Total				Semarang	4846	4846	4827	
				Kabupaten Banyumas	112	103	103	
				Kota Surakarta	83	64	65	
				Total	5041	5013	4995	

Sumber : RAPK 2020

I. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Total		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Semarang	23	18	13	13	0
		Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	5	2	1	1	0
		TOTAL	28	20	14	14	0
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Semarang	1		0	0	0
		Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	6		0	0	0
		TOTAL	7	0	0	0	0
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	Semarang	7	7	8	7	1
		Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	3	1	1	1	0
		TOTAL	10	8	9	8	1
4	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Semarang	1	1	1	1	0
		Kabupaten Banyumas	1	0	0	0	0
		Kota Surakarta	3	1	1	1	0
		TOTAL	5	2	2	2	0
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Semarang	38	37	29	12	17
		Kabupaten Banyumas	14	14	9	5	4
		Kota Surakarta	36	14	12	8	4
		TOTAL	88	65	50	25	25
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Semarang	8	6	4	1	3
		Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	3	1	0	0	0
		TOTAL	11	7	4	1	3
7	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Semarang	11	9	5	4	1
		Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	4		0	0	0
		TOTAL	15	9	5	4	1
8	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Semarang	1	1	0	0	0
		Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	0	0	0	0	0
		TOTAL	1	1	0	0	0

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Total		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
9	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Semarang	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0
10	Industri Kosmetik	Semarang	45	40	31	12	19
		Kabupaten Banyumas	9	9	2	2	0
		Kota Surakarta	46	6	5	4	1
		TOTAL	100	55	38	18	20
11	Industri Pangan	Semarang	250	208	157	74	83
		Kabupaten Banyumas	34	10	9	3	6
		Kota Surakarta	80	19	14	5	9
		TOTAL	364	237	180	82	98
12	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Semarang	9769	52	43	15	28
		Kabupaten Banyumas	2032	0	8	1	7
		Kota Surakarta	1736	0	0	0	0
		TOTAL	13537	52	51	16	35
	Semarang		10154	379	291	139	152
	Kabupaten Banyumas		2090	33	28	11	17
	Kota Surakarta		1922	44	34	20	14
	TOTAL		14166	456	353	170	183

Sumber : RAPK 2020

J. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN							
No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	Total		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Semarang	130	44	33	18	15
		Kabupaten Banyumas	77	7	8	5	3
		Kota Surakarta	56	11	10	8	2
		TOTAL	263	62	51	31	20
2	Apotek	Semarang	3006	164	188	109	79
		Kabupaten Banyumas	431	20	23	12	11
		Kota Surakarta	680	33	50	32	18
		TOTAL	4117	217	261	153	108
3	Toko Obat	Semarang	275	61	43	28	15
		Kabupaten Banyumas	71	8	3	2	1
		Kota Surakarta	57	12	9	7	2
		TOTAL	403	81	55	37	18
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Semarang	26	26	19	6	13
		Kabupaten Banyumas	4	4	4	2	2
		Kota Surakarta	5	5	3	3	0
		TOTAL	35	35	26	11	15
5	Rumah Sakit (RS)	Semarang	210	41	7	3	4
		Kabupaten Banyumas	38	12	1	0	1
		Kota Surakarta	52	8	2	1	1
		TOTAL	300	61	10	4	6
6	Puskemas	Semarang	632	82	5	3	2
		Kabupaten Banyumas	88	12	7	2	5
		Kota Surakarta	110	17	1	1	0
		TOTAL	830	111	13	6	7
7	Klinik	Semarang	1000	61	43	9	34
		Kabupaten Banyumas	350	14	10	4	6
		Kota Surakarta	228	12	2	1	1
		TOTAL	1578	87	55	14	41
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta			0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	Total		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Semarang	641	140	108	55	53
		Kabupaten Banyumas	129	15	18	6	12
		Kota Surakarta	153	27	21	7	14
		TOTAL	923	182	147	68	79
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Semarang	392	27	24	22	2
		Kabupaten Banyumas	129	5	0	0	0
		Kota Surakarta	102	5	4	4	0
		TOTAL	623	37	28	26	2
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Semarang	779	141	110	63	47
		Kabupaten Banyumas	135	30	23	15	8
		Kota Surakarta	93	26	20	7	13
		TOTAL	1007	197	153	85	68
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	Semarang	1903	210	218	166	52
		Kabupaten Banyumas	446	40	29	24	5
		Kota Surakarta	284	50	40	12	28
		TOTAL	8994	997	798	482	316
	Semarang		8994	997	798	482	316
	Kabupaten Banyumas		1898	167	126	72	54
	Kota Surakarta		1820	206	162	83	79
	TOTAL		12712	1370	1086	637	449

Sumber : RAPK 2020

K. Indeks Pelayanan Publik

INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPP UPT BPOM

No	Unit Pelayanan Publik	Baseline	Target	IPP	Keterangan
		2019	2020	2020	
1	Balai Besar POM di Denpasar	3,59	3,91	4,52	Pelayanan Prima
2	Balai POM di Manokwari	2,80	3,11	4,38	Sangat Baik
3	Balai Besar POM di Mataram	3,48	3,51	4,31	Sangat Baik
4	Balai Besar POM di Yogyakarta	3,98	4,31	4,29	Sangat Baik
5	Balai POM di Bengkulu	3,54	3,91	4,29	Sangat Baik
6	Balai Besar POM di Serang	3,41	3,51	4,25	Sangat Baik
7	Balai POM di Ambon	3,35	3,51	4,22	Sangat Baik
8	Balai Besar POM di Padang	3,36	3,51	4,21	Sangat Baik
9	Balai Besar POM di Samarinda	3,38	3,51	4,21	Sangat Baik
10	Balai Besar POM di Bandung	2,85	3,11	4,20	Sangat Baik
11	Balai Besar POM di Bandar Lampung	3,27	3,51	4,17	Sangat Baik
12	Balai Besar POM di Semarang	3,05	3,51	4,14	Sangat Baik
13	Balai Besar POM di Surabaya	4,14	4,51	4,11	Sangat Baik
14	Balai Besar POM di Pekanbaru	3,50	3,51	4,10	Sangat Baik
15	Balai Besar POM di Jayapura	3,34	3,51	4,08	Sangat Baik
16	Balai POM di Palu	2,94	3,11	4,02	Sangat Baik
17	Balai Besar POM di Jakarta	3,13	3,51	4,00	Baik

No	Unit Pelayanan Publik	Baseline	Target	IPP	Keterangan
		2019	2020	2020	
18	Balai POM di Gorontalo	3,46	3,51	3,96	Baik
19	Balai Besar POM di Makassar	3,33	3,51	3,95	Baik
20	Balai POM di Kupang	3,36	3,51	3,95	Baik
21	Balai POM di Pangkal Pinang	3,48	3,51	3,95	Baik
22	Balai Besar POM di Manado	3,36	3,51	3,91	Baik
23	Balai POM di Batam	3,59	3,91	3,91	Baik
24	Balai POM di Sofifi	2,96	3,11	3,86	Baik
25	Balai Besar POM di Medan	3,35	3,51	3,84	Baik
26	Balai Besar POM di Pontianak	3,42	3,51	3,83	Baik
27	Balai Besar POM di Palembang	3,36	3,51	3,80	Baik
28	Balai POM di Kendari	3,23	3,51	3,79	Baik
29	Balai Besar POM di Banjarmasin	2,82	3,11	3,69	Baik
30	Balai Besar POM di Banda Aceh	3,35	3,51	3,54	Baik
31	Balai Besar POM di Palangka Raya	3,46	3,51	3,52	Baik
32	Balai POM di Jambi	3,42	3,51	3,51	Baik
33	Balai POM di Mamuju	2,82	3,11	3,49	Baik dg Catatan

sumber : Data Inspektorat Badan POM

L. Tingkat Efektifitas Kie Obat Dan Makanan

INDEKS EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR/BALAI POM PERIODE TRIWULAN 4 TAHUN 2020																				
No.	Unit Pelaksana Teknis	Hasil Nilai Indeks Rata-Rata												Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	Indeks TW 4 - 2020	Keterangan	
		Televisi	Radio	Brosur, majalah, koran	Videotron/Billboard	Transportasi Umum	Bioskop	Media Online	Talkshow Televisi	Talkshow Radio	CFD	Pameran	Penyuluhan							Media sosial
UNIT PELAKSANA TEKNIS		89.02	82.23	90.68	85.17	82.65	66.93	90.79	88.06	83.40	92.00	90.55	91.13	90.81	88.49	91.51	94.92	94.72	88.40	93.38
A. REGIONAL SUMATERA		90.68	82.13	91.96	84.46	80.67	55.95	91.90	85.33	84.03	91.65	90.62	90.53	89.53	87.94	91.55	94.87	95.47	90.32	94.02
1	BBPOM di Banda Aceh	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	86.22	91.76	90.75	83.66	89.37
2	BBPOM di Medan	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	97.21	98.24	96.39	95.39	96.82
3	BBPOM di Padang	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	92.65	97.05	96.77	93.95	95.96
4	BBPOM di Pekanbaru						100.00								91.35	94.33	93.31	86.62		92.26
5	BPOM di Jambi	89.47	85.00	90.91	83.33	87.50		83.33	87.50	100.00	83.33	85.00	93.97	85.00	87.50	91.83	94.02	98.30	92.61	95.38
6	BBPOM di Palembang	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	89.53	96.14	93.38	90.44	93.27
7	BPOM di Bengkulu	100.00	100.00	97.92		100.00		100.00	100.00	100.00	97.73	95.00	90.15	94.64	97.22	90.72	97.06	96.02	94.89	95.60
8	BBPOM di Bandar Lampung	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	95.28	96.06	100.00	96.00	97.74
9	BPOM di Pangkal Pinang	91.67	93.75	88.64	85.00	85.00		86.76	85.71	100.00	87.50	90.00	90.00	89.81	90.00	91.61	94.21	97.28	84.24	93.63
10	BPOM di Batam	87.07	85.42	85.90	82.35	78.57	85.71	85.63	78.13	81.25	87.50	81.25	88.79	86.36	88.19	89.05	89.79	92.50	85.38	90.18
B. REGIONAL JAWA		89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	89.87	91.80	94.51	86.16	91.86
11	BBPOM di Jakarta	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	90.69	91.99	96.88	85.94	93.02
13	BBPOM di Semarang	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	91.30	92.91	95.21	84.57	92.36
15	BBPOM di Surabaya	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	88.78	93.94	93.03	90.16	92.38
16	BBPOM di Serang	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	89.79	86.31	94.17	88.33	90.53
C. REGIONAL BALI NUSRA		95.43	84.38	92.18	88.60	82.69	70.00	95.01	89.88	82.50	95.00	93.75	91.26	94.20	93.22	94.33	98.08	95.52	91.03	95.35
17	BBPOM di Denpasar	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	97.66	98.91	97.54	89.34	96.53
18	BBPOM di Mataran	100.00					100.00	100.00				90.28	100.00	100.00	100.00	90.20	97.97	92.57	90.54	93.51
19	BPOM di Kupang	96.71	93.75	91.49	92.19	90.38	90.00	92.39	96.43	90.00	96.25	94.64	93.13	92.59	93.94	95.14	97.36	96.45	93.21	96.02
D. REGIONAL KALIMANTAN		86.03	89.58	87.11	87.39	87.50	87.50	89.29	96.43	87.50	91.07	88.75	90.38	88.23	88.68	89.44	93.77	93.81	86.00	92.03
20	BBPOM di Pontianak	83.93	100.00	90.63	100.00	100.00	75.00	92.86	100.00	100.00	100.00	85.00	91.25	87.50	88.46	91.63	94.76	92.19	91.15	92.68
21	BBPOM di Palangkaraya	88.46	87.50	85.00	84.38	87.50	100.00	90.63	89.29	75.00	85.71	87.50	90.00	90.97	87.93	89.18	93.16	94.34	82.55	91.48
22	BBPOM di Banjarmasin												88.07	87.22		88.06	96.67	96.11	82.78	93.19
23	BBPOM di Samarinda	85.71	81.25	85.71	77.78	75.00	87.50	84.38	100.00		87.50	93.75	92.21	87.24	89.66	88.90	90.49	92.61	87.50	90.78
E. REGIONAL SULAM PAPUA		86.07	83.80	88.99	83.79	89.14	90.15	87.60	90.14	89.63	90.56	88.43	92.39	92.32	88.95	92.45	96.32	94.29	88.22	93.64
24	BBPOM di Manado	89.53	85.71	88.19	89.10	86.46	95.45	89.10	89.84	89.58	90.91	89.84	92.14	89.75	91.85	90.95	95.00	94.10	89.91	93.32
25	BPOM di Palu	79.17	91.67	85.71	75.00			85.71	87.50	87.50	83.33	83.33	91.67	85.71	81.25	91.14	98.49	94.58	83.33	93.42
26	BBPOM di Makassar	87.50	75.00	87.50	50.00	100.00		85.71	100.00		100.00	75.00	97.00	90.63	90.00	93.90	92.45	94.53	85.94	92.41
27	BPOM di Kendari	95.00	100.00	85.71	100.00	100.00		87.50	87.50		87.50	91.67	85.71	96.43	92.86	90.40	97.29	91.67	87.50	92.41
28	BPOM di Gorontalo	83.33	75.00					88.89	87.50	85.71	75.00	90.63	93.27	98.28	91.38	94.93	97.69	97.62	97.02	97.27
29	BPOM di Mamuju	95.00	75.00	95.00	100.00	75.00		93.75			95.83		95.54	91.67	87.50	94.81	97.23	97.78	90.56	96.10
30	BPOM di Ambon	88.89	75.00	92.86	87.50	87.50	75.00	90.38	93.75	87.50	93.75	95.00	89.29	92.11	91.67	89.80	97.45	94.29	86.43	93.39
31	BPOM di Soffi	75.00		85.00				75.00				96.62	93.75		94.64	97.66	96.35	87.50		95.04
32	BBPOM di Jayapura	83.93	89.29	92.50	81.25	75.00		89.06	83.33	100.00	93.75	87.50	88.89	92.31	82.35	87.35	90.12	92.22	83.33	89.63
33	BPOM di Manokwari	83.33	87.50	88.46	87.50	100.00	100.00	90.91	91.67	87.50	95.00	94.44	93.75	92.59	91.67	96.60	99.85	89.76	90.66	93.43

INDEKS EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN LOKA POM PERIODE TRIWULAN 4 TAHUN 2020

No.	Unit Pelaksana Teknis	Hasil Nilai Indeks Rata-Rata													Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	Indeks TW 4 - 2020	Keterangan		
		Televisi	Radio	Brosur, majalah, koran	Videotron/ Billboard	Transportasi Umum	Bioskop	Media Online	Talkshow Televisi	Talkshow Radio	CFD	Pameran	Penyuluhan	Media sosial							Virtual	
1	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	90.63	100.00	97.22	87.50	100.00		95.83	100.00			75.00	93.18	93.75	100.00	94.13	95.58	97.73	90.15	95.47		
2	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	87.50		87.50	87.50	100.00	100.00	85.00	83.33		100.00	83.33	88.54	80.77	85.00	89.43	92.31	93.18	92.05	92.37		
3	Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	100.00	100.00	86.11			75.00	100.00	75.00	100.00	90.00	87.50	93.33	87.50	83.33	90.89	93.95	95.06	88.66	93.24		
4	Loka POM di kabupaten Toba samosir	75.00		87.50	75.00	75.00	75.00	75.00	100.00			91.91	75.00	75.00	75.00	93.28	96.35	93.57	90.71	93.83		
5	Loka POM di Kota Tanjung Balai	87.50	75.00	83.33	100.00	75.00		90.00			93.75	100.00	85.42	93.75	95.00	94.22	96.16	95.59	91.76	94.96		
6	Loka POM di Kota Payah Kumbuh	90.00	95.00	89.58	87.50	90.00	75.00	89.29	81.25	91.67	96.43	95.83	92.05	96.43	100.00	93.59	95.47	98.03	90.79	95.63		
7	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	90.63	100.00	88.89	93.75	75.00		81.25	88.33		91.67	95.83	92.71	81.25	93.75	91.18	85.65	93.64	87.71	90.14		
8	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	85.00	95.83		100.00			96.43							89.29		92.74	100.00	91.94	90.32	94.01	
9	Loka POM di Kota Dumai													91.00		89.20	92.44	95.17	93.28	89.71	93.11	
10	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	100.00	100.00	92.50	100.00			75.00	87.50	98.75	97.22	91.67	97.27	91.67	91.67	96.69	99.15	99.62	97.97	98.74	Indeks Tertinggi	
11	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	79.17	75.00	84.38	75.00	83.33		90.00	87.50		87.50	87.50	86.67	83.33	89.58	86.07	94.59	88.89	83.33	89.26		
12	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong		83.33	98.21	97.62			91.67				81.25	93.06	95.83	83.33	94.95	99.95	99.42	90.12	97.45		
13	Loka POM di Kota Sungai Penuh	85.71	75.00	81.25	75.00			88.89	75.00		91.67	100.00	94.44	95.83	87.50	90.87	97.75	95.00	90.83	94.65		
14	Loka POM di Kabupaten Belitung	83.33		90.00	87.50	100.00		87.50	75.00		91.67	87.50	91.00	85.00	87.50	86.96	95.24	93.51	87.99	92.40		
15	Loka POM di Kota Tasikmalaya	80.00	100.00	80.56	83.33	75.00		80.77	87.50		83.33	100.00	79.17	85.71	80.56	84.56	93.88	92.31	83.41	90.46		
16	Loka POM di Kabupaten Bener	75.00		85.00	75.00			79.17	75.00		75.00	75.00	78.57	83.33	86.33	86.33	91.00	93.75	86.36	91.11		
17	Loka POM di Kabupaten Banyumas	93.75		80.00	83.33	75.00	75.00	86.36	75.00	75.00	75.00	87.50	86.11	90.00	81.25	86.30	90.95	92.97	91.47	91.47		
18	Loka Pom di Kota Surakarta	72.22	90.63	85.00	83.33	81.25		84.62	80.00	95.83	92.86	87.50	90.91	85.00	89.58	86.44	91.81	91.43	87.14	90.31		
19	Loka POM di Kabupaten Pangareng	85.00	95.00	95.83	100.00	100.00		97.92	99.79	100.00	100.00	100.00	94.44	93.33	87.50	95.59	93.30	94.76	97.44	94.23	92.78	
20	Loka POM di Kabupaten Kediri	85.00	92.86	95.83	100.00	91.67	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.44	93.33	87.50	95.59	93.30	94.76	97.44	94.23	95.73	
21	Loka POM di kabupaten Jember	86.11	75.00	84.38	83.33	75.00	75.00	87.50	87.50	75.00	75.00	75.00	91.30	95.00	90.00	94.89	96.90	94.92	87.29	94.17		
22	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	88.89	75.00	87.50				83.33	75.00		87.50	75.00	88.64	100.00	87.50	88.01	91.15	94.05	82.14	90.60		
23	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	87.50	100.00	90.00	90.00	87.50		90.91	87.50	100.00	100.00	91.67	94.44	89.13	100.00	89.93	86.31	95.59	87.50	91.04		
24	Laoka POM di Kabupaten Buleleng	90.63	91.67	87.50	100.00		87.50	87.50			87.50	85.00	86.76	84.62	82.50	90.41	95.43	93.94	83.08	92.15		
25	Loka POM di Kabupaten Merauke	85.42	85.71	87.50	83.33	75.00		88.46	85.71	85.00	92.31	87.50	92.11	82.14	87.50	91.30	95.01	97.87	93.09	95.60		
26	Loka POM di Kabupaten Mimika	89.29	91.67	84.38	89.29			83.33	87.50	92.86	87.50	95.83	96.67	89.58	88.46	91.75	94.23	95.83	86.67	93.41		
27	Loka POM di Kota Palopo	85.71	50.00	80.00	75.00	50.00		80.00	87.50		83.33	100.00	87.50	85.71	83.33	84.80	90.52	90.91	84.09	89.03		
28	Loka POM di Kepulauan Sangihe	90.00	75.00	89.29	75.00			93.75							90.22	83.33	86.96	98.32	85.87	82.61	88.92	
29	Loka POM di Kabupaten Bima													87.50	100.00		80.33	97.94	80.05	80.05	85.10	
30	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	85.63	90.00	89.58	87.50	81.25	75.00	88.75	89.29	75.00	89.29	92.86	88.21	89.58	82.84	86.97	93.22	95.24	87.30	92.50		
31	Loka POM di Kabupaten Sanggau	81.25	50.00	85.00		100.00		100.00	75.00		96.88	93.75	92.31	84.38	91.07	91.91	93.29	92.39	86.41	91.57		
32	Loka POK di Kota Balikpapan	82.50	68.75	84.78	82.81	81.25	80.56	87.50	77.08	100.00	86.11	81.25	87.50	86.25	86.23	87.31	88.19	92.47	72.59	87.36		
33	Loka POM di kota Tarakan	82.50	100.00	85.00	87.50	100.00	75.00	82.50	100.00	100.00	100.00	91.67	81.58	83.33	85.53	85.64	95.63	88.46	86.54	89.87		
34	Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat	100.00						100.00					100.00	78.13		100.00	78.78	100.00	79.65	79.07	85.18	
35	Loka POM di Kota Bau Bau	75.00		75.00				81.82	75.00		100.00	83.33	95.31	86.25	87.50	92.03	93.82	96.15	92.63	94.49		
36	Loka POM di Kabupaten Ende	93.75		87.50	75.00		100.00	89.29	75.00	100.00	75.00	100.00	95.00	93.18	94.23	89.4	91.73	92.45	86.51	90.93		
37	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	79.17	75.00	81.25	75.00			83.33					100.00	90.00	86.36	80.00	84.30	84.70	88.51	82.47	85.99	
38	Loka POM di Kabupaten Sorong	78.57	83.33	87.50	100.00	100.00		90.63		100.00	84.38	100.00	96.88	84.38	87.50	87.48	93.18	91.55	86.27	90.70		
39	Loka POM di Kabupaten Banggai	83.33	100.00	85.00	87.50	87.50	100.00	93.75	87.50		100.00	100.00	86.67	100.00	85.00	93.47	93.38	94.03	85.45	92.32		
40	Loka POM di Kabupaten Morotai	100.00	87.50	91.67		75.00		100.00	75.00	75.00	90.00	75.00	87.50	87.50	81.25	92.6	95.6	93.32	88.72	93.10		

Sumber : Data PMPU Badan POM

M. Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (New Normal)

No	UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres	Progres (Capaian DJA)												Total progres		
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
18	Semarang	1 Adokasi Lintas Sektor PJAS	20			20											20	
		2 Bimbingan Teknis Keamanan	20								6,67	13				10	30	
		3 Pemberian Paket Edukasi/Produk	15								6,50	8,50					15	
		4 Monitoring Pemberdayaan Kader	10														0	
		- Pembentukan Tim Keamanan										0,625	2,03	2			5	
		- Intervensi Keamanan Pangan										1	2,03	2			5	
		Sertifikasi Sekolah dengan PJAS	15												15		15	
																		0
																		0
																		0
																0		
																0		
		Total skor	80	0	0,00	20	0,00	0,00	0	0,00	13,17	23,08	4,06	19,69	10	90		

Sumber : Data PMPU Badan POM

N. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa Pangan Aman																	
No	UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Progres (Capaian DJA)												Total	
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
18	Semarang	1 Adokasi Kelembagaan Desa	20			20										20	
		2 Pengadaan gimmick, rapid test kit dll	5			5											5
		3 Pengawalan	10							10							10
		4 Pelatihan Kader Keamanan Pangan	15								2,5	5	5	2,5			15
		5 Bimtek Komunitas	15									2,5	5	2,5	2,5		12,5
		6 Fasilitasi Keamanan Pangan	10									1,5	2	1,5	3,3		8,3
		7 Intensifikasi Pengawasan Keamanan	10										1,5	3	1,5	2,3	8,3
		8 Monitoring dan Evaluasi (pertemuan)	10													10	10
		9 Lomba Desa Pangan Aman	5													5	5
Total			100	0	0	20	5	0	0	10	2,5	10,5	15	8	23,1	94,1	

Sumber : Data PMPU Badan POM

O. Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya																
No	UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Progres (Capaian DJA)												Total
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
18	Semarang	1 Adokasi	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
		2 Survey Pasar	5	0	1,67	1,67	0	0	0	0	1,66	0	0	0	0	5
		3 Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15	0	0	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	15
		4 Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	20	0	0	0	0	0	0	6	14	0	0	0	0	20
		5 Penyuluhan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	3,5	0	0	5
		6 Kampanye	5	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	5
		7 Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	0	30
		8 Lomba Pasar Aman	10													0
Total		100	0	1,67	21,67	0	0	0	18	23,66	1,5	13,5	20	0	100	

Sumber : Data PMPU Badan POM

P. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

UPT	Tahapan	s.d TW IV (Jan - Des)											
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai	Capaian perkara	% keberhasilan	
		Perkara	Perkara	Perkara s.d	Perkara								
Semarang	Semarang	SPDP	9	5	1		1,00		0,15	15,00%	75,50%	100,00%	75,50%
		Tahap I			4		0,89	0,36	0,4	36,73%			
		P21			1	2	0,44	0,36	0,3	17,72%			
		Tahap II			3	3	0,33	0,21	0,15	6,05%			
		Total	9	5	9	5							
	Kabupaten Banyumas	SPDP	2	1	1		1,00		0,15	15,00%	68,13%	100,00%	68,13%
		Tahap I					0,50	0,33	0,4	25,00%			
		P21					0,50	0,33	0,3	18,75%			
		Tahap II			1	1	0,50	0,33	0,15	9,38%			
		Total	2	1	2	1							
	Kota Surakarta	SPDP	2	2	1		1,00		0,15	15,00%	56,67%	100,00%	56,67%
		Tahap I			1		0,50	0,50	0,4	26,67%			
		P21					0,00	0,50	0,3	10,00%			
		Tahap II				2	0,00	0,50	0,15	5,00%			
		Total	2	2	2	2							
	TOTAL	SPDP	13	8	3		1,00		0,15	15,00%	71,39%	100,00%	71,39%
		Tahap I			5	0	0,77	0,38	0,4	33,32%			
		P21			1	2	0,38	0,38	0,3	16,63%			
		Tahap II			4	6	0,31	0,29	0,15	6,45%			
		Total	13	8	13	8							

sumber : RAPK 2020

Q. Intelijen dan Penyidikan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Semarang

Intelijen dan Penyidikan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan												
No	UPT	Target	Total									
			Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara						Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	
					SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan		
Semarang	42 Semarang	Tahun n	11	73	9	8	1	9	4	3	4	1.503.650.000
		Carry over *	5	0	0	0	0	0	2	6	0	0
	43 Kabupaten Banyumas	Tahun n	2	6	2	1	0	1	1	1	1	567.525.100
		Carry over *	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	44 Kota Surakarta	Tahun n	2	6	2	2	0	1	0	0	0	306.000.000
		Carry over *	2	2	0	0	0	1	2	2	0	6.735.000
		Semarang	16	73	9	8	1	9	6	9	4	1.503.650.000
		Kabupaten Banyumas	3	6	2	1	0	1	1	2	2	567.525.100
		Kota Surakarta	4	8	2	2	0	2	2	2	0	312.735.000
		TOTAL SELURUH UPT	23	87	13	11	1	12	9	13	6	2.383.910.100

Sumber : RAPK 2020

R. Indeks RB 2020

INDEKS RB UNIT KERJA Nilai Konversi Semua Unit Kerja Tahun 2020

UNIT KERJA YANG DIAJUKAN WBBM TAHUN 2020

No	Unit Kerja	Nilai Konversi
1	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	89,73
2	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	88,77

UNIT KERJA YANG DIAJUKAN WBK TAHUN 2020

No	Unit Kerja	Nilai Konversi
1	BBPOM di Mataram	86,10
2	Dit Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	85,75
3	BBPOM di Gorontalo	85,62
4	BBPOM di Semarang	84,76
5	Direktorat Standar Pangan Olahan	84,69
6	Dit Pengawasan OTSK	83,83
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	83,06
8	Dit Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	82,83
9	BPOM di Batam	82,02
10	BBPOM di Manado	81,85
11	BBPOM di Palembang	81,72
12	BPOM di Bengkulu	81,33
13	Direktorat Registrasi Obat	80,85
14	BPOM di Manokwari	80,54
15	BBPOM di Jakarta	80,17
16	BBPOM di Bandung	80,15
17	BPOM di Pangkal pinang	80,05
18	BBPOM di Bandar Lampung	79,8
19	Direktorat Pengawasan Kosmetik	78,66

UNIT KERJA YANG TIDAK DIAJUKAN TAHUN 2020

No	Unit Kerja	Nilai Konversi
1	Inspektorat II	86,16
2	BBPOM di Padang	83,59
3	BBPOM di Serang	82,71
4	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,42
5	BBPOM di Surabaya	81,08
6	Inspektorat I	80,97
7	BBPOM di Yogyakarta	80,36
8	BBPOM di Pekanbaru	80,15
9	Direktorat Intelijen	79,73
10	Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	78,42
11	Direktorat Pengawasan Produksi Obat Narkotika Prekursor dan Psikotropika	78,38
12	BPOM di Palu	78,3
13	BBPOM di Samarinda	77,63
14	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	77,09
15	BBPOM di Banda Aceh	76,92
16	BBPOM di Pontianak	76,74
17	Pusat Pengembangan SDM	76,57
18	Direktorat Pengawasan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	76,37
19	BBPOM di Palangkaraya	76,19
20	Biro Perencanaan dan Keuangan	75,93
21	BPOM di Denpasar	75,41
22	Direktorat Pengamanan	74,77
23	BPOM di Ambon	74,47
24	BBPOM di Banjarmasin	74,08
25	Biro Hukum dan Organisasi	74,04
26	BPOM di Kendari	73,47
27	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	73,46
28	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	73,11
29	Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	72,83
30	BPOM di Jambi	71,51
31	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan	70,21
32	Biro Umum dan SDM	69,03
33	BBPOM di Jayapura	68,65
34	Biro Kerja Sama	68,57
35	BBPOM di Medan	66,34
36	BPOM di Sofifi	61,91
37	BPOM di Kupang	61,75
38	BPOM di Mamuju	61,05
39	Direktorat Penyidikan	58,99
40	BBPOM di Makassar	50,45

Activate Windows

sumber : Data Inspektorat Badan POM

S. Nilai AKIP 2019

NILAI SAKIP BB/BPOM TAHUN 2020



No	Nama Balai	Nilai Final Evaluasi 2020
1	Balai Besar POM di Yogyakarta	81.13
2	Balai Besar POM di Surabaya	81.11
3	Balai Besar POM di Pekanbaru	81.02
4	Balai Besar POM di Bandung	80.54
5	Balai Besar POM di Samarinda	80.10
6	Balai Besar POM di Serang	79.62
7	Balai Besar POM di Palembang	78.87
8	Balai Besar POM di Padang	78.32
9	Balai Besar POM di Mataram	78.17
10	Balai Besar POM di Jakarta	78.08
11	Balai POM di Palu	78.05
12	Balai POM di Gorontalo	77.80
13	Balai Besar POM di Manado	77.73
14	Balai POM di Jambi	77.65
15	Balai Besar POM di Pontianak	77.57
16	Balai Besar POM di Semarang	77.49

No	Nama Balai	Nilai Final Evaluasi 2020
17	Balai Besar POM di Medan	77.24
18	Balai Besar POM di Jayapura	77.22
19	Balai Besar POM di Makassar	77.27
20	Balai Besar POM di Palangkaraya	77.05
21	Balai Besar POM di Kupang	77.00
22	Balai POM di Kendari	76.23
23	Balai POM di Pangkalpinang	76.15
24	Balai Besar POM di Banjarmasin	76.14
25	Balai POM di Batam	76.06
26	Balai Besar POM di Banda Aceh	75.91
27	Balai Besar POM di Denpasar	75.89
28	Balai POM di Ambon	75.44
29	Balai Besar POM di Bandar Lampung	74.74
30	Balai POM di Manokwari	74.68
31	Balai POM di Mamuju	73.37
32	Balai POM di Bengkulu	73.30
33	Balai POM di Sofifi	71.99

Sumber : Data Inspektorat Badan POM

T. Indeks Profesionalitas ASN

No.	Nama Unit Kerja	Tahun 2019			Tahun 2020		
		IP	Jumlah	Total IP	IP	Jumlah	Total IP
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	71,77	74	5310,98	80,94	69	5585
2	Balai Besar POM di Medan	70,29	104	7310,16	83,08	110	9139
3	Balai Besar POM di Padang	69,26	96	6787,48	83,60	109	9103,5
4	Balai Besar POM di Pekanbaru	73,38	85	6237,3	77,78	93	7234
5	Balai POM di Jambi	69,25	70	4847,5	85,16	67	5706
6	Balai Besar POM di Palembang	62,13	81	5032,53	84,15	78	6563,5
7	Balai POM di Bengkulu	61,53	70	4307,1	83,30	69	5748
8	Balai Besar POM di Bandar Lampung	78,83	82	6464,06	76,21	87	6630
9	Balai POM di Batam	70,81	43	3044,83	85,10	48	4085
10	Balai POM di Pangkalpinang	82,65	49	4049,85	84,15	47	3955
11	Balai Besar POM di Jakarta	79,44	111	8817,84	83,94	115	9653
12	Balai Besar POM di Bandung	84,21	141	11873,6	78,25	138	10799
13	Balai Besar POM di Semarang	77,92	145	11298,4	85,57	152	13007
14	Balai Besar POM di Yogyakarta	73,84	108	7974,72	85,61	105	8989
15	Balai Besar POM di Surabaya	72,62	142	10312	84,79	139	11786
16	Balai Besar POM di Serang	76,15	81	6168,15	82,99	83	6888
17	Balai Besar POM di Denpasar	68,57	96	6582,72	85,10	101	8595
18	Balai Besar POM di Mataram	80,03	74	5922,22	83,33	72	6000
19	Balai POM di Kupang	80,12	63	5047,56	85,32	63	5375
20	Balai Besar POM di Pontianak	77,59	71	5508,89	82,72	67	5542
21	Balai Besar POM di Palangkaraya	72,63	57	4139,91	81,39	54	4395
22	Balai Besar POM di Banjarmasin	75,38	74	5578,12	80,16	64	5130,5
23	Balai Besar POM di Samarinda	65,49	74	4846,26	84,46	71	5997

No.	Nama Unit Kerja	Tahun 2019			Tahun 2020		
		IP	Jumlah	Total IP	IP	Jumlah	Total IP
24	Balai Besar POM di Manado	78,36	67	5250,12	84,65	72	6095
25	Balai POM di Palu	74	63	4662	83,85	65	5450
26	Balai Besar POM di Makassar	66,67	125	8333,75	73,49	122	8966
27	Balai POM di Kendari	73,42	72	5286,24	82,80	71	5878,5
28	Balai POM di Gorontalo	78,11	46	3593,06	83,28	43	3581
29	Balai POM di Ambon	72	59	4248	82,30	60	4938
30	Balai Besar POM di Jayapura	79,2	71	5623,2	83,77	70	5864
31	Balai POM di Manokwari	70,7	38	2686,6	84,49	39	3295
32	Balai POM di Sofifi	58,14	31	1802,34	83,28	30	2498,5
33	Balai POM di Mamuju	70,46	26	1831,96	81,33	27	2196

Sumber : Data Biro UMUM Badan POM

U. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat Dan Makanan Sesuai Standar GLP

No.	Balai Besar/ Balai POM	Standar Ruang Lingkup	Peralatan	Kompetensi	TOTAL PER BALAI
		Rata-Rata	Rata-Rata	Rata-Rata	
1	Mataram	72.1	75.6	85.4	77.7
2	Serang	72.5	71.3	85.3	76.3
3	Surabaya	88.2	77.4	87.8	78.1
4	Samarang	70.3	71.2	84.2	75.2
5	Medan	72.5	67.9	84.0	74.8
6	DKI Jakarta	70.5	66.7	87.1	74.7
7	Yogyakarta	67.5	70.7	85.8	74.7
8	Padang	68.2	66.9	86.7	73.9
9	Aceh	67.1	73.3	80.0	73.5
10	Denpasar	69.0	60.3	90.8	73.3
11	Pangkalpinang	70.0	69.3	80.5	73.3
12	Palu	71.1	66.1	82.4	73.2
13	Pekanbaru	64.9	72.0	80.4	72.4
14	Manado	63.1	74.2	78.3	71.8
15	Bandung	66.6	66.4	81.5	71.5
16	Gorontalo	66.5	64.9	83.2	71.5
17	Pontianak	67.7	57.2	89.7	71.5
18	Palangkaraya	59.7	63.9	88.8	70.8
19	Makassar	67.2	66.2	78.3	70.6
20	Batam	64.0	60.9	87.0	70.6
21	Palembang	66.1	59.2	86.2	70.5
22	Kupang	65.6	56.3	89.1	70.3
23	Bengkulu	58.3	61.9	86.2	68.8
24	Kendari	62.8	63.5	79.4	68.6
25	Ambon	67.8	52.3	83.5	67.9
26	Bandar Lampung	64.1	56.2	82.6	67.7
27	Jambi	67.0	55.7	79.2	67.3
28	Banjarmasin	65.2	57.1	79.4	67.2
29	Jayapura	66.2	62.8	71.4	66.8
30	Manokwari	55.6	53.8	81.4	63.6
31	Samarinda	65.8	49.7	74.6	63.4
32	Mamuju	41.8	22.0	71.2	45.0
33	Sofifi	29.7	16.3	46.5	30.8
	RATA-RATA	64.7	61.5	81.5	69.2

Sumber : Data PPPOMN Badan POM

V. Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi

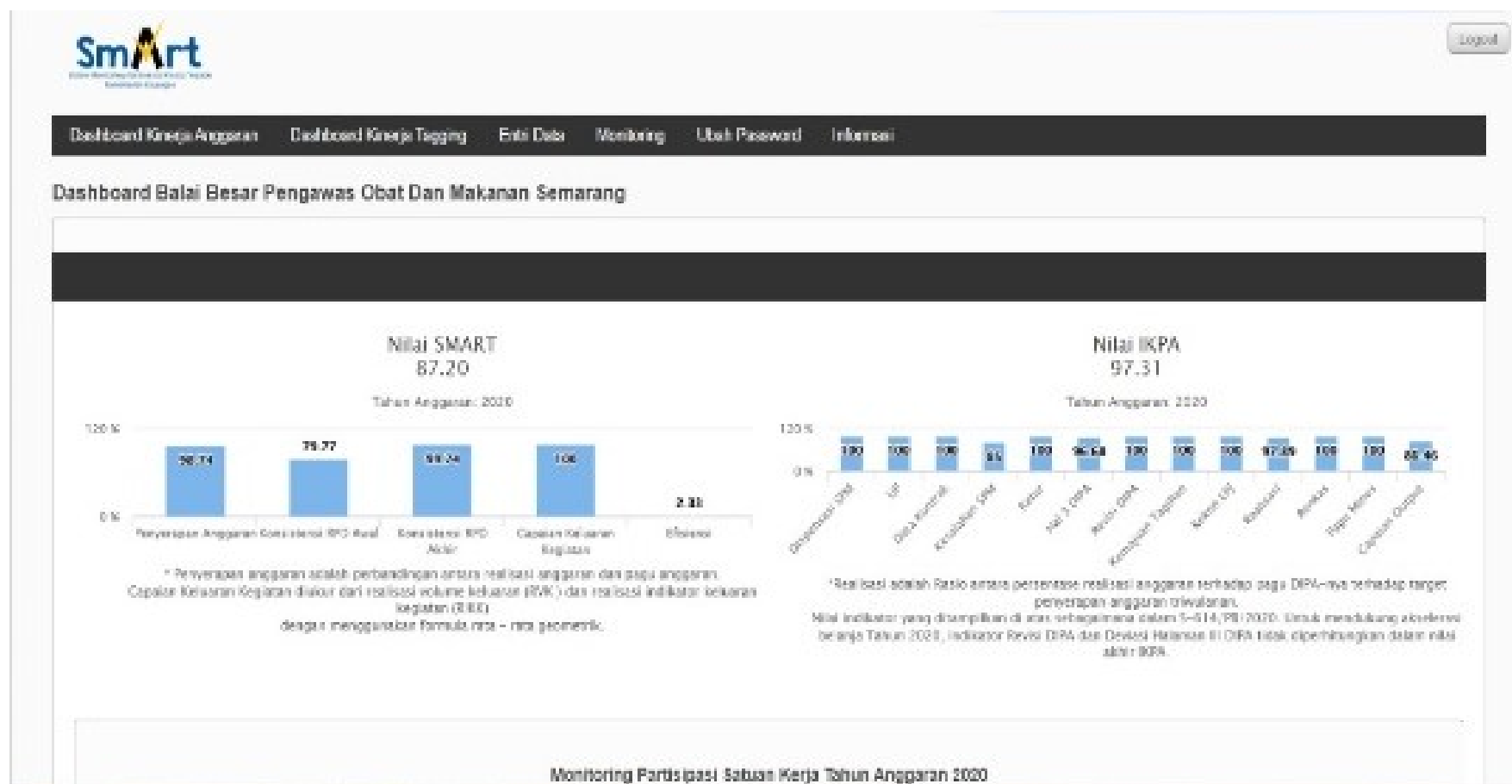
No	Nama Balai	Data dan Informasi Mutakhir		Jumlah c = a + b	Pemanfaatan Sistem Informasi				Jumlah h = d+e+f+g/4	Total Nilai i i = c + h / 2
		SIPT (a) 80%	SPIMKER (b) 20%		Email (d)	Sharing Folder (e)	Dashboard BCC (f)	Berita Aktual (g)		
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	2,4	0	2,4	0	2	0	2	1	1,7
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	2,4	0	2,4	0	1	0	2	0,75	1,58
3	Balai Besar POM di Bandung	2,4	0,6	3	1	1	0	2	1	2
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	2,4	0	2,4	0	3	0	2	1,25	1,82
5	Balai Besar POM di Denpasar	2,4	0,4	2,8	0	3	0	1	1	1,9
6	Balai Besar POM di Jakarta	2,4	0	2,4	2	3	0	2	1,75	2,08
7	Balai Besar POM di Jayapura	2,4	0	2,4	1	1	0	1	0,75	1,58
8	Balai Besar POM di Makassar	2,4	0	2,4	0	0	0	1	0,25	1,32
9	Balai Besar POM di Manado	2,4	0	2,4	1	3	0	2	1,5	1,95
10	Balai Besar POM di Mataram	2,4	0	2,4	2	1	0	2	1,25	1,82
11	Balai Besar POM di Medan	2,4	0	2,4	1	1	0	3	1,25	1,82
12	Balai Besar POM di Padang	2,4	0,4	2,8	2	3	1	3	2,25	2,52
13	Balai Besar POM di Palembang	2,4	0,6	3	3	3	0	2	2	2,5
14	Balai Besar POM di Pekanbaru	2,4	0	2,4	0	2	0	3	1,25	1,82
15	Balai Besar POM di Pontianak	2,4	0	2,4	0	3	0	3	1,5	1,95
16	Balai Besar POM di Samarinda	2,4	0	2,4	1	3	0	2	1,5	1,95
17	Balai Besar POM di Semarang	2,4	0	2,4	0	3	0	2	1,25	1,82
18	Balai Besar POM di Serang	2,4	0,4	2,8	1	3	0	2	1,5	1,95
19	Balai Besar POM di Surabaya	2,4	0,4	2,8	2	3	2	2	2,25	2,52
20	Balai Besar POM di Yogyakarta	2,4	0	2,4	0	3	0	3	1,5	1,95
21	Balai POM di Ambon	2,4	0	2,4	0	0	0	3	0,75	1,58
22	Balai POM di Batam	1,6	0	1,6	0	3	0	1	1	1,3
23	Balai POM di Bengkulu	2,4	0,6	3	0	2	0	2	1	2
24	Balai POM di Gorontalo	2,4	0	2,4	0	2	0	2	1	1,7
25	Balai POM di Jambi	2,4	0	2,4	0	1	0	1	0,5	1,45
26	Balai POM di Kendari	2,4	0	2,4	0	1	0	1	0,5	1,45
27	Balai POM di Kupang	2,4	0	2,4	3	2	0	2	1,75	2,08
28	Balai POM di Mamuju	2,4	0	2,4	2	1	0	1	1	1,7
29	Balai POM di Manokwari	2,4	0	2,4	2	1	0	2	1,25	1,82
30	Balai POM di Palangka Raya	1,6	0	1,6	2	1	0	2	1,25	1,42
31	Balai POM di Palu	2,4	0	2,4	1	2	0	2	1,25	1,82
32	Balai POM di Pangkal Pinang	2,4	0,6	3	1	1	0	2	1	2
33	Balai POM di Sofifi	2,4	0	2,4	0	1	0	1	0,5	1,45

Jakarta, 14 Januari 2021
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan


Syamsidar Thamrin, ST, MBA

Sumber : Data Pusdatin Badan POM

W. Nilai Kinerja Anggaran



Sumber : Aplikasi SMART DJA 2020

$$\begin{aligned}
 NKA &= (60\% * IKPA) + (40\% * EKA) \\
 NKA &= (60\% * 97,31) + (40\% * 87,20) \\
 NKA &= 91,244
 \end{aligned}$$

X. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran Strategis		Capaian Terhadap Target Tahunan (Output)	Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			T	R	%			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	95,94	1.063.337.400	1.053.376.504	99,06	0,97	-0,03	Tidak Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	99,88	7.214.799.000	7.010.395.383	97,17	1,03	0,03	Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM DI SEMARANG	100,88	205.015.000	204.037.900	99,52	1,01	0,01	Efisien
Capaian Perspective stakeholder		98,90	8.483.151.400	8.267.809.787	97,46	1,01	0,01	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM DI SEMARANG	106,87	1.915.018.000	1.900.961.290	99,27	1,08	0,08	Efisien

5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	103,75	1.468.362.000	1.431.634.807	97,50	1,06	0,06	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	109,90	531.668.600	526.688.252	99,06	1,11	0,11	Efisien
Sasaran Strategis		Capaian Terhadap Target Tahunan (Output)	Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			T	R	%			
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	101,99	853.008.000	845.770.718	99,15	1,03	0,03	Efisien
Capaian Internal Process Perspective		105,65	4.768.056.600	4.705.055.067	98,68	1,07	0,07	Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM DI SEMARANG yang optimal	94,40	1.741.501.000	1.711.483.080	98,28	0,96	-0,04	Tidak Efisien

9	Terwujudnya SDM BBPOM DI SEMARANG yang berkinerja optimal	111,13	391.838.000	390.439.750	99,64	1,12	0,12	Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	105,85	2.771.425.000	2.734.963.249	98,68	1,07	0,07	Efisien
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM DI SEMARANG secara Akuntabel	104,09	30.617.847.000	30.375.155.967	99,21	1,05	0,05	Efisien
Capaian Learning & Growth Perspective		103,87	35.522.611.000	35.212.042.046	99,13	1,05	0,05	Efisien
NPS TOTAL		102,81	48.773.819.000	48.184.906.900	98,79	1,04	0,04	Efisien

Y. Realisasi Anggaran 2020

BIDANG	OUTPUT		PAGU	REALISASI	SISA	%
	KODE	KET				
3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			48.773.819.000	48.184.906.919	588.912.081	98,79 %
Pemeriksaan & Pengujian	3165.003	3165.003 Sampel Makanan yang Diperiksa	486.336.000	472.828.787	13.507.213	97,22 %
Pemeriksaan (Inspeksi)	3165.004	3165.004 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	421.764.000	416.895.577	4.868.423	98,85 %
Pemeriksaan (Inspeksi)	3165.005	3165.005 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	1.032.169.000	1.025.740.298	6.428.702	99,38 %
Penindakan	3165.011	3165.011 Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	48.175.000	47.457.386	717.614	98,51%
Pengujian	3165.012	3165.012 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	2.893.236.000	2.855.440.169	37.795.831	98,69 %

BIDANG	OUTPUT		PAGU	REALISASI	SISA	%
	KODE	KET				
Penindakan	3165.015	3165.015 Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Jawa Tengah	804.833.000	798.313.332	6.519.668	99,19%
Pemeriksaan & Pengujian	3165.081	3165.081 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa	1.108.670.000	1.107.235.968	1.434.032	99,87 %
Loka	3165.083	3165.083 Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan	202.022.000	199.437.080	2.584.920	98,72 %
Infokom	3165.085	3165.085 Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	295.000.000	291.786.585	3.213.415	98,91%
Pemeriksaan (Sertifikasi)	3165.087	3165.087 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	663.340.000	659.604.015	3.735.985	99,44 %
Infokom	3165.088	3165.088 KIE Obat dan Makanan Aman	7.485.464.000	7.279.243.997	206.220.003	97,25 %
Infokom	3165.089	3165.089 Desa Pangan Aman	763.017.000	737.966.778	25.050.222	96,72 %

Bidang	Output		pagu	realisasi	sisa	%
	kode	ket				
Infokom	3165.090	3165.090 Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	142.440.000	135.792.150	6.647.850	95,33 %
Tata Usaha	3165.951	3165.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	293.192.000	292.125.740	1.066.260	99,64 %
Tata Usaha	3165.970	3165.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.649.385.000	1.621.899.020	27.485.980	98,33 %
Tata Usaha	3165.994	3165.994 Layanan Perkantoran	30.484.776.000	30.243.140.037	241.635.963	99,21%

LAMPIRAN 8. SK REWARD AND PUNISHMENT ATAS CAPAIAN IKU



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A. Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : ikpomam@yahoo.com Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Nomor HK.02.02.104.1041.05.20.1127 TAHUN 2020
TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT ATAS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SERTA REALISASI ANGGARAN DI LINGKUNGAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

- Menimbang :
- a. Bahwa diperlukan mekanisme yang dapat mempercepat tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Realisasi Anggaran di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang;
 - b. Bahwa untuk mendorong percepatan pencapaian IKU serta Realisasi Anggaran perlu diberikan *Reward* Serta *Punishment* di jajaran Eselon-3 di Lingkungan Balai Besar POM di Semarang dengan tetap menjunjung tinggi iklim kompetisi yang sehat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang tentang Mekanisme Pemberian *Reward* dan *Punishment* Capaian IKU serta Realisasi Anggaran di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

J. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : ikpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

8. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
9. Keputusan Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor PR.01.02.104.12.19.6531.1 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TENTANG MEKANISME PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

- KESATU :
1. Reward dan Punishment diberikan kepada masing-masing Unit Eselon-3 di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang atas capaian IKU serta Realisasi Anggaran yang diberikan setiap akhir Semester (6 Bulan Sekali);
 2. Pemberian *reward* dan *punishment* dilakukan berdasarkan nilai kinerja masing-masing Unit Eselon-3 di Aplikasi *E-Performance*;
 3. Penilaian dilakukan dengan prosentase 60 % Capaian Kinerja dan 40% Capaian Anggaran
 4. Terhadap Unit Eselon-3 dengan nilai tertinggi diantara Unit Eselon-3 lainnya akan diberikan *reward* berupa Sertifikat Penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang;
 5. Terhadap Unit Eselon-3 dengan nilai terendah diantara Unit Eselon-3 lainnya akan diberikan *punishment* berupa Surat Pemberitahuan yang ditanda tangani Kepala Balai Besar POM di Semarang serta diwajibkan untuk memberikan Rencana Kerja dan Rencana Penarikan Anggaran yang disampaikan Kepada Kepala Balai Besar POM di Semarang
 6. Pengumuman Unit Eselon-3 penerima *reward* serta *punishment* akan dilakukan pada saat Apel Pembinaan Rutin Balai Besar POM di Semarang;



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. (024) 7612324 Fax. (024) 7613633
Email : ikpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

- KEDUA : Penilaian dilakukan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang berdasarkan atas data Capaian Kinerja dan Anggaran yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Mei 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SEMARANG



GUSTI AYU ADHI ARYAPATNI

LAMPIRAN 9. NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) BBPOM DI SEMARANG DAN KLASTER 1 BBPOM

Capaian BBPOM di Semarang Semarang								Capaian Klaster 1				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2020	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian (e-Performance)					
			Pembilang	Penyebut	Realisasi		Semarang	Bandung	Makassar	Surabaya		
Stakeholder Perspective												
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00%	1304	1541	84,62%	94,02 Baik	94,02 Baik	120,00 Tidak Dapat disimpulkan	109,02 Baik	113,12 Sangat Baik
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	368	495	74,34%	95,31 Baik	95,31 Baik	98,46 Baik	110,08 Sangat Baik	102,69 Baik
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00%	335	427	78,45%	88,15 Cukup	88,15 Cukup	104,99 Baik	103,50 Baik	104,42 Baik

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2020	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian (e-Performance)			
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		Semarang	Bandung	Makassar	Surabaya
Capaian SS2								99,88 Baik	99,88 Baik	93,54 Baik	103,19 Baik	100,32 Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	-	-	86,03	104,91 Baik	104,91 Baik	109,42 Baik	99,40 Baik	100,73 Baik
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	-	-	69,30	97,61 Baik	97,61 Baik	106,24 Baik	107,16 Baik	104,48 Baik

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2020	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian (e-Performance)				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		Semarang	Bandung	Makassar	Surabaya	
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88	-	-	88,11	100,13	100,13	97,07	104,84	102,23
Capaian SS3							100,88 Baik	100,88 Baik	104,24 Baik	103,80 Baik	102,49 Baik	
Capaian Perspective stakeholder							98,90 Baik	98,91 Baik	100,67 Baik	104,16 Baik	104,29 Baik	
Internal Process Perspective												
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	-	-	82,98	95,38	95,38	111,32	78,38	101,40
							Baik	Baik	Sangat Baik	Cukup	Baik	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2020	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian (e-Performance)									
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		Semarang	Bandung	Makassar	Surabaya						
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,6	-	-	78,01	100,53	100,53	91,20	94,38	99,42	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	4995	5041	99,09%	116,57	116,58	101,78	113,45	103,80	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2020	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian (e-Performance)				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		Semarang	Bandung	Makassar	Surabaya	
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM DI SEMARANG	12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00%	172	359	47,91%	104,15 Baik	104,15 Baik	113,18 Sangat Baik	103,93 Baik	111,39 Sangat Baik
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM DI SEMARANG	13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	637	1086	58,66%	106,65 Baik	106,65 Baik	96,96 Baik	120,00 Tidak Dapat disimpulkan	88,05 Cukup
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM DI SEMARANG	14	Indeks Pelayanan Publik	3,51	-	-	4,14	117,95 Sangat Baik	117,95 Sangat Baik	113,51 Sangat Baik	99,15 Baik	95,36 Baik

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2020	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian (e-Performance)			
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		Semarang	Bandung	Makassar	Surabaya
Capaian SS4								106,87 Baik	106,89 Baik	104,65 Baik	101,55 Baik	102,77 Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	84,31%	-	-	91,38%	108,39 Baik	108,39 Baik	103,74 Baik	108,51 Baik	105,11 Baik
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	90	0	18	112,50 Sangat Baik	112,50 Sangat Baik	100,00 Baik	100,00 Baik	100,00 Baik
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	17	Jumlah desa pangan aman	6	0	0	5,646	94,10 Baik	94,17 Baik	100,00 Baik	100,00 Baik	100,00 Baik

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2020	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian (e-Performance)			
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		Semarang	Bandung	Makassar	Surabaya
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	18	Jumlah pasaran aman dari bahan berbahaya	3	0	0	3	100,00 Baik	100,00 Baik	100,00 Baik	100,00 Baik	100,00 Baik
Capaian SS5								103,75 Baik	103,77 Baik	100,94 Baik	102,13 Baik	101,28 Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,00%	-	-	100,00 %	108,70 Baik	108,70 Baik	109,45 Baik	112,01 Sangat Baik	118,15 Sangat Baik
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,00%	-	-	100,00 %	111,11 Sangat Baik	111,11 Sangat Baik	108,05 Baik	120,00 Tidak Dapat disimpulkan	120,00 Tidak Dapat disimpulkan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2020	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian (e-Performance)			
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		Semarang	Bandung	Makassar	Surabaya
Capaian SS6								109,90 Baik	109,91 Baik	108,76 Baik	116,01 Sangat Baik	119,08 Sangat Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00%	-	-	71,39%	101,99 Baik	101,99 Baik	84,23 Cukup	120,00 Tidak Dapat disimpulkan	109,05 Baik
Capaian SS7								101,99 Baik	101,99 Baik	84,23 Cukup	120,00 Tidak Dapat disimpulkan	109,05 Baik
Capaian Internal Process Perspective								105,65 Baik	105,64 Baik	99,65 Baik	109,92 Baik	108,05 Baik
Learning & Growth Perspective												
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM DI SEMARANG yang optimal	22	Indeks RB BBPOM DI SEMARANG	91	-	-	84,76	93,14 Baik	93,14 Baik	88,08 Cukup	59,35 Kurang	89,08 Cukup

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2020	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian (e-Performance)			
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		Semarang	Bandung	Makassar	Surabaya
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM DI SEMARANG yang optimal	23	Nilai AKIP BBPOM DI SEMARANG	81	-	-	77,49	95,67 Baik	95,67 Baik	99,43 Baik	95,40 Baik	100,14 Baik
Capaian SS8								94,40 Baik	94,41 Baik	93,76 Baik	77,38 Cukup	94,61 Baik
9	Terwujudnya SDM BBPOM DI SEMARANG yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM DI SEMARANG	77	-	-	85,57	111,13 Sangat Baik	111,13 Sangat Baik	104,77 Baik	97,99 Baik	113,45 Sangat Baik
Capaian SS9								111,13 Sangat Baik	111,13 Sangat Baik	104,77 Baik	97,99 Baik	113,45 Sangat Baik

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2020	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian (e-Performance)				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		Semarang	Bandung	Makassar	Surabaya	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	-	-	75,2	91,71	91,71	94,08	89,59	95,13
							Baik	Baik	Baik	Cukup	Baik	
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG yang optimal	1,51	-	-	1,82	121	120	120	87	120
							Tidak Dapat disimpulkan	Tidak Dapat disimpulkan	Tidak Dapat disimpulkan	Cukup	Tidak Dapat disimpulkan	
Capaian SS10							106,12 Baik	105,86 Baik	107,04 Baik	88,51 Cukup	107,57 Baik	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2020	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian (e-Performance)			
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		Semarang	Bandung	Makassar	Surabaya
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM DI SEMARANG secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM DI SEMARANG	94	-	-	91,244	97,07 Baik	97,07 Baik	102,30 Baik	100,08 Baik	106,65 Baik
	Terkelolanya Keuangan BBPOM DI SEMARANG secara Akuntabel	28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM DI SEMARANG	90,00%	-	-	100%	111,11 Sangat Baik	111,11 Sangat Baik	108,70 Baik	113,64 Sangat Baik	108,70 Baik
Capaian SS11								104,09 Baik	104,10 Baik	105,50 Baik	106,86 Baik	107,68 Baik
Capaian Learning & Growth Perspective								103,94 Baik	103,88 Baik	102,77 Baik	92,69 Baik	105,83 Baik
NPS TOTAL								102,83 Baik	102,81 Baik	101,03 Baik	102,26 Baik	106,06 Baik

sumber : Aplikasi e-performance yang di olah

2020

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang
Jl Sukun Raya No 41 A Banyumanik Semarang 50264